

**PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA BERBASIS POTENSI ALAM
DESA SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat
Utama Inovasi Pemerintahan**

Oleh

Mochammad Akhbar Priyanto

NIM. 145120600111028



**PEMINATAN INOVASI PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA BERBASIS POTENSI ALAM
DESA SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

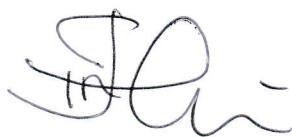
Mochammad Akhbar Priyanto

NIM. 145120600111028

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Irma Fitriana Ulfah, S.IP.,M.Si
NIK. 2013048811042001



Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos.,M.A
NIK.2016078805142001

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA BERBASIS POTENSI ALAM
DESA SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG
SKRIPSI**

Disusun Oleh:

Mochammad Akhbar Priyanto


NIM. 145120600111028

**Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada tanggal 17 Oktober 2018**


Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji


Sekretaris Majelis Penguji



Dr. George Towar Ikbal Tawakkal,
S.IP.,M.Si
NIK.2010088511111001

Anggota Majelis Penguji 1


Laode Machdani Afala, S.IP.,M.A
NIK.2016078703181000

Anggota Majelis Penguji 2


Irma Fitriana Ulfah, S.IP.,M.Si
NIK.2013048811042001


Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos.,M.A
NIK.2016078805142001

Malang, 17 Oktober 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo., S.E.,M.Si, Ak.
NIP.196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Mochammad Akhbar Priyanto

NIM : 145120600111028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Pembangunan Desa Ekowisata Berbasis Potensi Alam Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam lembar Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Malang, 17 Oktober 2018

Yang Memberi Pernyataan

Mochammad Akhbar Priyanto

145120600111028

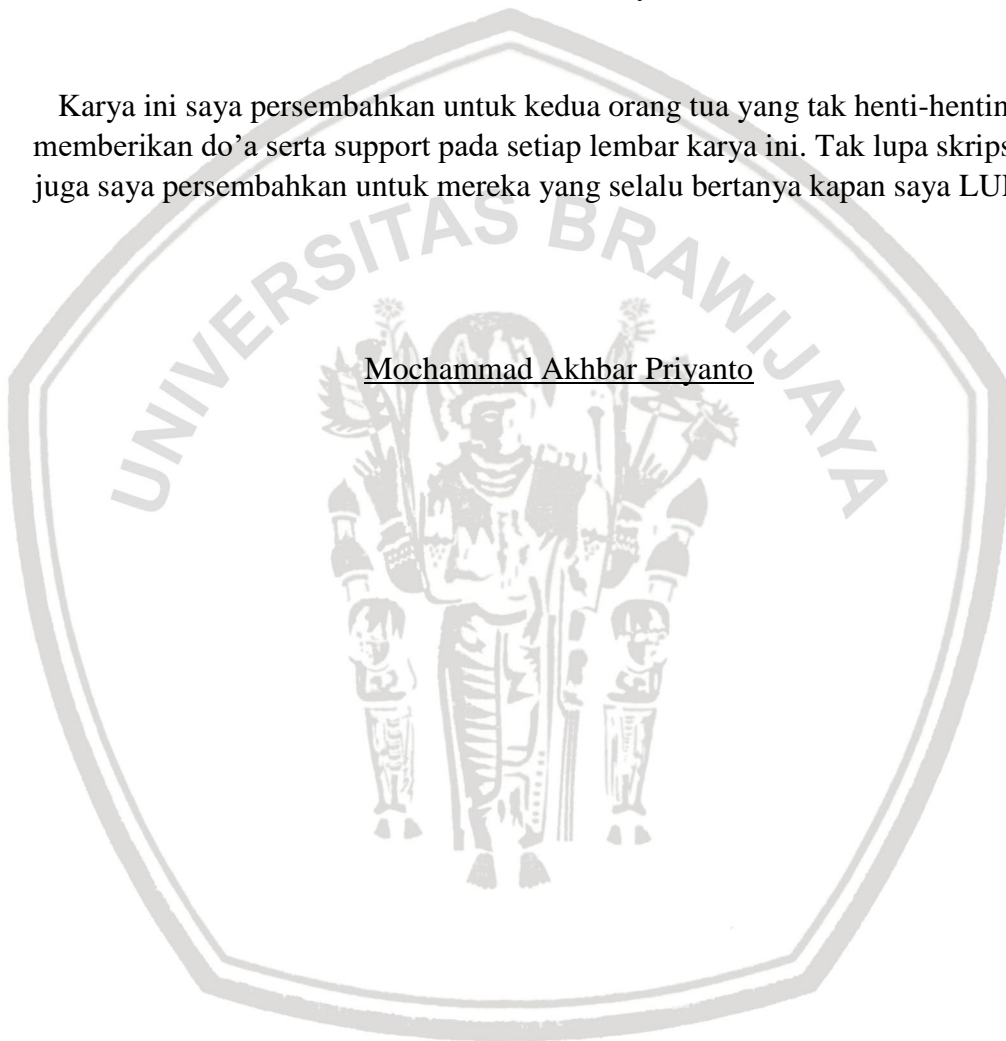
LEMBAR PERSEMBAHAN

“Menjadi seperti SAJADAH yang ikhlas menjadi alas tempat bersedih dan resah,
bahagia menjadi perantara antara tangis di sela sujudmu kepada Tuhannya.”

-Mochammad Akhbar Priyanto,2018-

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang tak henti-hentinya
memberikan do'a serta support pada setiap lembar karya ini. Tak lupa skripsi ini
juga saya persembahkan untuk mereka yang selalu bertanya kapan saya LULUS

Mochammad Akhbar Priyanto



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembangunan Desa Ekowisata Berbasis Potensi Alam Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang”. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian peneliti telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang tidak selalu memberikan kemudahan, rahmat, kekuatan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat melalui proses pengerjaan skripsi sampai dengan laporan selesai.
2. Kepada Ayah penulis Bapak Djumanto dan Ibu penulis Ibu Elia Choiri Suprihati, terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah mendidik dan membesarkan saya sehingga menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini saya bisa membanggakan kalian.
3. Mbah Uti Liesfin’nuah, Emak Riamah, dan Alm. Mbah Sai’in yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai lulus kuliah, terimakasih telah membantu dengan berkat doa serta baik secara materiil.
4. Adik penulis, Adelia Dwi Puspitasari yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dimudahkan perkuliahannya di Politeknik Negeri Malang.

5. Sahabat saya semasa perkuliahan, baik keadaan susah ataupun senang yang selalu menemani penulis dalam menjalani hari-hari selama masa kuliah yakni ada Hanandhito Wibhisono (Diet Mulai Besok-Lamongan), Indira Putri Pramesti (Lambe Gurah-Tumpang), Fitri Agustina (Tria-Berau), Halimah (Imeh-Lampung).
6. Sahabat *Konco Dewe* yang banyak memberi banyak pengalaman seru, Aulia Rosyida Zahrah (Aul-Banyuwangi), Adam Jamal (Adam-Condét), Idris Saputro (Idris-JKT), Taufiq Choir (Topik-Nggalek), Baladhika Puji Lestari (Dika-Lawang), M. Faishal Arief (Koko-Kuningan), Yousi Novita Sari (Ucik-Mergan), dan Puspa Indah Pratiwi (Mak Pus-Kebon Junti). Terimakasih atas waktu, canda tawa dan kenangan bersama kalian. Semoga sukses ya sahabat.
7. Sahabatku semasa SMA, kawan Mboty terjulid, *No Baper-baperan*, yakni Agatha Ria Indri Puspita, Irene Aisyah, Mechtildis Nosy Angel Velista, dan Aqil Imanullah Rosyadi. Salam sayang untuk kalian semua.
8. Kawan baikku yang selalu menghibur dan membuat hari ku berwarna dengan sesuatu yang baru Aulia Lala Romadhona (Olla), Fahdi Kusuma Putra (Fahdi), Widiando, Bala. Terimakasih sekali lagi.
9. Ibu Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si dan Ibu Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing skripsi saya. Beliau adalah dosen yang paling saya segani dan sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada ibu yang sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih.

10. Bapak Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, S.IP.,M.Si dan Bapak Laode Machdani Afala, S.IP.,M.A selaku majelis penguji skripsi saya. Terimakasih atas saran, masukan dan pertanyaan yang membangun dan membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
11. Bapak Rachmad Gustomi S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing akademik saya semasa perkuliahan. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi bapak selama saya kuliah.
12. Kepala Program Studi dan Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat berarti bagi saya, selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
13. Teman-teman dekat saya, I Dewa Made Werdi (Bli-Bali), Lilik Agustina (Luiluik-Green View), Devi Astari (Devi-Magetan), Intan Etika (Intan-Kesamben), Ahmad Maulana Aljabar (Ahmad-Karlos), Muji Rizki (Muji-Jakut), Erina Hastuti (Erin-Mojokerto), Annisa Izzatul ulya (Shanisa-Kerto), Avis Reza P (Avis-Situbondo), Chikita Yuniar (Chikita-Darjo), Afif Faizta (Apip-Panjen), Irfan Fajri (Sarpan-LA Mania), Umami Habibah, Maya Novita Sari, Wulan Six Maria, Pradhana Citta, Rosaraga Ajilisan, Nur Aini, Siska Uswatun H, Wildania Anggraini, Firhan, Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan kalian.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan, Ignadia Pradipta, Nur Kholida, Dalilah, Revienda, Ais, Azhar Zahira, Aisyah Andiani, Angesti Widya, Felida, Hotma, Yeni, Pepi, Fikri, Ghassan, Lilis, Nita Viorantina, Prila, Reka, Richa, Tika, Astrid Indah, Carol, Eva

Nurfitria, Farhansyah, Irma Kurnia, Delly Elsavina, Laras Saraswati, Vivi Olinda.

15. Kawan Harahuruseru, sahabat waktu SD, Mevi Maria U, Masfufah Putri S, Andika Fibi C, Novanda bayu, Tarbon, Gita, terimakasih yang telah memberi support dan dukungannya.

16. Kepada Informan saya selama melakukan penelitian, terimakasih sudah mau memberikan informasi yang menunjang skripsi saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada perkembangan keilmuan terkait lingkup kajian Pembangunan Desa.

Malang, 17 Oktober 2018

Mochammad Akhbar Priyanto

ABSTRAK

Mocahmmad Akhbar Priyanto, 2018: Pembangunan Desa Ekowisata Berbasis Potensi Alam Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si dan Ruth Agnesia Sembiring S.Sos., M.A

Penelitian ini berfokus pada pembangunan desa melalui potensi alam yaitu desa ekowisata yakni meliputi potensi wisata alam berupa embung Andeman dan hutan bambu Boon Pring. Penelitian dilakukan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan konsep prisma pembangunan berkelanjutan (*prism sustainability development*) yang digagas oleh Joachim H Spangenberg. Peneliti menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) proses pembangunan di Desa Sanankerto belum memenuhi dimensi dari prisma pembangunan berkelanjutan (*prism sustainability development*). Dalam dimensi lingkungan sudah melakukan upaya konservasi bambu dan sudah berkurangnya penebangan liar hutan bambu. Dimensi ekonomi belum berjalan dengan baik karena tidak menerapkan prinsip keefisiensi dan luntarnya adat brubuh. Dimensi sosial sudah berjalan dengan baik, tetapi aspek keadilan sosial masih belum merata. Dimensi kelembagaan BUMDes masih belum menerapkan prinsip partisipatif, tetapi aspek akuntabilitas dan transparansi sudah terlaksana dengan baik, (2) faktor pendukung dari proses pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto adalah promosi dan masuk dalam agenda wisata tahunan Kabupaten Malang, bantuan pemerintah pusat dan daerah, bantuan modal kepada BUMDes, dan bantuan keuangan terhadap konservasi hutan bambu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah konflik kepemilikan tanah hutan bambu dengan Perhutani, bantuan CSR sulit masuk, masih terjadi penebangan bambu secara liar, rangkap jabatan struktural BUMDes dengan BPD, ketidakpahaman sekretaris desa terhadap manajemen BUMDes, dan sarana prasarana yang masih kurang memadai.

Kata kunci: *Pembangunan Desa, Ekowisata, Pembangunan Berkelanjutan*

ABSTRACT

Mocahmmad Akhbar Priyanto, 2018: Village Development of Ecotourism Based on Natural Potential of Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency. Thesis Study Program in Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University

Supervisor: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si and Ruth Agnesia Sembiring S.Sos., M.A

This research focuses on village development through natural potential namely Village ecotourism includes natural tourism potential in the form of Andaman reservoir and Boon Pring bamboo forest. The study was conducted in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency and used a type of descriptive-qualitative research. In this study used is the concept of the prism of sustainable development (prism sustainability development) initiated by Joachim H Spangenberg. Researchers used three methods to collect data, namely: interviews, observation, and documentation. The results of this study are (1) the development process in Sanankerto Village does not fulfill the dimensions of the prism of sustainable development. In the environmental dimension efforts , bamboo conservation have been reduced illegal logging of bamboo forests. The economic dimension has not gone well because it does not apply the principle of eco-efficiency and the fading of the custom of Brubuh. The social dimension has gone well, but the aspect of social justice is still not evenly distributed. Institutional dimensions of BUMDes still have not applied participatory principles, but aspects of accountability and transparency have been well implemented, (2) the supporting factors of the ecotourism development process in Sanankerto Village are promotion and included in the annual tourism agenda of Malang Regency, central and regional government assistance, capital assistance to BUMDes, and financial assistance for bamboo forest conservation, while the inhibiting factors are conflicts over ownership of bamboo forest land with Perhutani, CSR assistance is difficult to enter, there is still illegal logging, double structural positions of BUMDes with BPD, village secretary's understanding of BUMDes management, and Inadequate infrastructure facilities.

Keywords: Village Development, Ecotourism, Sustainable Development

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Studi Terdahulu	19
2.2 Kerangka Konseptual.....	27
2.2.1 Teori Prisma Keberlanjutan atau <i>Prism of Sustainability</i>	27
2.2.2 Konsep Pengembangan Desa Wisata	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
3.2 Penetapan Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM	49

4.1 Kondisi Geografis	49
4.2 Sejarah atau Asal Usul Desa Sanankerto	52
4.3 Data Demografi	52
4.3.1 Mata Pencaharian Penduduk	52
4.4 Potensi Alam Ekowisata Boon Pring Andeman	54
4.4.1 Potensi Alam	55
4.4.2 Potensi Budaya	59
4.5 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo	61
4.6 Profil Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Boon Pring	63
BAB V PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA DESA SANANKERTO ...	66
5.1 Dimensi Lingkungan	66
5.1.1 Penyelamatan dan Perlindungan Ekosistem (<i>Protect Eco-systems</i>)	67
5.1.2 Kerjasama Penyelamatan Lingkungan (<i>Network to Protect Eco-systems</i>)	79
5.2 Dimensi Ekonomi	84
5.2.1 Efisiensi Kapital Sumber Daya Alam (<i>Capital Efficiency</i>)	85
5.2.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	92
5.3 Dimensi Sosial	98
5.3.1 Pemerataan dan Keadilan Sosial (<i>Equity</i>)	99
5.3.2 Partisipasi Masyarakat (<i>Participation</i>)	101
5.4 Dimensi Kelembagaan	107
5.4.1 Tata Kelola Kelembagaan (<i>Manage</i>)	108

5.4.2 Regulasi atau Aturan (<i>Regulation</i>).....	112
5.4.3 Aktor.....	114
5.4.4 Kerjasama.....	121
5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat	122
5.5.1 Faktor Pendukung	122
a. Promosi dan Masuk Kalender Agenda Wisata Tahunan	122
b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	124
c. Bantuan Modal Kepada BUMDes	125
d. Bantuan Keuangan Terhadap Konservasi Hutan Bambu ...	126
5.5.2 Faktor Penghambat.....	127
a. Konflik Kepemilikan Tanah Hutan Bambu dengan Perhutani	127
b. Bantuan CSR Sulit Masuk.....	132
c. Masih Tedapat Penebangan Bambu Secara Liar.....	133
d. Rangkap Jabatan Struktural BUMDes dan BPD	133
e. Ketidakhahaman Khususnya Sekretaris Desa terhadap Manajemen BUMDes.....	135
f. Sarana dan Prasarana Masih Kurang Memadai.....	136
BAB VI PENUTUP	137
6.1 Kesimpulan	137
6.2 Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Desa Wisata <i>Pilot Project</i> di Indonesia Tahun 2017	3
Tabel 1.2 Data Desa Wisata di Kabupaten Malang	6
Tabel 1.3 Potensi Wisata di Desa Sanankerto.....	7
Tabel 1.4 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017.....	10
Tabel 1.5 Data Jumlah Kerusakan Hutan Bambu Boon Pring Tahun 2017	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.2 Indikator <i>Prism Sustainability</i> menurut Spangenberg	32
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	42
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sanankerto	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sanankerto dan Jumlah Kepala Keluarga.....	52
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan.....	53
Tabel 4.4 Harga Tiket Masuk Potensi Ekowisata Boon Pring Andeman	58
Tabel 5.1 Perbedaan Waker dan Kelompok Tani Bambu Boon Pring	75
Tabel 5.2 Susunan Pengurus Kelompok Tani Bambu Boon Pring.....	78
Tabel 5.3 Bantuan BPDAS Brantas Sumber Dana APBN Tahun 2015	82
Tabel 5.4 Penyediaan Bibit dan Lokasi Percontohan Penyuluhan Kehutanan Pengkayaan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan Tahun 2017.....	83
Tabel 5.5 Lapangan Pekerjaan Pembangunan Ekowisata Desa Sanankerto.....	92
Tabel 5.6 Harga Jual Kerajinan Bambu	94
Tabel 5.7 Data Penghasilan Pengerajin Bambu Desa Sanankerto	96
Tabel 5.8 Data Jumlah <i>homestay</i> di Desa Sanankerto	97
Tabel 5.9 Pembagian SHU Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Proporsi.....	113
Tabel 5.10 Aktor dan Peran dalam Pembangunan Desa Ekowisata	114
Tabel 5.11 Pendapatan Asli Desa Sanankerto Tahun 2017 dan 2018.....	115
Tabel 5.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017 dan 2018.....	116
Tabel 5.13 Penyertaan Modal BUMDes	118
Tabel 5.14 Bantuan Fisik dan Non-fisik terkait Pembangunan Ekowisata.....	125

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur pikir penelitian.....	36
Bagan 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman	46
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prisma Keberlanjutan (<i>Prism Of Sustainability</i>).....	31
Gambar 4.1 Peta Desa Sanankerto	50
Gambar 4.2 Lokasi Menuju Ekowisata Boon Pring Andeman	51
Gambar 4.3 Hutan Bambu Boon Pring	55
Gambar 4.4 Embung Andeman di Kawasan Ekowisata Boon Pring	57
Gambar 4.5 Kalender <i>Event</i> Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 2018.....	60
Gambar 4.6 Logo BUMDes Kerto Raharjo	62
Gambar 5.1 Penanaman Bibit Bambu oleh Kelompok Tani Boon Pring	77
Gambar 5.2 BPDAS Brantas Pemberian Bibit saat <i>Launching</i> Desa Ekowisata	81
Gambar 5.3 Peta Rencana Zonasi Ekowisata Boon Pring Andeman.....	90
Gambar 5.4 Gubug Ruang Pamer Kerajinan Bambu Dusun Kampung Anyar...	95
Gambar 5.5 Acara Grebeg Sesucen 1001 Tumpeng	104
Gambar 5.6 Aplikasi <i>Smart Village</i> Pariwisata Kabupaten Malang.....	124
Gambar 5.7 Peta Perhutani BKPH Dampit Malang Bambang Selatan.....	130

DAFTAR ISTILAH

AD/ART	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi.
Aplikasi <i>Smart Village</i> Kabupaten Malang	:	Aplikasi android yang berisi informasi potensi desa wisata yang terdapat di Kabupaten Malang melalui smartphone yang terkoneksi dengan internet.
Arboretum	:	Tempat yang mengoleksi tumbuhan dan diberi keterangan nama dan beberapa informasi lainnya dan bertujuan untuk penelitian atau pendidikan.
BKPH	:	Bagian Kesatuan Pemangku Hutan merupakan unit kerja dibawah KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang bertugas mengelola perencanaan, pemeliharaan, hingga produksi hasil hutan.
BPDAS Brantas	:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.
BPDASHL Sampean	Brantas :	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Sampean
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas pada bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Brubuh	:	Sistem penebangan kayu atau bambu secara tradisional yang berdasarkan pada perhitungan sistem kalender pertanian Jawa.
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa baik melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa dan di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
<i>City Branding</i>	:	Upaya membangun identitas sebuah kota.
Desa Wisata	:	Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat

	yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku
Distanbun	: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPPKA	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dukuh	: Dusun atau kampung kecil; bagian dari desa
Embung	: Tendon air atau waduk berukuran mikro atau kecil yang bertujuan untuk menampung air dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan baik di bidang pertanian maupun kepentingan masyarakat
Ha	: Hektar
Hippam	: Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum merupakan wadah atau lembaga sah menurut perundangan dan peraturan pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem penyediaan air bersih demi kepentingan masyarakat.
Kamituwo	: Jabatan atau gelar bagi seorang kepala dukuh atau kampung pada sistem pemerintahan tingkat desa, terutama pada daerah yang masih berlaku pada sistem tingkatan jabatan dalam tradisi Jawa. Secara nasional, Kamituwo juga disebut dengan Kepala Dusun atau Kadus.
Kementerian LHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
KPHR	: Kelompok Petani Hutan Rakyat
KTH	: Kelompok Tani Hutan
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban merupakan dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi.
Magersari	: Orang yang rumahnya menumpang di pekarangan orang lain; orang yang tinggal di tanah milik negara dan sekaligus mengerjakan tanah itu; pembantu orang yang bertransmigrasi
Musdes	: Musyawarah desa

MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian.
PADes	: Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Perdes	: Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Perum Perhutani	: Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya.
PKS	: Perjanjian Kerjasama
<i>Pilot Project</i>	: Pelaksanaan kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program serta mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya.
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.
Poktan Bambu	: Kelompok Tani Bambu
Polhut	: Polisi Hutan
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SK	: Surat Keputusan
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

UMKM : Usaha Masyarakat Kecil Menengah

Waker : Seorang penjaga hutan bambu yang dibayar oleh pemerintah desa melalui tanah kas desa.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹ Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa potensi ekonomi lokal desa merupakan salah satu syarat terdapat adanya pembangunan desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²

Pembangunan merupakan hal yang penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Pembangunan desa wajib dilaksanakan serta harus memperhatikan potensi unggulan yang dimiliki oleh desa agar dapat memiliki daya tarik serta memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa lainnya. Pada dasarnya tiap-tiap desa memiliki karakteristik yang khas, baik

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pasal 18

² *Ibid.* Pasal 78 Poin 1

dari sisi ekonomi, sosial, adat-istiadat, budaya, serta letak geografis yang berbeda sehingga diperlukan pengembangan strategis skala desa. Potensi yang dimiliki masing-masing desa harus dikembangkan dan dioptimalkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau PADes yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu bentuk pembangunan desa yang berorientasi pada potensi lokal yang dimiliki oleh desa di Indonesia adalah desa wisata. Desa memiliki wewenang mengelola desanya menjadi desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Pengertian desa wisata sendiri menurut salah satu referensi adalah sebagai berikut:

“Desa wisata adalah salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Selain itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata yang bernilai budaya tanpa merusaknya.”³

Pembangunan desa wisata juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat menjadi pemasukan tambahan bagi desa dan dapat dikelola kembali oleh pemerintah desa dalam program pembinaan atau pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa wisata di Indonesia merupakan program kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.⁴ Tujuan dari kerjasama

³ Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali*. Jurnal Kawisata. Vol.3, No.2. Agustus 2013. Hlm 131

⁴ Perjanjian Kerjasama Antara Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Nomor: PK.87/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017 dengan Direktorat Jendral

tersebut yaitu untuk mengembangkan desa wisata melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau pun mancanegara dalam upaya menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah ditetapkan prioritas pengembangan 30 desa wisata atau *pilot project* desa wisata di Indonesia tahun 2017 yaitu antara lain:

Tabel 1.1

Pengembangan Desa Wisata *Pilot Project* di Indonesia Tahun 2017

No.	Nama Desa	Lokasi
1.	Desa Wisata Kreatif Terong	Sijuk, Belitung
2.	Desa Agrowisata Pujon Kidul	Malang, Jawa Timur
3.	Desa Wisata Boon Pring Andeman	Malang, Jawa Timur
4.	Desa Wisata Pentingsari	Sleman, Yogyakarta
5.	Desa Wisata Ngalenggeran	Gunungkidul, Yogyakarta
6.	Desa Wisata Wae Rebo	Nusa Tenggara Timur
7.	Desa Adat Sade	Lombok
8.	Desa Panglipuran	Bali
9.	Desa Wisata Pandansari	Batang, Jawa Tengah
10.	Desa Wisata Kete Kesu	Toraja
11.	Desa Wisata Dieng Kulon	Banjarnegara, Jawa Tengah
12.	Desa Adat Nagari Sungai Nyalo	Pesisir Selatan, Sumatera Barat
13.	Desa Adat Madobak	Kep. Mentawai, Sumatera Barat
14.	Desa Wisata Tamansari	Banyuwangi, Jawa Timur
15.	Desa Wisata Seigentung	Gunung Kidul, Yogyakarta
16.	Desa Wisata Ubud	Gianyar, Bali
17.	Desa Wisata Ponggok	Klaten, Jawa Tengah
18.	Desa Wisata Waturaka	Ende, Nusa Tenggara Timur
19.	Desa Wisata Teluk Meranti Pelalawan	Riau
20.	Desa Wisata Maritim Bontagula	Bontang, Kalimantan Timur
21.	Desa Wisata Kasongan	Bantul, Yogyakarta
22.	Desa Karimunjawa	Jepara, Jawa Tengah
23.	Desa Wisata Kampung Bena	Ngada, Nusa Tenggara Timur
24.	Desa Wisata Tenganan	Karangasem, Bali

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 009/DPPMD/PKS/IV/2017

⁵ *Ibid.* Pasal 1 Hlm 2

25.	Desa Wisata Ngadas	Poncokusumo, Malang, Jawa Timur
26.	Desa Wisata Wangunharja	Subang, Jawa Barat
27.	Desa Wisata Bejiharjo	Gunungkidul, Yogyakarta
28.	Desa Wisata Tablanusu	Jayapura, Papua
29.	Desa Wisata Cibuntu	Kuningan, Jawa Barat
30.	Desa Wisata Banjarasri	Kulonprogo, Yogyakarta

Sumber: *Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2017*

Perjanjian kerjasama desa wisata di atas yaitu melingkupi antara lain:⁶

- a. Penyusunan kebijakan tentang pengembangan desa wisata
- b. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program pengembangan desa wisata
- c. Koordinasi dengan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan stakeholder kepariwisataan lainnya
- d. Penyiapan kebutuhan data serta informasi tentang BUMDes dan desa wisata
- e. Peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, pendamping desa dan pengurus BUMDes
- f. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa wisata
- g. Promosi dan pemasaran desa wisata
- h. Mendorong pendirian dan pengembangan BUMDes di desa wisata
- i. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata oleh BUMDes.

Di lingkup pemerintah daerah, Kabupaten Malang mempunyai beragam potensi daya tarik wisata dengan jenis wisata yang cukup beragam yakni wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata buatan. Dengan mengusung *city branding* “The Heart of East Java,” Kabupaten Malang terus berupaya menggali potensi dalam hal pariwisata. Kabupaten Malang memiliki beragam potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau pun sumber daya buatan yang dikembangkan serta dimanfaatkan guna mendukung pembangunan pariwisata. Kabupaten Malang memiliki kewenangan dalam mengelola sendiri sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk potensi sumber daya pariwisata. Dalam kebijakan pengembangan

⁶ *Ibid.* Pasal 2.

pariwisata Kabupaten Malang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan yaitu antara lain:⁷

1. Wilayah Pengembangan Pariwisata I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis).
2. Wilayah Pengembangan Pariwisata II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran).
3. Wilayah Pengembangan Pariwisata III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon).
4. Wilayah Pengembangan Pariwisata IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung).
5. Wilayah Pengembangan Pariwisata V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading).
6. Wilayah Pengembangan Pariwisata VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur).

Mulai tahun 2016, Kabupaten Malang sudah mulai mengembangkan potensi wisata alam pedesaan dan mulai mengenalkan desa wisata kepada para wisatawan. Desa wisata di Kabupaten Malang perlu dikembangkan dan dioptimalkan, karena merupakan salah satu misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yaitu dengan mengembangkan kepariwisataan yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pengembangan

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Bagian 2 Hlm 13-15

pariwisata khususnya desa wisata dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, karena desa wisata berbeda dengan objek wisata lainnya.

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Malang tengah menggarap pengembangan desa wisata yang bertujuan guna mengoptimalkan pemerataan ekonomi di daerah pedesaan khususnya. Banyak desa yang memiliki ciri khas serta daya tarik sesuai dengan potensi desa masing-masing sehingga mendukung Kabupaten Malang sebagai daerah destinasi wisata. Kabupaten Malang memiliki 16 destinasi unggulan daerah yang menggunakan sistem *smart village* yaitu antara lain:

Tabel 1.2
Desa Wisata di Kabupaten Malang

No	Desa Wisata
1.	Desa Wisata Pujon Kidul (Pujon)
2.	Desa Wisata Boon Pring Sanankerto (Turen)
3.	Desa Ngadas (Poncokusumo)
4.	Desa (Kasembon)
5.	Desa Gubugklakah
6.	Desa Poncokusumo
7.	Desa Ngadirejo (Jabung)
8.	Desa Wisata Religi Gunung Kawi
9.	Desa Purwodadi Bowele (Bolubolu, Wedi awu, dan Lenggoksono)
10.	Desa Mulyorejo (Ngantang)
11.	Desa Sumberngepoh (Lawang)
12.	Desa Mentaraman (Donomulyo)
13.	Desa Tambakrejo (Sumbermanjing Wetan)
14.	Desa Wonosari (Wonosari)
15.	Desa Bendosari (Pujon)
16.	Desa Jeru (Tumpang)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2016

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang sangat gencar dalam pembangunannya. Salah satu pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang

yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata adalah Desa Sanankerto. Desa Sanankerto termasuk desa wisata yang berbasis ekowisata dan terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Tabel 1.3
Potensi Wisata di Desa Sanankerto

Potensi Alam	Potensi Budaya	Potensi Atraksi	Potensi Ekonomi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Embung Andeman 2. Hutan Wisata Bambu Boon Pring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritual Grebeg 1001 Tumpeng Sesucen 2. Kesenian Bantengan 3. Parade Egrang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area <i>Outbond</i> 2. Wisatatirta (kolam renang) 3. Situs purbakala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerajinan replika kapal pinisi dari bambu 2. Kerajinan Asbak rokok 3. Kerajinan miniatur pohon bambu 4. Anyaman bambu 5. Patung ukiran dari akar bambu

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Potensi alam yang dimiliki oleh Desa Sanankerto yaitu berupa hutan bambu dan embung desa yang terletak di tanah kas Desa Sanankerto. Hutan bambu tersebut bernama Hutan Bambu Boon Pring dan Embung bernama Embung Andeman. Hutan Bambu Boon Pring sudah ada sejak tahun 1910 yakni sejak berdirinya Desa Sanankerto. Hutan Bambu Boon Pring memiliki luas sekitar 36,8 hektar. Guna mendukung secara *legal formal*, Pemerintah Desa Sanankerto juga sudah membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sentra Bambu (Boon Pring) Desa Sanankerto. Keberadaan hutan bambu tersebut sangat penting dan dilindungi keberadaanya karena bertujuan untuk menjaga sumber mata air dan debit air embung. Debit air Embung Andeman ditunjang oleh keberadaan beberapa

sumber mata air yang ada di sekitarnya. Sumber mata air tersebut memiliki siklus penyediaan air yang sangat tergantung pada hutan bambu di sekitarnya.⁸

Embung Andeman dibangun pada tahun 1978 oleh Dinas Pengairan Kabupaten Malang. Embung tersebut digunakan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau yang sangat bermanfaat sebagai sumber irigasi areal persawahan seluas 260 hektar yang mencakup tiga desa yaitu Desa Sanankerto, Desa Sananrejo, dan Desa Pagedangan. Sebagian besar warga di tiga desa tersebut sangat menggantungkan hidup pada kegiatan bercocok tanam dan pengairan lahan pertanian. Oleh sebab itu masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan air di embung. Selain berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi, potensi embung juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi wahana air.

Mulai tahun 2016 dalam pengelolaan Ekowisata Wisata Boon Pring Andeman, dibentuklah suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Kerto Raharjo. BUMDes tersebut dibentuk melalui Peraturan Desa Sanankerto No. 5 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sanankerto. Selain pembentukan BUMDes, guna menunjang kegiatan pengelolaan wisata maka dibentuklah struktur organisasi BUMDes pengelolaan Ekowisata Boon Pring Andeman meliputi: dewan komisaris, badan pengawas, sekretaris, bendahara, dan unit kerja andeman meliputi, tiket, peralatan, parkir, kebersihan, dan keamanan. Keberadaan pengelola BUMDes di Desa Sanankerto secara administratif diakui oleh desa dan termasuk dalam lembaga resmi milik desa.

⁸ Hasil Wawancara dengan Jamaludin selaku Wakil Ketua Poktan Bambu Boon Pring pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.30 WIB

Selain potensi alam, Desa Wisata Sanankerto juga memiliki potensi budaya yaitu Grebeg 1001 Tumpeng Sesucen yang diadakan setahun sekali dan merupakan agenda wisata tahunan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kesenian Bantengan, dan Festival Egrang. Dengan ditetapkannya menjadi desa wisata, potensi ekonomi kreatif masyarakat desa mulai bermunculan dan berkembang dengan pesat. Potensi ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar yaitu pembuatan kerajinan sentra bambu yang terletak di Dusun Kampung Anyar. Pengerajin di Dusun Kampung Anyar membuat produk kerajinan dari limbah bambu hasil dari mayoritas mata pencaharian yaitu membuat tusuk sate, *tompo* atau keranjang bambu untuk mencuci beras, dan lain-lain. Produk-produk yang dimanfaatkan dari limbah bambu dibuat seperti, lampu tidur, asbak, lampu hias, replika kapal, miniatur pohon bambu. Pokdarwis juga memberikan aktivitas pembuatan kerajinan topeng yang berasal dari limbah akar bambu. Wisatawan yang berkunjung dapat melihat dan belajar cara pembuatannya serta dapat langsung membelinya langsung dari pengerajin.

Kabupaten Malang banyak memiliki potensi pengembangan wisata berbasis desa wisata, yang membedakan Desa Sanankerto dengan desa lainnya yakni memiliki potensi pariwisata berupa embung dan hutan bambu yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sanankerto. Begitu juga dengan Pemerintah Desa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemasukkan dari pengelola desa wisata BUMDes yang dibentuk oleh Desa Sanankerto. PADes Desa

Sanankerto yang diperoleh dari pengelolaan Desa Ekowisata Boon Pring Andeman pada tahun 2017 sebesar Rp. 72 juta.⁹

Tabel 1.4
Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Boon Pring Andeman Selama
Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
1.	Januari	3.569
2.	Februari	2.864
3.	Maret	3.389
4.	April	4.065
5.	Mei	4.229
6.	Juni	4.525
7.	Juli	13.932
8.	Agustus	3.942
9.	September	5.329
10.	Oktober	6.303
11.	November	5.212
12.	Desember	18.613
Total		76.042

Sumber: Pemerintah Desa Sanankerto, 2018, Diolah Peneliti

Dari tabel 1.4 dapat diketahui wisatawan yang berkunjung ke Desa Ekowisata Boon Pring Andeman setiap bulannya mengalami kenaikan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada bulan Juli yakni meningkat sebesar 9.407 wisatawan atau 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Hal tersebut lantaran liburan sekolah sehingga terjadi peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Desa Ekowisata Boon Pring. Sedangkan pada bulan Desember animo masyarakat untuk berkunjung juga mengalami kenaikan sebesar 18.613 hal tersebut dikarenakan liburan akhir tahun. Apabila dirata-rata kunjungan wisatawan perbulan selama tahun 2017 yakni sekitar 6 ribuan wisatawan yang berkunjung ke Desa Ekowisata Boon Pring Andeman.

⁹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sanankerto Tahun 2017

Hal yang menarik dari pengembangan desa wisata berbasis ekowisata di Desa Sanankerto yaitu, *pertama*, Desa Sanankerto berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di area sekitar Embung Andeman yaitu dengan konservasi bambu secara berkesinambungan.¹⁰ Upaya pelestarian tersebut bertujuan untuk menjaga sumber mata air dan debit air embung agar warga dan petani sudah tidak khawatir kekuarangan air untuk lahan pertanian dan air bersih. Pemerintah Desa membentuk Kelompok Tani Wana Boon Pring yang terdiri dari gabungan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹ Kelompok Tani Boon Pring merupakan pelaku utama konservasi bambu agar bambu dan sumber mata air embung agar berkelanjutan, dengan rencana kerja konservasi bambu dan pembagian tugas pemeliharaan dan perawatan hutan bambu.

Kedua, wisata hutan bambu Boon Pring ditetapkan menjadi area konservasi bambu atau *arboretum* bambu yang terdiri dari 60 jenis bambu.¹² Bibit bambu kebanyakan berasal dari bantuan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Brantas. Hutan bambu Boon Pring tidak hanya sebagai kawasan wisata, tetapi juga menjadi kawasan untuk edukasi dan penelitian terkait bambu. *Ketiga*, adanya penjaga hutan bambu atau Waker. Sejak tahun 1910 sudah terdapat Waker. Waker merupakan penjaga hutan bambu diangkat oleh desa dan mendapat gaji dari

¹⁰ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017. *Dokumen Pembelajaran Program Inovasi Desa: Konservasi Bambu untuk Menjaga Sumber Mata Air dan Debit Air Embung dalam Mendukung Pertanian dan Ekowisata*. Jakarta: Tim Program Inovasi Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hlm 27-28

¹¹ Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani (Poktan) “Wana Boon Pring”

¹² Profil BUMDes Kerto Raharjo Ekowisata Boon Pring Andeman Desa Sanankerto, varietas bambu, Hlm 3-4

bengkok dari Desa Sanankerto. Artinya pada tahun 1910 masyarakat nenek moyang sudah melakukan upaya penyelamatan konservasi lingkungan hutan bambu.

Ketiga, Adat Brubuh, masyarakat Desa Sanankerto memiliki kearifan lokal yang sangat relevan guna menjaga hutan bambu secara berkelanjutan. Salah satu diantaranya yaitu menggunakan adat *Brubuh*. *Brubuh* merupakan sistem penebangan kayu secara tradisional yaitu menggunakan perhitungan kalender pertanian Jawa yaitu dengan istilah *Pranata Mangsa*. *Brubuh* menerapkan konsep penebangan kayu yang tidak dilakukan secara sembarangan waktu, tetapi dilakukan pada musim-musim tertentu. Dalam *Pranata Mangsa* terdiri dari 12 musim. Dalam konsep *brubuh*, penebangan kayu dilakukan pada musim ke 9, 10, 11. Biasanya dilakukan pada bulan Maret- pertengahan bulan Mei.¹³

Saat ini beberapa kendala sering ditemui yakni seiring perkembangan dalam pengelolaan potensi alam desa wisata. Diantaranya yakni, *Pertama* Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Di Desa Sanankerto masih terdapat laporan yaitu terjadinya penebangan bambu liar sehingga dikhawatirkan mengancam keberadaan sumber mata air dan debit air embung, serta berdampak pada pertanian. Selain mengancam penurunan debit air, penebangan bambu liar juga dapat mengancam keberadaan hutan bambu sebagai penyangga pelestarian sumber air. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat terkait konservasi lingkungan terhadap hutan bambu masih rendah.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Kliman selaku Penjaga Hutan Bambu (Waker), pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 12.30 WIB

¹⁴ *Ibid.*

Tabel 1.5
Kerusakan Hutan Bambu Boon Pring Tahun 2017

No	Permasalahan	Kasus
1.	Pencurian tunas bambu muda (rebung)	60
2.	Penebangan bambu secara liar	55
3.	Perburuan satwa liar (tupai)	14
4.	Pengambilan daun mahoni	9

Sumber: Bapak Kliman Penjaga Hutan Bambu Boon Pring (waker), Diolah peneliti, 2018

Menurut penuturan Bapak Kliman yang bertugas sebagai Waker atau penjaga hutan bambu Boon Pring, kasus yang paling banyak pada tahun 2017 yaitu pencurian tunas bambu atau rebung yakni sebanyak 60 kasus. Menurut Bapak Kliman, masyarakat biasanya mengambil rebung untuk dijadikan masakan atau pun dijual ke pasar. Selain pencurian rebung atau tunas bambu, kasus terbanyak kedua yaitu penebangan bambu secara liar atau tanpa izin. Banyak masyarakat sekitar memanfaatkan bambu untuk dijadikan tusuk sate atau pun sebagai kerajinan anyaman bambu dikarenakan dapat mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, keterbatasan waker untuk menjaga hutan bambu yaitu hanya berjumlah 1 orang, sehingga tidak efektif dalam menjaga hutan bambu seluas 36,8 hektar.

Kedua, lemahnya dalam penguatan lembaga pengelola desa wisata yakni BUMDes Kerto Raharjo. Dari susunan kepengurusan adanya perangkapan jabatan BUMDes sebagai bendahara BUMDes dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, juga terjadi tarik ulur dalam hal besaran persentase AD/ART BUMDes terkait penyeteran terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).¹⁵ *Ketiga*, sengketa tanah Desa Sanankerto dengan Perhutani. Pihak Perhutani mengklaim

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sugiono selaku Sekretaris Desa Sanankerto, pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.05 WIB

tanah di wilayah hutan bambu masih merupakan milik Perhutani. Tetapi pihak Pemerintah Desa Sanankerto telah mengkalim bahwa tanah wilayah hutan bambu merupakan tanah kas desa yang dikelola mulai tahun 1910. Namun pihak Perhutani mengeluarkan undang-undang bahwa tanah peninggalan penjajahan Belanda maupun Jepang dikuasai oleh negara melalui Perhutani. Tanah di wilayah hutan bambu saat ini masih belum bersifat sertifikat. Pemerintah Desa Sanankerto sudah melakukan langkah sertifikasi tanah tapi masih dibebani oleh Perhutani.

Keempat, karena masih berstatus tanah sengketa dan Pemerintah Desa belum memiliki sertifikat hak milik, maka bantuan CSR ataupun kerjasama pengembangan wisata dengan pihak swasta belum dapat terealisasi.¹⁶ *Kelima*, fasilitas sarana dan prasarana khususnya tempat sampah masih kurang memadai dan belum tersebar secara merata, sehingga masih banyak ditemukan sampah pengunjung yang berserakan serta masuk kedalam areal embung. Selain itu juga masih kumuhnya atau tidak tertatanya para pedagang kaki lima di areal ekowisata sehingga terlihat semrawut dan kotor.

Melalui usaha pembangunan desa berbasis potensi alam sangat dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Desa sebagai aktor utama yang berwenang memutuskan segala kebijakan dengan masyarakat desa sebagai penyumbang apirasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depan. Melalui potensi yang dimiliki oleh Desa Sanankerto dalam sektor pengelolaan wisata akan sangat membantu pengembangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa terus mendorong guna mencapai tujuan tersebut yakni

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Samsul Arifin selaku Ketua BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 13.05 WIB

dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan desa. Di samping sebagai potensi alam, kesadaran masyarakat dalam upaya pembangunan desa perlu ditumbuhkan agar hasil dan pencapaian dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pada ilustrasi diatas, peneliti mengangkat tema yaitu pembangunan desa melalui potensi alam. Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“Pembangunan Desa Ekowisata Berbasis Potensi Alam Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan desa ekowisata berbasis potensi alam di Desa Sanankerto?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pembangunan desa ekowisata berbasis potensi alam di Desa Sanankerto
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi baru terkait pembangunan desa yang berkaitan dengan model desa wisata berbasis potensi alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini menjelaskan tiga hal penting, *Pertama*, studi terdahulu, bagian ini meliputi acuan refrensi bagi peneliti untuk melakukan penelitain serta menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. *Kedua*, menerangkan teori Prisma Keberlanjutan oleh Spangenberg dan konsep pengembangan desa wisata yang digunakan dalam melakukan proses analisis dalam penelitian. *Ketiga*, menerangkan alur pikir dari penelitian ini.

2.1 Studi Terdahulu

Peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan fokus penelitian yaitu pembangunan desa mandiri energi berbasis biogas. Hasil penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan atau referensi peneliti dalam melakukan penelitian serta mencari perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengklasifikasikan berdasarkan judul penelitian, metode penelitian dan pembeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, serta menjelaskan secara singkat mengenai penelitian terdahulu. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti dalam penelitian tersebut:

Pertama, hasil penelitian dari Dimas Kurnia Purmada, Wilopo, Luchman Hakim dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif *Community Based Tourism* (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang).”¹⁷ Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan *community based tourism* dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu *citizen control*.

Kedua, hasil penelitian dari Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, Alfiyatur Rahmawati tahun 2017 dengan judul “Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.”¹⁸ Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif. Fokus penelitian tersebut menjelaskan proses pembangunan di Desa Bumiaji telah memenuhi aspek-aspek dari pembangunan berkelanjutan, namun dalam prosesnya masih belum bisa berjalan maksimal. Pembangunan desa berbasis potensi lokal agrowisata perlu terus dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan SDM, promosi dan peningkatan sarana dan prasarana.

Ketiga, hasil penelitian dari Mohamad Nur Singgih dan Nirwana yang berjudul “Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Model *Participatory Rural Appraisal* (Studi Perencanaan Desa Wisata

¹⁷ Dimas Kurnia Purmada, Wilopo, Luchman Hakim. 2016. *Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

¹⁸ Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, Alfiyatur Rahmawati. 2017. *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur*. Semarang: Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review.

Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu).”¹⁹ Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu memiliki potensi pengembangan desa wisata yang berbasis wisata alam dan budaya. Untuk wisata alam didukung beberapa objek wisata terdiri wisata air terjun, *rafting*, *tubing*, *mountain bike*, petik mawar, petik apel, dan petik sayur. Hasil pemetaan fasilitas menunjukkan terdapat *home stay*, restoran, usaha makanan untuk oleh-oleh wisatawan mendukung pengembangan desa wisata. Hasil kajian kelembagaan desa, sumber daya manusia di lembaga desa sangat potensial dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata. Hasil kajian dampak sosial ekonomi menunjukkan dampak sosial yang negatif yang perlu diantisipasi, sedangkan dampak ekonomi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Keempat, hasil penelitian dari Tatag Muttaqin yang berjudul “Kajian Pengembangan Dusun Konservasi dan Wisata di Wana Wisata Coban Rondo Kabupaten Malang.”²⁰ Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan Coban Rondo belum mengerti arti dan manfaat konservasi secara umum, akan tetapi mereka sudah melakukan kegiatan konservasi dengan melaksanakan kegiatan agroforestry. Kegiatan *agroforestry* ini mereka lakukan sudah sejak lama dibarengi dengan penghijauan hutan kembali secara tidak

¹⁹ Mohamad Nur Singgih dan Nirwana. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Model Partisipatory Rural Appraisal (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)*. Malang: Universitas Merdeka Malang.

²⁰ Tatag Muttaqin. 2013. *Kajian Pengembangan Dusun Konservasi Dan Wisata di Wana Wisata Coban Rondo Kabupaten Malang*. Malang: Fakultas Pertanian dan Peternakan, Jurusan Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Malang.

langsung. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam penghijauan hutan. Kerjasama dengan Perhutani sangat menguntungkan untuk keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Sebagai bagian dari kawasan wisata dengan prospek pengembangan yang sangat besar, masyarakat dapat mendapatkan manfaat ganda dari pengelolaan lahan dengan sistem konservasi dengan bersinergi kawasan wisata sehingga kedepan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor wisata alam.

Kelima, hasil penelitian dari Anggraini Dwi Jayanti yang berjudul “Pengelolaan Kampung Wisata dalam Prespektif *Community Based Tourism* di Kampung Jodipan Kota Malang.”²¹ Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif. Fokus penelitian tersebut meenggunakan lima dimensi *community based tourism* oleh Suansri yakni; dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

Keenam, hasil penelitian dari Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsin, Hayat dengan judul “Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal.”²² Jenis penelitian tersebut menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KWE Puspa Jagad dalam pengembangan ekowisata sudah menerapkan prinsip *Community Based Tourism* (CBT) yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengelola KWE Puspa Jagad, peran pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam

²¹ Anggraini Dwi Jayanti. 2017. *Pengelolaan Kampung Wisata dalam Prespektif Community Based Tourism di Kampung Jodipan Kota Malang*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

²² Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsin, Hayat. 2017. *Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Malang: Universitas Islam Malang.

pengembangan KWE Puspa Jagad menjadikan KWE Puspa Jagad semakin maju dan berkembang. Kemudian faktor pendorong dan penghambat yang dimiliki KWE Puspa Jagad dalam merumuskan strategi terbaik dalam pengembangan wisata.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun, Jenis Penelitian	Deskripsi Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif <i>Community Based Tourism</i> (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Dimas Kurnia Purmada, Wilopo, Luchman Hakim, 2016, Deskripsi Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan <i>community based tourism</i> dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu <i>citizen control</i> .	Peneliti menggunakan teori partisipasi oleh Arnstein, yaitu: 1. Manipulasi (<i>Manipulation</i>) 2. Terapi (<i>Therapy</i>) 3. Informasi (<i>Information</i>) 4. Konsultasi (<i>Consultation</i>) 5. Penenteraman (<i>Placation</i>) 6. Kemitraan (<i>Partnership</i>) 7. Pelimpahan kekuasaan (<i>Delegated Power</i>) Selain itu peneliti menggunakan prinsip <i>Community Based Tourism</i> yaitu: 1. Prinsip keikutsertaan anggota komunitas kedalam setiap kegiatan pariwisata. 2. Prinsip menjaga lingkungan hidup. 3. Prinsip kelestarian budaya. 4. Prinsip pemerataan pendapatan.

2.	Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, Alfiyatur Rahmawati, 2017, Deskripsi Kualitatif	Proses pembangunan di Desa Bumiaji telah memenuhi aspek-aspek dari pembangunan berkelanjutan, namun dalam prosesnya masih belum bisa berjalan maksimal. Pembangunan desa berbasis potensi lokal agrowisata perlu terus dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan SDM, promosi dan peningkatan sarana dan prasarana.	Peneliti sebelumnya menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan oleh Van Stoker dan Pengembangan Agrowisata antara lain: 1. Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Promosi 3. Sumber daya alam dan lingkungan. 4. Dukungan sarana dan prasarana. 5. Kelembagaan.
3.	Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Model <i>Participatory Rural Appraisal</i> (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) Mohamad Nur Singgih dan Nirwana, 2016 Deskripsi Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu memiliki potensi pengembangan desa wisata yang berbasis wisata alam dan budaya. 1. Untuk wisata alam didukung beberapa objek wisata terdiri wisata air terjun, <i>rafting</i> , <i>tubing</i> , <i>mountain bike</i> , petik mawar, petik apel, dan petik sayur. 2. Hasil pemetaan atraksi terdiri dari wisata air terjun, <i>rafting</i> , <i>tubing</i> , <i>mountain bike</i> , petik mawar, petik apel, dan petik sayur, dan budaya. 3. Hasil pemetaan fasilitas menunjukkan terdapat home stay, restaurant, usaha makanan untuk oleh-oleh wisatawan mendukung pengembangan desa wisata. 4. Hasil kajian kelembagaan desa, sumber daya manusia di lembaga desa sangat	Peneliti sebelumnya menggunakan model <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) merupakan salah satu model yang tepat untuk studi perencanaan dan pengembangan desa Gunungsari sebagai desa wisata berbasis masyarakat. 1. Kajian Sejarah Desa 2. Kajian Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa 3. Kajian Kelembagaan 4. Kajian Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata Desa 5. Kajian dampak sosial dan ekonomi pariwisata

		<p>potensial dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata</p> <p>5. Hasil kajian dampak sosial ekonomi menunjukkan dampak sosial yang negatif yang perlu diantisipasi, sedangkan dampak ekonomi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.</p>	
4.	<p>Kajian Pengembangan Dusun Konservasi Dan Wisata di Wana Wisata Coban Rondo Kabupaten Malang</p> <p>Tatag Muttaqin, 2013, Deskripsi Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan Coban Rondo belum mengerti arti dan manfaat konservasi secara umum, akan tetapi mereka sudah melakukan kegiatan konservasi dengan melaksanakan kegiatan <i>agrogorestry</i>. Kegiatan <i>agroforestry</i> ini mereka lakukan sudah sejak lama dibarengi dengan penghijauan hutan kembali secara tidak langsung. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam penghijauan hutan. Kerjasama dengan Perhutani sangat menguntungkan untuk keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Sebagai bagian dari kawasan wisata dengan prospek pengembangan yang sangat besar, masyarakat dapat mendapatkan manfaat ganda dari pengelolaan lahan dengan sistem konservasi dengan bersinergi kawasan wisata sehingga kedepan masyarakat juga</p>	<p>Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan menggunakan konsep pengembangan aspek potensi pengembangan ekowisata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas 2. Fasilitas dan pelayanan 3. Atraksi budaya masyarakat 4. Atraksi wisata alam 5. Upaya konservasi lingkungan

		mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor wisata alam.	
5.	Pengelolaan Kampung Wisata dalam Prespektif <i>Community Based Tourism</i> di Kampung Jodipan Kota Malang Anggraini Dwi Jayanti, 2017 Deskripsi Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi politik: dalam pengelolaan Kampung Wisata Jodipan terdapat konflik permasalahan legalitas tanah serta perilaku partisipasi masyarakat yang meningkat. - Dimensi sosial yakni Kampung Wisata Jodipan dapat menciptakan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. - Dimensi budaya, yakni dapat memberikan kontribusi bagi produk wisata. - Dimensi ekonomi, secara signifikan mampu memperbaiki perekonomian, - Dimensi lingkungan, mampu mengatasi permasalahan sanitasi masyarakat. 	<p>Penelitian sebelumnya peneliti menggunakan 5 Dimensi <i>Community Based Tourism</i> (CBT) oleh Suansri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi ekonomi 2. Dimensi sosial 3. Dimensi budaya 4. Dimensi lingkungan 5. Dimensi politik
6.	Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsin, Hayat, 2017, Deskripsi Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KWE Puspa Jagad dalam pengembangan ekowisata sudah menerapkan prinsip <i>Community Based Tourism</i> (CBT) yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengelola KWE Puspa Jagad, peran pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam pengembangan KWE Puspa Jagad menjadikan KWE Puspa Jagad semakin maju dan berkembang. Kemudian	<p>Peneliti sebelumnya menggunakan konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) oleh Sunaryo melalui tiga prinsip pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan 2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan

		faktor pendorong dan penghambat yang dimiliki KWE Puspa Jagad dalam merumuskan strategi terbaik dalam pengembangan wisata.	3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.
--	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti, 2018

2.2 Kerangka Konseptual

Pada sub bab ini, peneliti menjelaskan beberapa konsep guna menganalisis terhadap fokus yang berhubungan dengan judul penelitian yang dipilih. Beberapa konsep digunakan sebagai dasar acuan dalam menganalisis lebih dalam penelitian.

2.1.1 Teori Prisma Keberlanjutan atau *Prism of Sustainability*

Sebelum menginjak pada teori prisma keberlanjutan, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian dasar dari pembangunan secara umum. Pengertian dari pembangunan ialah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan yang mendayagunakan potensi ekonomi, sosial, alam, serta budaya.²³ Potensi alam harus dikembangkan secara optimal seperti tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya guna kesejahteraan umat manusia. Sedangkan potensi sosial yaitu penduduk yang sangat banyak harus dimanfaatkan sehingga mampu mengelola potensi alam semaksimal dan keberlanjutan.²⁴

Pada abad 21 ini, paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser berorientasi pada pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainable Development* dan pembangunan yang berorientasi pada manusia seutuhnya atau

²³ I Nyoman Beratha. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 65

²⁴ *Ibid.*

People Centered Development.²⁵ Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang ingin menyeimbangkan antara aktivitas sosial ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam. Konsep pembangunan ini tidak hanya memperhatikan kepentingan generasi sekarang, melainkan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Guna tercapainya pembangunan berkelanjutan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yakni keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pembangunan dapat mengalami keambrokan jalannya pembangunan.²⁶

Secara historis, pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau secara familiar disebut sebagai *Brundland Commission* yang menerbitkan *Our Common Future*. Terbitan tersebut selanjutnya memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan saling keterkaitan dengan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.²⁷ Komisi Brundtland PBB mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut:²⁸

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Terjemahan: “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Maka dapat diambil kesimpulan yakni pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan menjamin pemenuhan kebutuhan manusia untuk hari ini, serta tanpa

²⁵ Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm 39

²⁶ M. Chaezinul Ulum dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press. Hlm 6

²⁷ *Ibid.* Hlm 2

²⁸ *Ibid.* Hlm 1

mengurangi hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya akan sumber daya alam.

Konsep pembangunan berkelanjutan terus mendapat sambutan luas dari pemerhati lingkungan hidup. Lebih lengkapnya, pembangunan berkelanjutan dilihat dalam tiga dimensi keberlanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Von Stoker dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972 yaitu model pembangunan keberlanjutan yang disebut sebagai segitiga keberlanjutan (*triangle sustainability*). Menurut Spangenberg, dalam mengukur dimensi pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, lingkungan saja masih belum mencukupi.²⁹ Oleh sebab itu dibutuhkan satu dimensi lagi sehingga mampu memenuhi jawaban mengenai persoalan pemerataan dan keadilan.

Sebagaimana diuraikan dalam Agenda 21, Spangenberg menambahkan satu dimensi yakni kelembagaan, mampu menangkap permasalahan pembangunan di Indonesia. Kelembagaan yang baik akan membuahkan pemerataan dan keadilan dalam suatu pembangunan. Oleh karena itu, ditambahkannya dimensi kelembagaan atau *institutions*, maka dapat membentuk suatu prisma keberlanjutan atau *prism sustainability* yakni meliputi: ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.³⁰

Pertama, keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memelihara sumber daya alam secara stabil, menghindari eksploitasi sumber

²⁹ Erman Rustiadi. Sunsun Saefulhakim. Dyah R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 136

³⁰ Marco Keiner. 2003. *Re-Emphasizing Sustainable Development–The Concept of ‘Evolutionability on Living Chances, Equity, and Good Heritage*. Zurich. Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology. Institute for Territory Development and Landscape. Irl-Institute. Sustainability Research Group. Eth H’Onggerberg. Hlm 382

daya alam serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan.³¹ Dimensi ini menekankan pada usaha konservasi serta memperkuat basis sumber daya fisik dan biologi atau pun ekosistem dalam sebuah pembangunan. Selain itu pada dimensi lingkungan berusaha meningkatkan kualitas ekosistem atau lingkungan dengan langkah penyelamatan serta perlindungan ekosistem lingkungan dengan cara bekerjasama dalam aspek penyelamatan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas ekosistem atau lingkungan secara berkelanjutan.

Kedua, keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu guna memelihara keberlanjutan serta menghindari ketidakseimbangan sektoral. Keberlanjutan ekonomi lebih menekankan bagaimana usaha untuk menjaga kapital (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial) sehingga tidak mengalami kemerosotan.³² Selain itu masyarakat memiliki akses ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan adanya perluasan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.³³

Ketiga, keberlanjutan sosial yaitu sebuah sistem yang mampu mencapai kesetaraan dalam penyediaan layanan sosial. Dalam dimensi ini menjelaskan bahwa sumber daya alam harus didayagunakan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku kepentingan.³⁴ Keberlanjutan sosial yakni

³¹ Joachim H Spangenberg. 2002. *Institutional Sustainability Indicators: An Analysis of The Institutions in Agenda 21 and a Draft Set of Indicators for Monitoring Their Effectivity*. Sustainable Europe Research Institute. Germany. Published online in Wiley InterScience: www.interscience.wiley.com, Hlm 104

³² Joachim H Spangenberg. 2004. *Sustainability Beyond Environmentalism: The Missing Dimensions*. Berlin, Germany. Hlm 13-14

³³ *Ibid.* Hlm 7

³⁴ M. Chaezinul Ulum dan Rispa Ngindana. *Op.Cit.* Hlm 3

lebih kepada usaha peningkatan kualitas daripada kuantitas. Untuk mencapai keberlanjutan sosial, pemerintah memiliki tanggung jawab bersama masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, peningkatan pelayanan publik, serta tingkat partisipasi guna menuju keberlanjutan sosial.

Keempat, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kelembagaan sudah diakui sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun belum dianggap sebagai dimensi dan masih menjadi satu dengan dimensi sosial. Menurut Spangenberg mengutarakan bahwa akan memunculkan permasalahan yang bersifat kompleks serta sulit untuk dideskripsikan. Penggabungan antara dimensi sosial dengan kelembagaan sama halnya dengan menggabungkan pelaku dengan struktur, atau antara individu dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perbedaan tersebut maka seharusnya dijadikan menjadi dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan yang masing-masing berbeda. Dimensi kelembagaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antar individu serta memiliki tujuan yaitu seperti kesempatan berpartisipasi, kesetaraan, pemerataan, keadilan, dan kebebasan yang mempunyai tujuan saling berkaitan dengan yang lain (ekonomi, sosial, lingkungan).³⁵ Spangenberg melakukan perluasan yang menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya pembangunan menuju tujuan rekonsiliasi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga proses tersebut menuntut lembaga baru dan pola baru tata kelola, jaringan antar

³⁵ Alex Oktavianus. 2014. *Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan dengan Modal Sosial di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Hlm 7

aktor, pola kerjasama dan bahkan membentuk pola dan prosedur kelembagaan baru.³⁶

Tabel 2.2

Indikator *Prism Sustainability* menurut Spangenberg

Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi kapital (Sumber Daya Alam) (<i>capital efficiency</i>) - Peningkatan kesejahteraan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pendapatan masyarakat (<i>income</i>) b. Perluasan tenaga kerja (<i>labor</i>)
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan dan keadilan sosial (<i>equity</i>) - Partisipasi masyarakat (<i>participation</i>)
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelamatan/ perlindungan ekosistem (<i>protect eco-systems</i>) - Kerjasama penyelamatan lingkungan (<i>network to protect eco-systems</i>)
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola kelembagaan (<i>manage</i>) - Regulasi atau aturan adat/budaya (<i>regulation</i>) - Aktor (<i>actor</i>) - Kerjasama

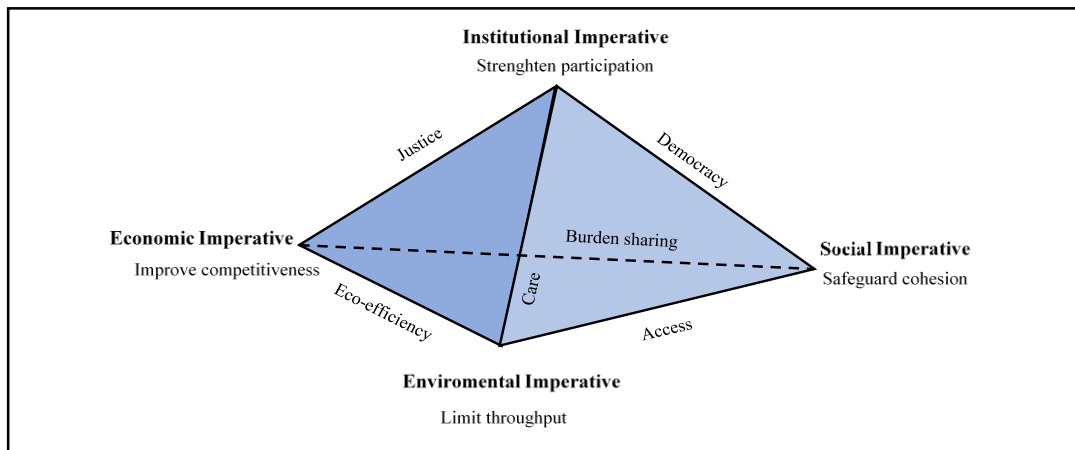
Sumber: Diolah peneliti, Joachim H. Spangenberg, 2004, *Sustainability Beyond Environmentalism: The Missing Dimensions*

Terdapat enam hubungan utama antar dimensi dalam prisma keberlanjutan menurut Spangenberg:³⁷

³⁶ Nan Cha. 2009. *Sustainability Performance Evaluation System in Government, A Balanced Scorecard Approach Towards Sustainable Development*. London: Springer. Hlm 93

³⁷ Barry Dalal Clayton dan Barry Sadler. 2014. *Sustainability Appraisal: A Sourcebook and Reference Guide to International Experience*. New York: Routledge. Hlm 54

Gambar 2.1
Prisma Keberlanjutan (*prism of sustainability*)



Sumber: Spangenberg dan Bonniot, 1998

1. **Eco-efficiency** (hubungan ekonomi-lingkungan) yaitu mengatur secara efisien dan arif dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Secara garis besarnya yaitu tidak mengeksploitasi secara berlebihan sehingga dapat merusak atau mengganggu ekosistem.
2. **Acces** (hubungan sosial-lingkungan) yaitu hak atas untuk mengakses sumber daya alam. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam, namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam mempertahankan aspek keberlanjutan lingkungan yang juga berimplikasi kepada kehidupan masyarakat.
3. **Democracy** (hubungan sosial-kelembagaan) yaitu demokrasi partisipatif adalah kondisi institusional dasar untuk kohesi sosial.
4. **Justice** (hubungan ekonomi-kelembagaan) yaitu keadilan yang mengacu pada perlakuan adil atau tidak memihak yang berkenaan dengan dampak distribusi peningkatan kesejahteraan.
5. **Burden sharing** (hubungan sosial-ekonomi) pembagian beban sehubungan dengan biaya dan manfaat.
6. **Care** (hubungan kelembagaan-lingkungan) perawatan adalah kombinasi dari dedikasi dan tindakan yang menghubungkan dimensi institusional dan dimensi lingkungan, meliputi tugas peraturan, organisasi dan individu yang menggabungkan penerapan prinsip kehati-hatian.

2.1.2 Konsep Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan

desa harus memperhatikan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Potensi pembangunan desa wisata di Desa Sanankerto yaitu pemanfaatan embung desa yang awalnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan air untuk irigasi areal pertanian berubah menjadi daerah wisata air serta mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain embung, potensi alam lainnya yaitu hutan bambu yang berfungsi sebagai penyangga tersedianya sumber air. Tidak hanya sebagai penjaga sumber air, hutan bambu Andaman menjelma menjadi *arboretum* atau areal museum alam konservasi bambu serta sebagai sarana edukasi terkait tanaman bambu.

Desa Wisata

Desa wisata mempunyai pengertian lebih khusus dibandingkan dengan pengertian desa. Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas penunjang, aksesibilitas, yang dihadirkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara serta tradisi yang berlaku.³⁸ Desa wisata juga dimaknai sebagai kawasan pedesaan yang menyuguhkan suasana asli pedesaan mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, sosial, adat istiadat, dan lain-lain sehingga memiliki keunikan dan menarik sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam komponen kepariwisataan. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata terbagi menjadi tiga kategori, yakni:³⁹

³⁸ GIZ, Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, 2015. *Buku Panduan Pengembangan Wisata Hijau*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Hlm 20

³⁹ *Ibid.* Hlm 20-21

- **Desa Wisata Embrio**, yakni desa wisata yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata serta sudah memulai dengan adanya gerakan masyarakat atau desa guna mengelola menjadi desa wisata.
- **Desa Wisata Berkembang**, yakni desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat atau desa untuk pengelolaannya, dan sudah melaksanakan kegiatan promosi sehingga terdapat wisatawan yang tertarik dan mulai berkunjung.
- **Desa Wisata Maju**, yakni desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara berkelanjutan serta sudah dikelola secara profesional dengan terbentuknya kelembagaan, seperti Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran.

Aspek-Aspek Pengembangan Desa Wisata⁴⁰

1. Daya Tarik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.⁴¹ Daya tarik wisata adalah bagian utama dari desa wisata. Berbagai macam sumber daya yang dikemas dengan baik akan menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan ke desa. Daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, atau pun buatan serta dengan didukung oleh aktivitas tertentu.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 No.5

Pertama, daya tarik alam seperti hutan, bukit, gunung, laut dan sebagainya merupakan daya tarik yang sangat memungkinkan guna dijadikan potensi pengembangan desa wisata. Untuk menjaga dan mengelola daya tarik alam, sangat diperlukan perhatian serta daya dukung lingkungan sehingga tidak menyebabkan kerusakan alam dalam jangka panjang.

Kedua, daya tarik budaya yaitu hasil dari kehidupan manusia yaitu seperti adat istiadat, norma, kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dikemas menjadi daya tarik budaya masyarakat lokal dan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. *Ketiga*, daya tarik buatan adalah hal yang sengaja dibuat yang bermanfaat untuk menarik kunjungan wisatawan ke desa wisata. Desa Sanankerto merupakan desa wisata yang mengandalkan daya tarik alam berupa waduk embung Boon Pring dan kelestarian hutan bambu Andaman. Selain daya tarik alam, terdapat daya tarik budaya yakni kesenian *bantengan*, *jaran kepeng*, *tumpeng sesucen*, dan festival *egrang*.

2. Sumber Daya Manusia

Pengembangan desa wisata harus didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep desa wisata. Tidak hanya ketersediaan pemandu wisata tetapi juga pengetahuan dan keterampilan pemandu terkait produk wisata. Sumberdaya manusia pengelola kegiatan desa wisata harus memiliki kemampuan penguasaan berbagai unsur lokalitas desa sebagai kekuatan daya tarik utama.

3. Sarana Prasarana

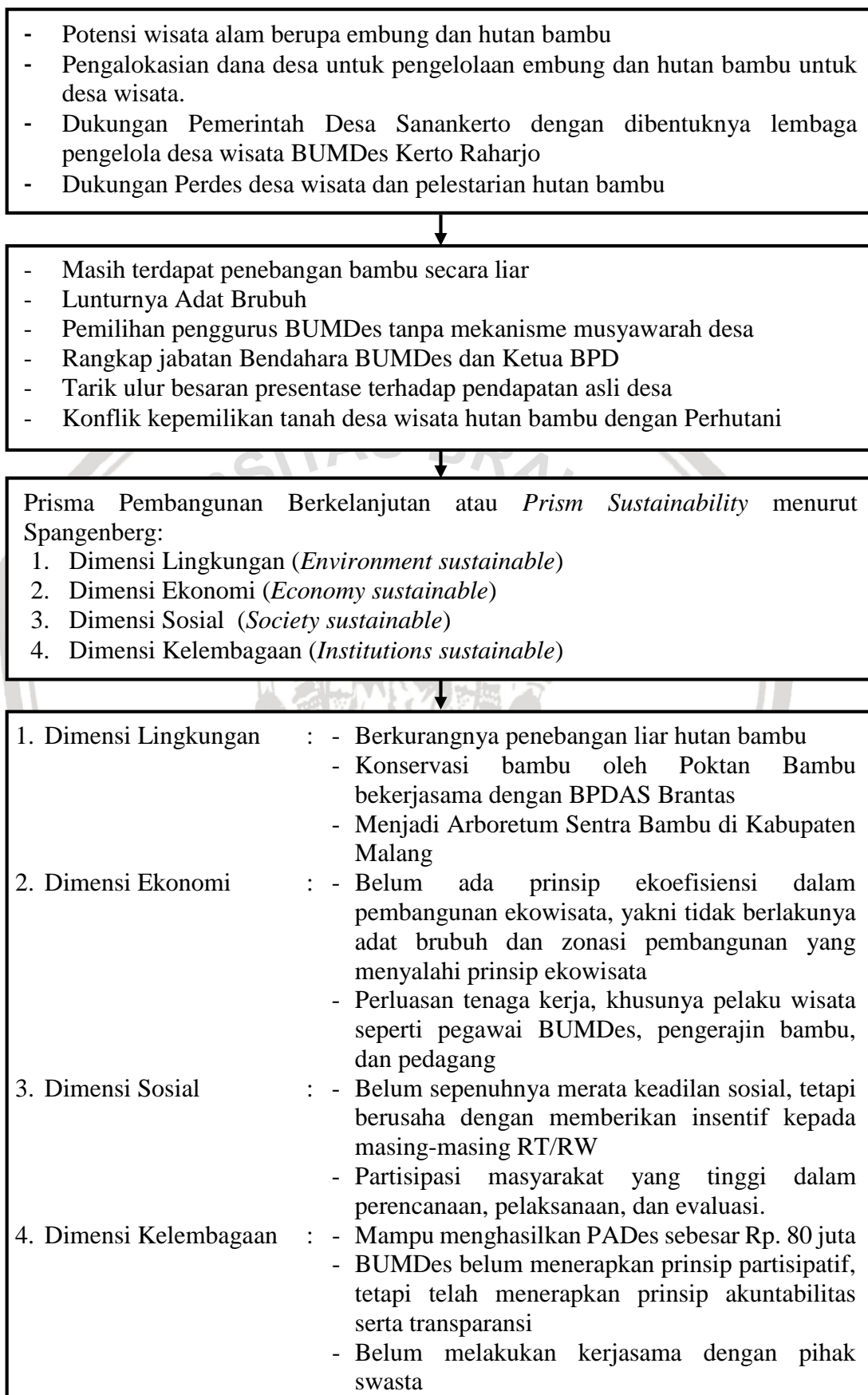
Aksesibilitas guna menjangkau lokasi desa wisata menjadi hal yang penting. Kemudahan akomodasi dan transportasi sangat mendukung pengembangan desa wisata. Kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pengunjung dan wisatawan juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata. Sarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kepada wisatawan antara lain seperti fasilitas umum, warung makan, sarana transportasi menuju ke desa wisata perlu disediakan untuk memberikan pelayanan kepada para pengunjung.

4. Promosi

Karakter kegiatan wisata pedesaan sebagai bentuk wisata alternatif, menuntut pengembangan strategi promosi dan pemasaran yang lebih terfokus dan selektif dengan kombinasi promosi online (media digital, elektronik) maupun *offline* (*roadshow*, *famtrip*).

Bagan 2.1

Alur Pikir Penelitian



Sumber: *Diolah Peneliti, 2018*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan proses atau prosedur yang digunakan guna mendekati sebuah problematika untuk mencari jawaban.⁴² Dengan kata lain metodologi merupakan pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang pemilihan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder serta dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Subbab yang berkaitan dengan penelitian ini dibahas pada subbab terakhir yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan bab perbab.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang mudah serta dapat diamati.⁴³ Sedangkan menurut Creswell (1998) dalam Juliansyah Noor menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan sudut pandang dari responden, serta melakukan studi pada situasi yang dialami.⁴⁴

⁴² Deddy Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 145

⁴³ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 21

⁴⁴ Juliansyah Noor. 2015. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. Hlm 135

Dalam penelitian kualitatif, penelitian dimulai dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian awal bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir pada suatu teori. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan data serta variabel yang diperoleh terkait fenomena atau kenyataan sosial yang diteliti.⁴⁵ Penelitian deskriptif dilakukan yaitu dengan memandang objek yang sesuai di lapangan. Penelitian ini membahas pembangunan desa ekowisata berbasis potensi alam di Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang.

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pertimbangan pemilihan Desa Sanankerto sebagai lokasi penelitian yaitu karena salah satu desa percontohan pengembangan *pilot project* desa wisata di Indonesia yakni memanfaatkan dana desa guna pemanfaatan embung dan hutan bambu sebagai potensi wisata.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat untuk sebagai pedoman terstruktur bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Selain itu fokus penelitian juga bermanfaat membantu peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap pada fokus utama penelitian. Peneliti mengambil fokus penelitian yaitu terkait pembangunan desa ekowisata berbasis potensi alam serta menganalisis desa wisata berdasarkan

⁴⁵ Sanapiah Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 20

indikator prisma pembangunan berkelanjutan serta faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan desa ekowisata di Desa Sanankerto.

3.4 Jenis Data

Data merupakan komponen penting dalam mengulas serta mengkaji hasil penelitian. Data yang bersifat relevan dengan fokus penelitian yang membantu peneliti dalam mengkaji serta menganalisis sebuah permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu antara lain:⁴⁶

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama dihasilkan dalam penelitian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang berperan dalam pelaksanaan program. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proses pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto sebagai informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data tersebut kemudian direkam, dicatat serta dijadikan transkrip dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari sumber kedua yang memiliki informasi tersebut. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, jurnal, artikel, buku website serta literatur terdahulu yang terkait termasuk foto, statistik dan lain-lain.

⁴⁶ Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. Hlm 55-56

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif dituntut memperoleh data yang akurat sehingga harus menggunakan teknik pengumpulan data yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁴⁷ Wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang atau narasumber terkait topik penelitian dan dilakukan secara bertatap muka. Wawancara merupakan alat pembuktian atau *re-checking* terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁴⁸

Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua teknik yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur atau sering disebut wawancara baku adalah teknik wawancara yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya secara tertulis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah teknik wawancara yang secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap terkait pengumpulan data.⁴⁹

⁴⁷ Juliansyah Noor. *Op.Cit.* Hlm 138

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 139

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi. *Op.Cit.* Hlm 144

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dikarenakan semua pertanyaan sudah dirumuskan lebih dahulu dan diatur secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan. Teknik wawancara struktur memiliki kelebihan yaitu pertanyaan sudah tersusun secara rapi dan sistematis serta lingkup atau fokus penelitian tidak keluar dari topik penelitian. Peneliti menggunakan alat bantu dalam melakukan wawancara yaitu menggunakan *tape recorder*, daftar pertanyaan, dan semua alat yang memudahkan dalam melakukan wawancara.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan target narasumber terlebih dahulu. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian karena pemilihan informan dipilih secara khusus berdasarkan informan yang mampu menjawab tujuan dari penelitian. Selain itu teknik sampling berguna untuk mengetahui informan yang bersifat representatif yang memiliki informasi dan berwenang memberikan informasi terkait fokus penelitian.⁵⁰

Terdapat jenis golongan informan dalam sebuah penelitian, yaitu antara lain:⁵¹

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

⁵⁰ Deddy Mulyana. *Op.Cit.* Hlm 187

⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. Hlm 228

Berikut adalah beberapa daftar narasumber yang menjadi informan bagi peneliti:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Alasan
1.	Subur	Kepala Desa Sanankerto	Terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan desa ekowisata
2.	Sugiono	Sekretaris Desa Sanankerto	Terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan desa ekowisata
3.	Ahmadi	Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bambu Boon Pring	Terlibat langsung dalam upaya konservasi lingkungan hutan bambu dan embung
4.	Rahmad Aldian	Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Berperan dalam aktor pengembangan yang berkaitan kepariwisataan ekowisata di Desa Sanankerto
5.	Kliman	Penjaga Hutan Bambu Andeman (Waker)	Terlibat dalam upaya konservasi dan penjaga hutan aset milik Desa Sanankerto
6.	Abdulloh Faqih	Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sanankerto dan Bendahara BUMDes Kerto Raharjo	Berperan dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa dan mengetahui secara langsung pembukuan keuangan dalam BUMDes Kerto Raharjo
7.	Bismilatif	Kamituwo Dusun Kampung Anyar	Mengetahui kondisi masyarakat di Dusun Kampung Anyar
8.	Djamaludin	Kamituwo Dusun Krajan dan Wakil Kelompok Tani (Poktan) Bambu Boon Pring	Mengetahui kondisi masyarakat di Dusun Krajan, terlibat dalam konservasi alam.
9.	Samsul Arifin	Ketua BUMDes Kerto Raharjo	Aktor utama dalam pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo
10.	Sulistyoning Ari	Sekretaris BUMDes Kerto Raharjo	Berperan dalam melakukan pencatatan inventaris, ataupun kebijakan terkait pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo
11.	Miseno	Pegawai BUMDes Kerto Raharjo	Terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes
12.	Totok	Masyarakat UMKM Pengerajin Bambu	Terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penerima manfaat adanya pembangunan desa ekowisata Desa Sanankerto

13.	Sulaiman	Masyarakat Pengerajin Bambu UMKM	Terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penerima manfaat adanya pembangunan desa ekowisata Desa Sanankerto
14.	Oelang Cahyono	Masyarakat Pemilik <i>Homestay</i>	Terlibat dalam pengembangan ekonomi dan penerima manfaat adanya pembangunan desa ekowisata Desa Sanankerto
15.	Rianto	Masyarakat Lokal	Penerima manfaat adanya pembangunan desa ekowisata Desa Sanankerto
16.	Tarip	Masyarakat Lokal Petani	Penerima manfaat adanya pembangunan desa ekowisata Desa Sanankerto
17.	Oni Eko Cahyono	Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang	SKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang melakukan pendampingan dan memberikan fasilitasi pembentukkan BUMDes Kerto Raharjo
18.	Nobi	Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	SKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang memberikan fasilitasi terkait kepariwisataan kepada Pokdarwis Boon Pring
19.	Tekat	Polisi Hutan – Asisten Perhutani BKPH Dampit, Wilayah Bambang Selatan, Malang	Pihak yang berkaitan terkait konflik status kepemilikan lahan hutan bambu Boon Pring
20.	Nur Cholis	Dinas Pengairan Kabupaten Malang	SKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang memberikan bantuan perbaikan Embung Andeman
21.	Hilda	Analisis Kehutanan dan Lahan – Rehabilitasi Hutan dan Lahan, UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Penyalur bantuan bibit dari BPDAS Brantas dan fasilitasi pembentukkan Kelompok Tani Bambu Boon Pring
22.	Imam Sulistianto	BPDAS Brantas Provinsi Jawa Timur	Stakeholder dalam memberi bantuan terkait bibit bambu dan fasilitasi pelatihan terhadap Kelompok Tani Bambu Boon Pring

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi secara ilmiah menurut Garayibah adalah perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian dengan maksud mengungkap faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁵² Terdapat beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi yaitu:⁵³

- a. Memungkinkan melihat dan mengamati secara langsung, setelah itu mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan secara langsung.
- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional atau pengetahuan yang berasal dari data.
- c. Teknik pengamatan atau observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit.

Terdapat empat jenis dalam teknik observasi yaitu observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, dan observasi sistematis.⁵⁴

- a. Observasi Terbuka
Observasi terbuka yaitu observasi yang dimulai dengan suatu kepala kosong tanpa teori sehingga peneliti atau pengamat harus berimprovisasi dalam melakukan observasi
- b. Observasi Terfokus
Observasi terfokus yaitu jenis pengamatan yang spesifik, mempunyai rumusan masalah atau tema penelitian.
- c. Observasi Terstruktur
Observasi terstruktur yaitu observasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu adanya tindakan perekaman data secara terstruktur serta terperinci.
- d. Observasi Sistemik

⁵² Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 37-38

⁵³ Lexy J. Moeloeng. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 174-175

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi. *Op.Cit*. Hlm 98-99

Observasi sistemik yaitu observasi yang dilakukan secara lebih sistematis, yaitu peneliti melakukan pengkategorian kemungkinan bentuk dan jenis data amatan secara terstruktur.

Kegiatan observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengecek kebenaran jawaban. Observasi atau pengamatan secara langsung bertujuan mengamati proses dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses pengembangan dan pembangunan desa wisata Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang. Peneliti menggunakan jenis observasi terfokus karena bertitik tumpu pada teori serta rumusan masalah yang jelas dan berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh data yang lengkap dan bersifat sah. Metode ini digunakan guna mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Dokumentasi bersifat sebagai data penunjang atau pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁵⁵ Tujuan metode dokumentasi yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁵⁶ Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa data yaitu produk hukum, serta foto ataupun dokumentasi selama peneltian yang berkaitan dengan pembangunan desa wisata di Desa Sanakerto, Turen, Kabupaten Malang.

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang diperoleh masih bersifat data mentah. Oleh sebab itu diperlukan proses analisis data guna menyusun data secara logis serta sistematis. Setelah dilakukan proses analisis sehingga mendapatkan data

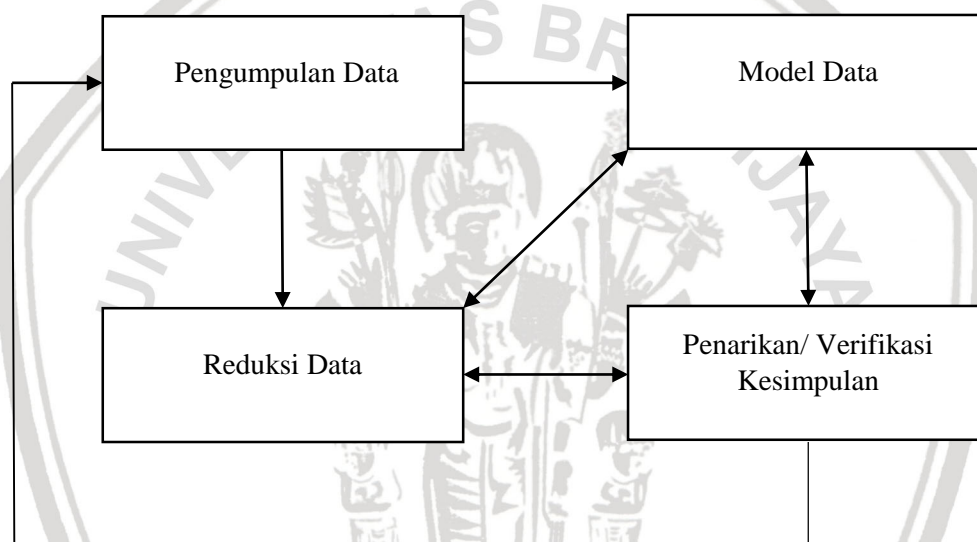
⁵⁵ *Ibid.* Hlm 158

⁵⁶ Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII. Hlm 120

yang memiliki makna dan dapat untuk menarik suatu kesimpulan dalam menguji hipotesis.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman (1984). Dimana dalam menganalisis model tersebut dengan cara interaktif yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada titik jenuh.⁵⁸ Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

Bagan 3.1

Komponen Analisis Data: Model Interkatif Miles dan Huberman



Sumber: *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Emzir Tahun 2012

⁵⁷ Ahmadi. Rumlan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. Hlm 229

⁵⁸ Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hlm 91

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pentransformasian data kasar yang berasal dari lapangan. Proses tersebut berlangsung selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mefokuskan, memilah, memilih dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat terbentuk dan diverifikasi.⁵⁹ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar menggali data yang valid atau benar. Apabila peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh harus dicek ulang dengan informan lain sehingga dirasa peneliti lebih mengetahui.⁶⁰

b. Model Data (*Data Display*)

Model data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk-bentuk penyajian yaitu antara lain dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, bagan, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mempermudah membaca serta dalam penarikan kesimpulan.⁶¹ Dalam tahapan ini peneliti melakukan penyajian atau *display* data secara sistematis tujuannya agar mudah memahami interaksi antar bagian-bagian dalam konteks yang utuh.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ketiga dari aktivitas analisis yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari

⁵⁹ Emzir. *Op.Cit* Hlm 130

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi. *Op.Cit.* Hlm 209

⁶¹ *Ibid.*

konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁶²



⁶² *Ibid.* Hlm 210

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam bab empat ini terdiri dari beberapa subbab yang berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, yakni Desa Sanankerto. Selain itu juga menjelaskan terkait kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi ekonomi, pelayanan sarana dan transportasi, visi dan misi Desa Sanankerto, struktur organisasi Pemerintah Desa Sanankerto, sejarah desa wisata di Desa Sanankerto, sejarah Embung Andeman, sejarah hutan bambu Boon Pring, sarana prasarana pendukung desa wisata, kelembagaan BUMDes Kerto Raharjo, struktur organisasi, dan lain-lain.

4.1 Kondisi Geografis

Desa Sanankerto secara struktural merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Turen. Secara geografis Desa Sanankerto terletak pada wilayah timur Kabupaten Malang. Desa Sanankerto berada pada koordinat 112.770315 Bujur Timur – 8.168525 Lintang Selatan dan memiliki cakupan luas wilayah sebesar 265,118 Ha yang digunakan sebagai hutan desa, areal persawahan, pemukiman, perkebunan, dan fasilitas umum lainnya. Adapun jarak menuju Ibukota Kabupaten Malang sekitar 30 Km yang ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Desa Sanankerto terbagi menjadi 2 Dusun, yakni Dusun Krajan dan Dusun Kampung Anyar serta terdiri dari 5 RW dengan 23 RT. Adapun batas-batas Desa Sanankerto sebagai berikut:

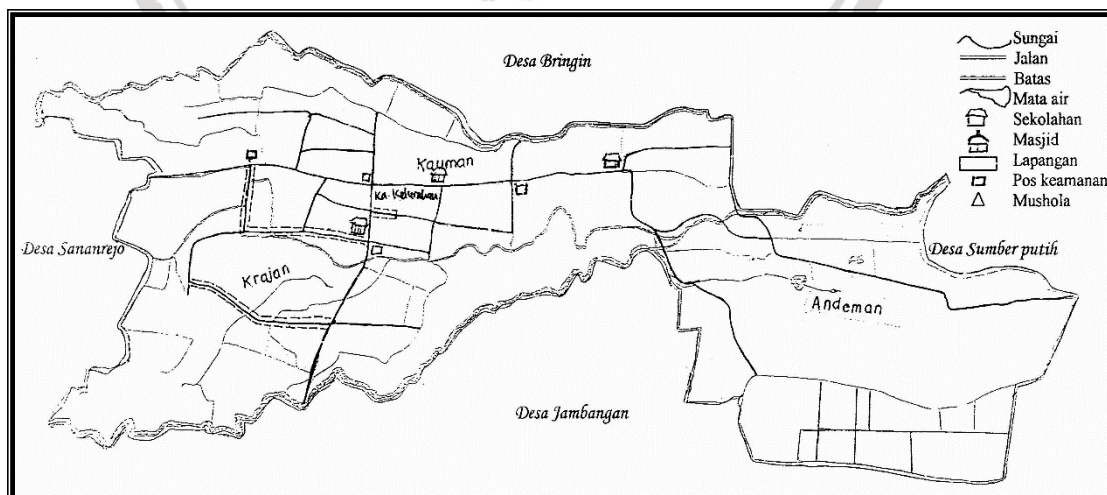
Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Sanankerto

Arah	Batas Wilayah
Utara	Desa Bringin
Barat	Desa Sananrejo
Selatan	Desa Jambangan
Timur	Desa Sumber Putih

Sumber: Dokumen RPJM Desa Sanankerto Tahun 2014 – 2018

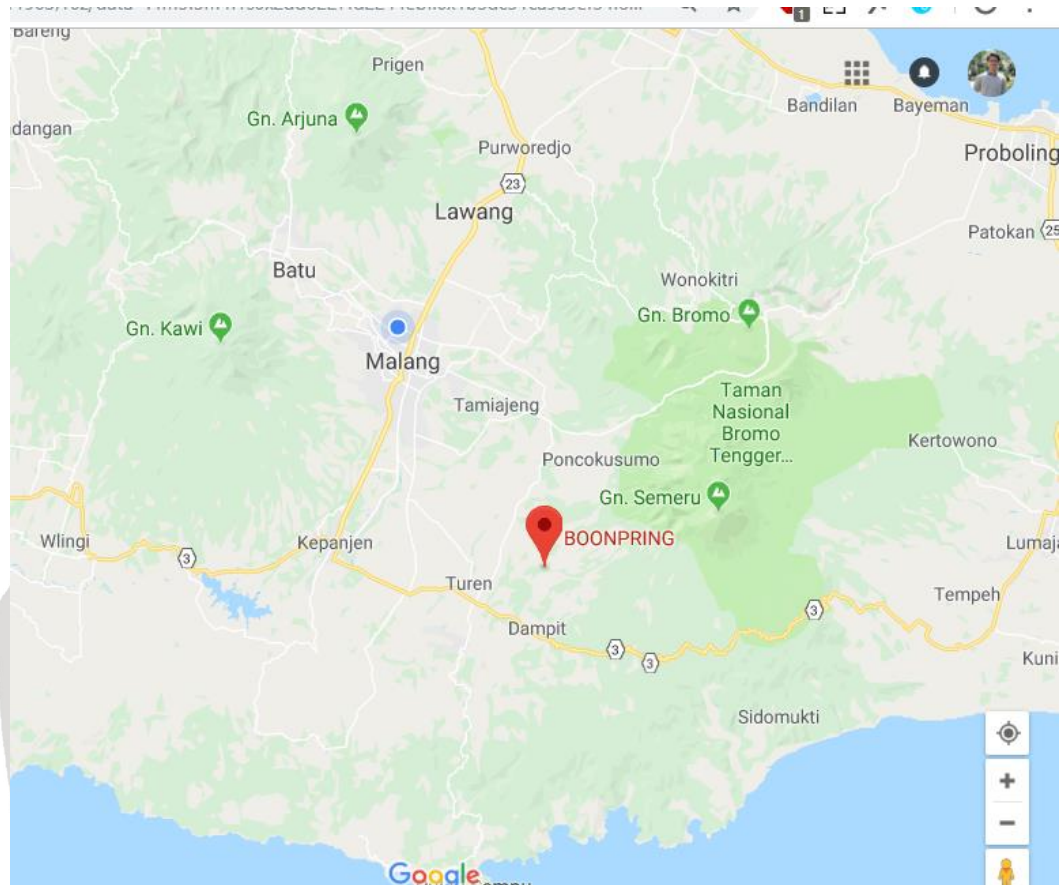
Desa Sanankerto terletak di bagian timur Kecamatan Turen dan termasuk daerah dataran tinggi. Topografi Desa Sanankerto memiliki ketinggian kurang lebih 600 meter diatas permukaan air laut. Desa Sanankerto juga memiliki 9 sumber mata air yakni antara lain Sumber Seger, Sumber Dandang, Sumber Anyes, Sumber Maron, Sumber Krecek, Sumber Towo, Sumber Gatel, Sumber Bantal, dan Sumber Meneng yang terletak di Dusun Kampung Anyar. Sumber air tersebut bermuara di sebuah embung yang bernama Embung Andeman. Air yang berada di embung dimanfaatkan masyarakat Desa Sanankerto sebagai air minum warga desa, untuk irigasi pertanian, potensi budidaya perikanan air tawar, dan sebagai tujuan wisata air.

Gambar 4.1
Peta Desa Sanankerto



Sumber: Dokumen RPJM Desa Sanankerto Tahun 2014 – 2018

Gambar 4.2
Lokasi Menuju Ekowisata Boon Pring Andeman



Sumber : <https://www.google.co.id/maps/place/BOONPRING>

Akses menuju kawasan ekowisata Boon Pring Andeman dapat diakses melalui jalur darat dengan kendaraan pribadi sekitar 40 km dari pusat Kota Malang atau dapat ditempuh memakan waktu 1-1,5 jam perjalanan. Apabila menggunakan angkutan umum, turun di pangkalan ojek sekitar Pasar Turen selanjutnya perjalanan ke kawasan ekowisata Boon Pring Andeman bisa dilanjutkan dengan ojek. Sepanjang perjalanan menuju kawasan ekowisata sudah dilengkapi papan penunjuk arah yang mengarahkan menuju kawasan ekowisata Boon Pring Andeman.

4.2 Sejarah atau Asal Usul Desa Sanankerto

Riwayat Desa Sanankerto berasal dari salah satu dukuh atau dusun di Desa Sananrejo yang mempunyai nama dukuh Krajan atau dukuh Kampung Anyar. Pada tahun 1910 mulai dibentuklah kepala desa sendiri. Pada tahun tersebut, sebagian besar tanah tersebut masih berupa kebun kopi dan hutan bambu. Pada tahun 1975, tanah desa tersebut masuk dalam wilayah daerah Pemerintahan Kabupaten Malang yakni oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Timur.

4.3 Data Demografi

Berdasarkan data administrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sanankerto tahun 2018, jumlah keseluruhan penduduk Desa Sanankerto yaitu sebanyak 3992 jiwa dengan jumlah warga laki-laki sebanyak 2013 jiwa dan perempuan sebanyak 1979 jiwa. Sesuai dengan kondisi demografis, masyarakat Desa Sanankerto tercatat jumlah kepala keluarga sebanyak 1056 KK dan tersebar dengan kepadatan penduduk sebesar 109,72 per Km. Adapun data penduduk Desa Sanankerto apabila disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Sanankerto dan Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah laki-laki	2013 orang
Jumlah perempuan	1979 orang
Jumlah total	3992 orang
Jumlah kepala keluarga	1056 KK
Kepadatan penduduk	109,72 per KM

Sumber: *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Desa Sanankerto Tahun 2018*

4.3.1 Mata Pencaharian Penduduk

Dari 1.053 jumlah penduduk Desa Sanankerto, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani, penduduk Desa Sanankerto bermata

pencapaian sebagai buruh tani. Mata pencapaian terbanyak ketiga yakni tukang anyaman atau pengrajin. Rata-rata penduduk di Dusun Kampung Anyar bermata pencapaian sebagai pengrajin dan anyaman dengan bahan baku bambu. Pengerajin memanfaatkan bambu menjadi anyaman bambu berupa *tompo*, *tempeh*, keranjang bambu. Selain itu juga memanfaatkan bambu menjadi tusuk sate, tangkai duparatus, dan kerajinan asbak, miniatur pohon bambu, dan patung dari akar bambu. Berikut data jenis pekerjaan penduduk Desa Sanankerto apabila disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	201 orang	205 orang	406 orang
Buruh Tani	151 orang	172 orang	323 orang
Pegawai Negeri Sipil	12 orang	14 orang	26 orang
Pedagang barang kelontong	8 orang	21 orang	29 orang
Peternak	9 orang	0 orang	9 orang
Montir	8 orang	0 orang	8 orang
Perawat Swasta	0 orang	2 orang	2 orang
Guru Swasta	6 orang	9 orang	15 orang
Pedagang Keliling	5 orang	1 orang	6 orang
Tukang Kayu	32 orang	0 orang	32 orang
Tukang Batu	35 orang	0 orang	35 orang
Pembantu Rumah Tangga	0 orang	26 orang	26 orang
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	67 orang	15 orang	82 orang
Purnawirawan/Pensiunan	10 orang	2 orang	12 orang
Sopir	23 orang	0 orang	23 orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	1 orang	0 orang	1 orang
Tukang Anyaman/ Pengrajin	32 orang	38 orang	70 orang
Jumah Total Penduduk	1.105 orang		

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Desa Sanankerto Tahun 2018

4.4 Potensi Alam Ekowisata Boon Pring Andeman Desa Sanankerto

Berdasar pada wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Boon Pring dan beberapa perangkat desa, maka diperoleh sejarah singkat mengenai pembangunan Desa Sanankerto menjadi Desa Wisata berbasis ekowisata. Desa Sanankerto merupakan desa yang memiliki potensi berupa alam sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata di Kabupaten Malang. Latar belakang Desa Sanankerto dikukuhkan menjadi desa wisata berbasis ekowisata yakni dimulai dari timbulnya keinginan Pemerintah Desa Sanankerto bersama masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam, budaya, ekonomi serta atraksi menjadi sebuah daya tarik wisata yang dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Ide awal pembangunan Desa Sanankerto menjadi sebuah desa wisata berbasis ekowisata yakni berawal dari inisiatif dari Kepala Desa Sanankerto yakni Bapak Subur dan kemudian ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat yang juga memiliki pemikiran sama mengenai pembangunan desa wisata. Kemudian Pemerintah Desa Sanankerto mengundang tokoh masyarakat untuk mengadakan rapat membahas pentingnya pemanfaatan potensi desa berupa hutan bambu dan embung untuk diangkat menjadi daya tarik wisata. Pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Wisata Andeman “Boon Pring” Desa Sanankerto Turen Kabupaten Malang.

4.4.1 Potensi Alam

a. Hutan Bambu Boon Pring

Desa Sanankerto memiliki hutan desa seluas 36,8 hektar dan berada di sekitar Dusun Kampung Anyar. Hutan bambu tersebut bernama hutan bambu Boon Pring. Asal usul nama Boon Pring yaitu berarti Kebun Bambu. Dahulu pada tahun 1910 hutan bambu tersebut merupakan perkebunan kopi milik penjajah Belanda. Setelah Belanda pergi, masyarakat menanaminya dengan tanaman bambu. Sehingga bambu di hutan tersebut tidak tumbuh alami tetapi ditanami oleh masyarakat dahulu. Luas total hutan Bambu Boon Pring tersebut mencapai 36,8 hektar. Awalnya lokasi Hutan Bambu Boon Pring merupakan hutan yang tidak terawat. Sehingga pada tahun 2015, melalui swadaya masyarakat Desa Sanankerto mulai mengelola kawasan tersebut sebagai lokasi ekowisata.

Gambar 4.3
Hutan Bambu Boon Pring



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 21 Mei 2018

Pemerintah Kabupaten Malang juga mendapuk Hutan Bambu Boon Pring sebagai kawasan *Arboretum* atau museum bambu berbasis konservasi lingkungan. Selain itu, keberadaan Hutan Bambu Boon Pring juga berperan penting dalam perlindungan mata air yang berada di dalam hutan serta sebagai penunjang debit air yang ada di Embung Andeman.

b. Embung Andeman

Selain hutan bambu, Boon Pring juga menawarkan keindahan embung yang bernama Embung Andeman. Embung tersebut menjadi muara beberapa sumber air yang terdapat di kawasan hutan bambu. Sejarah awalnya yaitu embung tersebut merupakan proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pengairan pada tahun 1978. Pada tahun 1980 dilakukan perluasan embung guna menampung cadangan air yang bersumber dari sembilan mata air yang terdapat di wilayah hutan bambu Boon Pring. Embung Andeman dibangun dan dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian khususnya areal pertanian di wilayah Desa Sanankerto. Selain dapat mengairi lahan pertanian di Desa Sanankerto, aliran air irigasi juga dapat mengairi di dua desa lainnya yakni Desa Sananrejo dan Desa Pagedangan dengan areal lahan persawahan seluas ± 260 ha.

Gambar 4.4
Embung Andaman di Kawasan Ekowisata Boon Pring



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 21 Mei 2018

Pada tahun 2012 Pemerintah Desa Sanankerto mengajukan 4-5 kali pengajuan perbaikan dan perawatan embung kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan di pintu air embung. Hal tersebut juga menemui kendala yakni anggaran untuk perbaikan embung oleh Dinas PU SDA Kabupaten Malang tidak sesuai dengan pemborong rekanan karena pemborong rugi. Akhirnya Pemerintah Desa Sanankerto ikut mendampingi dengan harapan agar maksimal dan Pemerintah Desa Sanankerto mengeluarkan uang \pm Rp. 3 Juta untuk membantu mengisi tanah di sekitar pintu air. Akhirnya sudah berhasil dan sudah tidak ada bocoran air.

Tahun 2014 dilakukan pembersihan dan pengerukkan sedimentasi dengan bantuan alat berat *excavator* dari Dinas PU SDA Kabupaten Malang. Pengerukkan tanah di dasar embung dilakukan agar mengurangi sedimentasi serta ada suatu peningkatan kualitas embung berupa penambahan volume daya tampung air dan kualitas air embung. Selain untuk pemanfaatan untuk irigasi pertanian, Embung Andaman dimanfaatkan sebagai areal pengembangan wisata air yang terdapat

beberapa permainan air yang disuguhkan, mulai dari perahu untuk berkeliling menikmati embung hingga sepeda air. Pengelolaan ekowisata tersebut dikelola oleh BUMDes Kerto Raharjo.

Tabel 4.4
Harga Tiket Masuk Potensi Ekowisata Boon Pring Andeman
Desa Sanankerto

Nama Kunjungan Ekowisata	HTM/Harga Beli/Produksi
Masuk kawasan ekowisata	Rp. 8.000,-/orang
Parkir	Sepeda Motor : Rp. 3.000,- Mobil : Rp. 5.000,-
<i>Flying fox</i>	Rp. 10.000,-/orang
Kolam renang	Gratis
Perahu angsa atau sepeda air	Rp. 20.000,-/perahu
Perahu motor	Rp. 5.000,-/orang
Menunggang kuda	Rp. 10.000,-/orang
ATV	Rp. 20.000,-/orang
<i>Floating waterball</i>	Rp. 15.000,-/orang
Wisata Industri Rumah Tangga (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Miniatur kapal pinisi terbuat dari bambu: Rp. 200.000,-pcs - Lampion bambu: Rp. 40.000,-/pcs - Asbak bambu: Rp. 10.000,-/pcs - Miniatur pohon bambu: Rp. 30.000,-/pcs - Patung dari akar bambu: ± Rp. 50.000-Rp. 400.000,-/pcs - Sangkar burung: ± Rp. 150.000 - Tusuk sate atau tusuk sempol: Rp. 5.800,-/kg
<i>Homestay</i>	Rp. 200.000,-/malam

Sumber: *Arsip Pelaku Wisata Desa Sanankerto, 2018*

Atraksi wisata yang ditawarkan yakni terdapat wahana *outbond*, kolam renang untuk anak, dan kolam terapi ikan. Embung Andeman juga dimanfaatkan sebagai penangkaran ikan hias. Selain itu wisatawan yang berkunjung dapat menikmati keindahan embung dan hutan bambu disekelilingnya dengan menggunakan perahu bebek kayuh dengan tarif Rp. 20.000 serta perahu dengan

tarif Rp. 5000 perorang. Ditengah embung juga terdapat Pulau Sekarsari yang dibentuk taman bunga. Wisata outbond yang ditawarkan yaitu ada flyingfox, serta ATV. Tarif yang dipatok untuk *flying fox* yakni untuk anak-anak dan dewasa sebesar Rp. 10.000 per sekali bermain.

4.4.2 Potensi Budaya

a. Grebeg 1001 Tumpeng Sesucen

Awal mula Ritual Grebeg Tumpeng 1001 Tumpeng Sesucen adalah berasal dari adat istiadat budaya Jawa yang dilakukan oleh petani padi ketika mau masuk musim tanam atau menebar bibit padi atau *ngurit*. Kegiatan tersebut bernama *Slametan Ngurit* yang biasanya para petani membawa tumpeng disekitar pinggir embung. Kemudian tumpeng tersebut didoakan dan dimakan bersama-sama, sehingga mulai tahun 2016 dikemas agar menjadi tuntunan dan tontonan yang bersifat sakral berubah nama menjadi Grebeg Tumpeng 1001 Tumpeng Sesucen Sedekah Bumi Desa Sanankerto.

Gambar 4.5

Kalender *Event* Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 2018


KALENDER EVENT 2018

Maret

- Kreativitas Kostum Karakter
- Upacara Tradisi Jalanidhipuja Pantai Balekambang

April

- Syukuran Pantai Tamban
- Pemilihan Duta Wisata Joko Roro 2018
- Grebeg Tengger Tirto Aji Taman Wisata Air Wendit, Pakis
- Upacara Adat Sesaji Desa dan Tayub

Mei

- Festival Dalang Cilik
- Festival Sinden (Audisi Penyanyi Jawa)

Juni

- Festival Jaranan
- Festival Turi Topeng Malangan
- Festival Bantengan
- Singhasari Surfing International Exhibition

Juli

- Otran-Otran Padhang Bulan
- Tourism Industry Festival
- Road To Malang Jazz
- Eksebsi Jet Ski
- Marathon Beach Sepatu Roda

Agustus

- Pesona Dewi Kabupaten Malang
- Kabupaten Malang Expo
- Kontes Ternak
- Malang Sunset Beach Marathon
- Balap Sepeda Individual Timetrial
- Kirab Budaya
- Festival Warung Ublik, Desa Wisata Pujon Kidul

September

- Upacara Petik Laut Sendangbiru
- Upacara Karo Desa Ngadas
- Gumebyar Pesona Gunung Kawi
- Upacara Suroan Balekambang
- Festival Malang Kota Tua, Lawang
- Lomba Layang-Layang
- Voli Pantai
- Parade Chef

Oktober

- Upacara Bersih Desa Poncokusumo
- Miniatur Truck

November

- Sesueen Sedekah Bumi Sanankerto
- Pesona Gondanglegi
- Upacara Labuhan Pantai Ngliyep
- Panggung Hiburan Hari Jadi Kabupaten Malang Ke- 1258
- JLS Fun Bike
- Dayung dan Perahu Naga

Desember

- Rally Jeep Gathering
- Eksebsi Paralayang

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
Jl. Raya Singosari 275, Singosari, Kabupaten Malang
Telp: 0341-456614, Fax : 0341-456622
disparbud.malangkab.go.id | dsparkabmalang@gmail.com
disparbudkabmalang | Disparbud KabMalang
Dinas Pariwisata Kabupaten Malang

pesona indonesia

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2018

Ritual grebeg tersebut diadakan setahun sekali oleh masyarakat Desa Sanankerto tepatnya pada awal Bulan Suro (Kalender Jawa) atau tanggal satu Muharram (Kalender Hijriyah). Masyarakat Desa Sanankerto bersama perangkat desa melakukan kirab tumpeng menuju makam mbah singorejo dan menuju embung Andeman Boon Pring. Grebeg tumpeng tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah yang telah diberikan.

b. Kesenian Bantengan

Bantengan merupakan kesenian asli daerah Kabupaten Malang tersebut merupakan kesenian yang menggabungkan seni bela diri silat dan juga tari-tarian. Gerak tarian bantengan diambil dari gerakan hewan banteng dan menawarkan unsur magis dalam pertunjukannya. Kesenian bantengan diadakan sebulan sekali di kawasan Embung Andeman. Penggiat kesenain bantengan berasal dari karang taruna Desa Sanankerto.

c. Festival Egrang

Festival egrang merupakan festival yang diadakan setahun sekali yakni diadakan setelah ritual grebeg tumpeng. Festival egrang ini diadakan untuk menarik minat wisatawan untuk berwisata ke kawasan ekowisata yang berbasis sentra bambu.

4.5 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo

Kemandirian suatu desa dapat diukur dari kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa baik dari sisi pemerintahan, pembangunan ataupun kemasyarakatan, oleh karena itu desa dituntut untuk bisa menggali potensi yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengembangan objek pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa tak terkecuali yang dilakukan oleh Desa Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang. Salah satu wisata unggulan yang dimiliki yaitu Embung Andeman dan Hutan Bambu Boon Pring. Dengan wisata unggulan Ekowisata Boon Pring ini, diharapkan mampu mengembangkan dari potensi yang dimilikinya. Dengan dasar tersebut Desa Sanankerto mendirikan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Kerto Raharjo, sebagai pihak pengelola Ekowisata Boon Pring Andeman. Bumdes ini didirikan pada tanggal 27 Maret 2016 dan dilengkapi dengan Peraturan Desa Sanankerto Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Sanankerto.

Visi dan Misi BUMDes Kerto Raharjo yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sanankerto yakni melalui pengembangan usaha ekonomi serta pelayanan sosial dengan moto “**MEMBANGUN DESA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI**”. Selain itu juga memiliki misi yaitu mengembangkan usaha ekonomi melalui pemanfaatan desa wisata dan usaha sektor riil.

Gambar 4.6
Logo BUMDes Kerto Raharjo



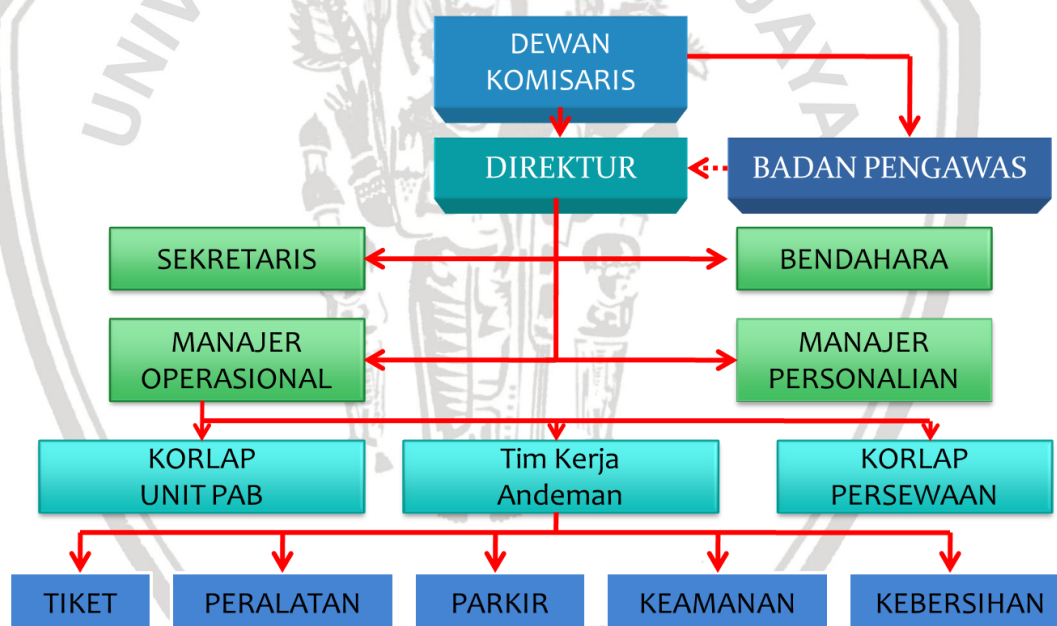
Sumber: *Profil BUMDes Kerto Raharjo, 2018*

Bumdes Kerto Raharjo ini didirikan dengan tujuan yaitu untuk mendorong dan menghimpun seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebelumnya, ekowisata Boon Pring Andeman ini dikelola oleh Pokdarwis, namun karena pengelolaannya yang belum termanajemen rapi baik dari segi keuangan dan organisasi, maka dibentuklah BUMDes selaku pengelola unit usaha ekowisata

Boon Pring Andeman. Selain mengelola wisata alam, BUMDes Kerto Raharjo juga bergerak dalam sektor riil yakni dalam pengelolaan air bersih (PAB), koperasi simpan pinjam, serta penyewaan kios kuliner dan toko. Semua usaha tersebut digunakan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat desa dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Badan Pengelola, dan Badan Pengawas. Berikut bagan struktur organisasi BUMDes Kerto Raharjo:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo



Sumber: *Profil BUMDes Kerto Raharjo, 2017*

4.6 Profil Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis Boon Pring

Kelompok Sadar Wisata merupakan organisasi yang mendukung dalam kegiatan pariwisata di Desa Sanankerto. Kelompok sadar wisata di Desa Sanankerto diberi nama Kelompok Sadar Wisata Boon Pring serta beranggotakan masyarakat

lokal Desa Sanankerto. Pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Boon Pring yakni melalui berbagai kegiatan pembinaan kepada masyarakat lokal.

Tujuan pembentukkan Kelompok Sadar Wisata Boon Pring yakni sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pada bidang pariwisata, meningkatkan produk unggulan wisata, meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata, serta dapat mewujudkan Sapta Pesona meliputi keindahan, kenyamanan, ketertiban, kesejukan, kebersihan, keramahtamahan, dan kenangan.

Pembentukkan Kelompok Sadar Wisata Boon Pring memiliki dasar hukum yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor: 470/18/35.07.09.2013/2014 tentang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Boon Pring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Selain itu juga dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Nomor: 556/77/35.07.108/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2014 S/D 2019.

Organisasi Kelompok Sadar Wisata Boon Pring memiliki bagian-bagian berupa seksi dalam melakukan tugasnya masing-masing. Organisasi ini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta dilengkapi dengan seksi yang membantu dalam pengembangan program desa wisata. Seksi yang terdapat dalam organisasi pokdarwis tersebut yakni antara lain

seksi keamanan, seksi usaha dan jasa, seksi tata ruang dan daya tarik wisata, seksi kebersihan dan keindahan, seksi perlengkapan, dan seksi humas dan pengembangan SDM.

Dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait kegiatan dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Untuk pengelolaan manajemen keuangannya dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo sebagai unit pelaksana dibidang wisata. Memang sebelum adanya BUMDes Kerto Raharjo, Pokdarwis melakukan manajemen keuangan dan disetor kepada Pemerintah Desa Sanankerto. Namun sejak dibentuknya BUMDes Kerto Raharjo maka pengelolaan manajemen keuangan serta teknis di lapangan dilakukan oleh BUMDes. Tidak serta merta Pokdarwis tidak dilibatkan lagi, tetapi anggota Pokdarwis menjadi pegawai karyawan BUMDes.

BAB V

PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA DESA SANANKERTO

Dalam bab lima ini secara terperinci menjawab semua permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah pada bab pertama, yakni menjelaskan proses pembangunan Desa Sanankerto melalui potensi alam ekowisata. Pembangunan Desa tersebut dianalisis menggunakan teori prisma pembangunan berkelanjutan atau *prism of sustainability* milik Spangenberg. Selain itu juga dijelaskan pula mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Desa Sanankerto melalui potensi alam ekowisata.

5.1 Dimensi Lingkungan

Setiap pembangunan wajib memperhatikan keberlanjutan ekologis, sehingga diperlukan peran serta manusia dalam menjaga keberadaan dan kualitas lingkungan. Apapun aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia harus menjaga efisensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak melebihi ambang batas yang wajar. Guna mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka manusia harus belajar dan hidup selaras dengan hukum lingkungan.⁶³

Desa Sanankerto termasuk dalam desa yang cukup melimpah sumber daya alamnya sehingga dapat dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Sanankerto. Sumber daya alam yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam pembangunan tujuan ekowisata yakni Embung Andeman dan Hutan Bambu

⁶³ Chay Asdak. *Op.Cit.* Hlm 41

Boon Pring. Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, Pemerintah Desa Sanankerto bersama elemen masyarakat memiliki kegiatan berupa penyelamatan dan perlindungan ekosistem khususnya pada sumber daya alam Embung Andeman dan Hutan Bambu Boon Pring. Desa Sanankerto mempunyai cara tersendiri dalam menjaga debit air yang ada di embung agar tetap stabil. Masyarakat bersama pihak Pemerintah Desa Sanankerto melakukan upaya konservasi bambu secara berkelanjutan guna menjaga sumber mata air.

5.1.1 Penyelamatan dan Perlindungan Ekosistem (*Protect Eco-systems*)

Manusia merupakan objek serta menjadi subjek dalam pembangunan, hal tersebut karena pada hakikatnya hasil dari pembangunan tentu saja untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap daerah harus digalakkan.⁶⁴ Manusia memiliki hak serta kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan. Hak serta kewajiban sudah diatur sehingga kedudukan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan dapat terlaksana. Indonesia telah mengatur manusia sebagai objek dan subjek pembangunan dalam pengelolaan lingkungan yakni tertuang pada UU No. 32 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pada Bab XI yang didalamnya mengatur hak, kewajiban serta peran dari masyarakat dalam mengelola lingkungan. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan kearifan lokal dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶⁵

⁶⁴ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim. *Op. Cit.* Hlm 23

⁶⁵ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XI Peran Masyarakat Pasal 70

Pembangunan desa ekowisata melalui potensi alam di Desa Sanankerto tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem atau penurunan kualitas lingkungan yakni berupa hutan bambu dan embung desa. Justru sebaliknya, dengan adanya pembangunan desa berbasis ekowisata, kualitas ekosistem semakin menjadi baik, serta kesadaran masyarakat desa yang aktif dan mulai meningkat untuk selalu menjaga kelestarian alam terutama dalam hal melakukan penanaman kembali atau reboisasi pohon bambu. Ekosistem serta alam merupakan syarat mutlak dalam pengembangan ekowisata, hal tersebut telah menggugah masyarakat Desa Sanankerto untuk aktif dan selalu menjaga kelestarian ekosistemnya. Apabila mereka berbuat arif kepada alam, maka alam juga akan memberikan dampak baik pula kepada manusia sebagai subjek serta objek pembangunan.

Dalam pembangunan desa wisata berbasis ekowisata di Desa Sanankerto, pemerintah dan masyarakat desa memiliki upaya penyelamatan dan perlindungan ekosistem khususnya pada ekosistem hutan bambu. Ekosistem hutan bambu Boon Pring merupakan potensi alam salah satunya untuk pemanfaatan sebagai areal tujuan wisata. Upaya konservasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan sumber mata air, karena masyarakat Desa Sanankerto sangat bergantung pada pasokan air yang berasal dari Embung Andeman. Mayoritas masyarakat Desa Sanankerto bermata pencaharian sebagai petani sehingga sangat bergantung pada keberadaan sumber air guna memenuhi pasokan irigasi pada areal pertanian. Selain untuk irigasi pertanian, pemanfaatan air di embung berguna untuk pasokan air bersih bagi masyarakat di Desa Sanankerto. Keberadaan debit air pada embung Andeman ditunjang dari adanya beberapa sumber mata air yang ada di sekitarnya. Sumber

mata air yang ada merupakan siklus dari penyediaan air sehingga sangat bergantung pada kelestarian hutan bambu.

Pemerintah Desa Sanankerto memahami pentingnya sumber mata air yang sangat penting dalam kebutuhan air warga desa dan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada bidang pertanian. Terjadi beberapa kali dari laporan masyarakat sekitar hutan bambu terjadi penebangan bambu liar sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan debit dan sumber mata air. Salah satu warga dari Dusun Kampung Anyar, Bapak Rianto menuturkan bahwa kerap terjadi penebangan bambu secara *illegal* atau tanpa izin dari pemerintah desa. Berikut wawancara dengan Bapak Rianto selaku masyarakat Dusun Kampung Anyar Desa Sanankerto.

“Sekitar tahun 2014-an, itu marak pencurian pohon bambu, jadi itu pohon bambunya yang berasal dari hutan milik desa. Jadi warga dulu sudah biasa nebang bambu, kebanyakan mereka beranggapan, *halah pring e sek akeh, iso cepet tukul e*. (oalah, bambu itu masih banyak, bisa cepat tumbuh). Kebanyakan itu dibuat tusuk sate sama bahan baku untuk duparatus, disini kan memang sentra pengolahan bambu terbesar di Kabupaten Malang.”⁶⁶

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Rianto dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Sanankerto terhadap keberadaan hutan bambu pada tahun 2014 masih sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dengan masih kerap terjadinya pengambilan bambu tanpa izin, keberadaan bambu tersebut masuk dalam wilayah tanah kas milik Desa Sanankerto. Masyarakat masih beranggapan bahwa bambu di hutan bambu sangat melimpah dan banyak. Motif dari mengambil bambu tanpa izin tersebut yakni untuk pemanfaatan bambu menjadi bahan baku pembuatan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Rianto selaku Masyarakat Dusun Kampung Anyar, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 15.20 WIB

tusuk sate, tangkai duparatus, sangkar burung ataupun kerajinan lainnya seperti *tompo* yaitu tempat nasi, dan lain-lain yang bernilai jual ekonomis.

a. Kearifan Lokal Penjaga Hutan Bambu (Waker)

Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari akumulasi pengalaman masyarakat serta pengetahuan lokal. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang berguna antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kearifan lokal juga disebut sebagai pengetahuan yang berdasar pada pengalaman orang-orang secara turun temurun terkadang juga merupakan sebagai tokoh masyarakat lokal.⁶⁷

Secara historis, masyarakat di Desa Sanankerto juga telah lama memiliki kearifan lokal dalam menjaga atau mengamankan aset milik desa yang berada di hutan bambu yaitu adanya Waker atau penjaga hutan bambu. Waker sudah ada sejak tahun 1907 yakni sebelum berdirinya Pemerintah Desa Sanankerto. Waker merupakan warga yang berasal dari Dusun Kampung Anyar karena sangat berdekatan dengan wilayah hutan bambu dan embung desa, sehingga memudahkan untuk memantau atau menjaga hutan bambu. Kewajiban dari seorang waker yaitu melakukan perawatan dan pengawasan terhadap aset atau sumber daya alam yang terdapat di kawasan hutan bambu.

Jumlah waker yang bertugas hanya berjumlah satu orang. Seorang waker dipilih berdasarkan penunjukan oleh Kamituwo Dusun Kampung Anyar dan

⁶⁷ M. Chaezinul Ulum dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press. Hlm 19

Kabayan Desa Sanankerto atau Kaur Pemerintahan, selanjutnya dipilih beberapa kandidat seorang waker dan disahkan oleh Kepala Desa Sanankerto. Dalam melaksanakan tugasnya, waker secara legal dilengkapi oleh Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto tentang Pengangkatan Penjaga Kebun Bambu (Waker) Desa Sanankerto Kecamatan Turen. Masa bakti seorang waker tidak dibatasi sehingga semampu waker dalam menjalankan tugasnya. Dahulu waker memperoleh penghasilan berupa hasil pengelolaan tanah kas desa seluas kurang lebih 2000 m². Tanah kas desa tersebut biasanya dikelola waker menjadi kebun ditanami ketela, singkong, tomat, lombok, dan lain-lain, sehingga hasil dari panen tersebut dapat dijual dan mendapatkan uang. Namun sejak tahun 2014 waker langsung memperoleh upah uang sebesar Rp. 3.000.000/tahun untuk memudahkan dalam penerimaan upah.⁶⁸

Dalam menjalankan tugasnya, waker juga memiliki kendala yaitu, *Pertama*, waker hanya berjumlah satu orang dengan menjaga hutan bambu seluas 36,8 hektar, sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan perawatan hutan bambu. *Kedua*, kurang adanya peraturan khusus yang mengatur sanksi bagi pencuri atau penebangan bambu secara liar. Hal tersebut menyebabkan waker hanya menegur secara lisan atau hanya berupa sanksi sosial sehingga masih marak pencurian bambu.

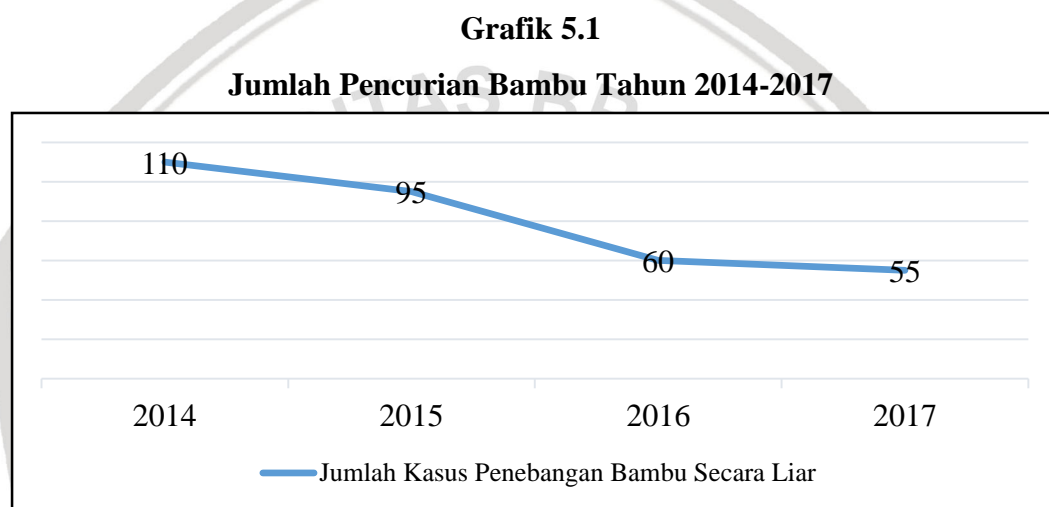
“Sakniki nggeh mung sanksi moral, mek ditegur kaliyan omongan mawon, kan sifat e tasik kekeluargaan, Dados e kan ten mriki kan sentra pengerjain tusuk sate, niku teros e tumbas pring tekan Dalisodo Wagir, tapi kulo nggeh

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bismillatif selaku Kamituwo Dusun Kampung Anyar, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 15.00 WIB

semerap kadang pengerajin niku nggeh ngetok pring tekan alas, tapi kulo nggeh mboten penak, mateni sandang pangan e wong liyo.”⁶⁹

“Untuk saat ini hanya ada sanksi moral, jadi hanya ditegur melalui omongan, karena sifatnya masih kekeluargaan. Jadinya disini kan sentra pengerajin tusuk sate, itu menurutnya beli bambu dari daerah Dalisodo Wagir, tetapi saya tahu terkadang pengerajin itu biasanya mengambil bambu dari hutan, tetapi saya tidak enak, mematikan rezekinya orang lain.”

Berikut adalah grafik jumlah pencurian bambu yang dihimpun waker dari tahun 2014 sampai pada tahun 2017.



Sumber: Bapak Kayat, Bapak Sumanto, Bapak Kliman Penjaga Hutan Bambu Boon Pring (waker), Diolah Peneliti, 2018.

Kasus pencurian bambu dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penurunan. Menurut Bapak Kliman selaku waker pada tahun 2016-2018, modus pencurian bambu dilakukan pada sore hingga malam hari sehingga sulit untuk waker mengetahuinya. Kasus pencurian yang marak terjadi adalah penebangan bambu muda hal tersebut karena bambu muda lebih lentur, mudah dipotong dan nilai jualnya tinggi daripada bambu yang berusia tua.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kliman selaku Penjaga Hutan Bambu atau Waker, pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.10 WIB

⁷⁰ *Ibid.*

Selain pencurian batang bambu, kasus pencurian yang marak yaitu berupa pencurian tunas bambu muda atau rebung. Berikut penuturan Bapak Kliman sebagai waker:

“Biasane nggeh sing pados ilang niku bung e, nek di jangan utowo di pangan dewe kaleh kulo mboten nopo-nopo, nek wes di dol di gawe krecek, lha niku sing gak oleh, bung iku bakal tukul e deling, dadi nek bung e dicolongi deling e gak onok sing tukul, krecek iku larang soal e, per Kg iku sampek Rp. 100 ewu.”⁷¹

“Biasanya ya yang sering dicuri itu rebungnya, kalau dibuat sayur atau untuk dimakan sendiri itu boleh, apabila dijual atau dibuat krecek rebung itu yang tidak boleh, soalnya rebung itu cikal bakal menjadi bambu, jadi apabila rebungnya dicuri maka bambu tidak akan berkembang biak dan tumbuh, krecek rebung mahal harganya apabila dijual, per Kg bisa mencapai Rp. 100 ribu.”

Menurut Bapak Kliman sebagai Waker menjelaskan bahwa rebung juga menjadi sasaran utama pencurian selain batang bambu. Rebung apabila diolah menjadi masakan atau dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri sangat diperbolehkan tetapi dengan izin waker, sedangkan untuk diperjualbelikan sangat dilarang karena akan menghambat cikal bakal bambu tumbuh. Rebung bambu biasanya diolah menjadi *krecek* rebung dengan harga jual Rp. 100.000/Kg.

Ketiga, upah seorang waker sangat sedikit yakni perbulan sebesar Rp. 250.000, sehingga perhari hanya Rp. 8.300. Selain itu pembayaran upah waker juga sering mengalami keterlambatan oleh Pemerintah Desa Sanankerto sehingga Kamituwo Dusun Kampung Anyar menalangi terlebih dahulu upah pembayaran waker.

⁷¹ *Ibid.*

b. Pelaku Utama Konservasi Kelompok Tani Bambu Boon Pring

Guna mengatasi masih maraknya pencurian bambu, Pemerintah Desa Sanankerto mengadakan musyawarah dengan melibatkan Perangkat Desa Sanankerto, anggota BPD, serta tokoh masyarakat untuk membahas mengenai pentingnya dalam menjaga debit air embung.

“Pada tahun 2014-an akhir itu, tepatnya bulan September, kami (Pemerintah Desa Sanankerto) bersama masyarakat, kami kumpulkan untuk membahas rencana kedepannya untuk menjaga sumber mata air, akhirnya dihasilkan dari musyawarah tersebut yakni membuat program konservasi bambu untuk menjaga mata air. Sehingga kami namakan dengan nama Kelompok Tani Boon Pring”⁷²

Hasil musyawarah tersebut menghasilkan berupa putusan untuk melakukan kegiatan konservasi bambu di wilayah sekitar sumber mata air embung. Selain itu diterbitkan pula Peraturan Desa Sanankerto Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Sentra Bambu (Boon Pring) Desa Sanankerto. Dalam perdes tersebut berisi mengenai pembentukan Kelompok Tani Bambu Boon Pring yang bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan sentra bambu. Pelaksanaan pengembangan sentra bambu tersebut bekerjasama dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas (BPDAS Brantas) Provinsi Jawa Timur sebagai pembina dan pengawas.⁷³ Guna menguatkan perdes mengenai pengelolaan sentra bambu Boon Pring, diterbitkan pula Ketetapan Bupati Malang No. 188.48/696/KEP/421.031/2014 yakni menetapkan Boon Pring Andeman sebagai Sentra Bambu Kabupaten Malang.

⁷² Hasil Wawancara dengan Subur selaku Kepala Desa Sanankerto, pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 10.25 WIB

⁷³ Peraturan Desa Sanankerto Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Sentra Bambu (Boon Pring) Desa Sanankerto Bab IV Pengelolaan dan Organisasi Pasal 7

Kelompok Tani Bambu Boon Pring bertugas melakukan konservasi bambu guna melengkapi tugas waker. Secara resmi, Pemerintah Desa Sanankerto menjadikan serta mengukuhkan Kelompok Tani Bambu Boon Pring secara khusus menangani konservasi bambu dengan fungsi, tugas, dan formasi struktur organisasi Kelompok Tani Boon Pring. Pengukuhan tersebut juga didukung dengan SK Kepala Desa Sanankerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani (POKTAN) “Wana Boon Pring.” Selain ditetapkan melalui SK dan perdes, juga disahkan menjadi badan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006090.AH.01.07.Tahun 2017 mengenai Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Boon Pring. Pengesahan menjadi badan hukum tersebut bertujuan supaya mendapat perlindungan hukum, pembinaan, serta fasilitasi dari pemerintah.

Berikut tabel 5.1 menjelaskan perbedaan antara waker dan kelompok tani bambu Boon Pring sebagai pelaku dalam upaya konservasi hutan bambu:

Tabel 5.1
Perbedaan Waker dan Kelompok Tani Bambu Boon Pring

	Waker	Kelompok Tani Bambu Boon Pring
Tahun dibentuk	Mulai tahun 1910	Dibentuk pada tahun 2014
Meknisme pemilihan	Dipilih oleh Kamituwo Dusun Kampung Anyar dan Kabayan (Kaur Pemerintahan) Desa Sanankerto dan disahkan oleh Kepala Desa Sanankerto	Dinisiasi oleh BPDAS Brantas dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pembentukkan pengurus Kelompok Tani Bambu Boon Pring melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat.
Masa kerja	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi

Landasan hukum	Baru sah diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Tahun 2014 Nomor 470/35.07.009.2013/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani (Poktan) “Wana Boon Pring“ - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006090.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Boon Pring
Anggota	Hanya berjumlah 1 orang	Berjumlah 23 anggota, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
Gaji	Rp. 250.000/bulan dibayar oleh Pemerintah Desa Sanankerto	Swadaya
Wewenang kerja	Sebagai penjaga hutan bambu	Sebagai pelaku konservasi, penanaman bibit bambu, melestarikan sumber mata air, dan mengatur serta memperlancar sistem pengairan.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Kelompok Tani Bambu Boon Pring merupakan aktor utama dalam melakukan konservasi hutan bambu guna menjaga bambu dan sumber mata air embung secara berkelanjutan, selain itu juga dilengkapi rencana kerja mengenai konservasi bambu serta pembagian tugas pemeliharaan dan perawatan hutan bambu. Tujuan utamanya yakni pelestarian alam dan yang paling utama adalah pelestarian sumber mata air. Kelompok Tani Bambu Boon Pring ini berfungsi sebagai pelengkap tugas waker yang sudah ada, yaitu dengan pemeliharaan dan perawatan. Dalam struktur organisasi Kelompok Tani Bambu Boon Pring memiliki

seksi penanaman, pembibitan, dan perawatan. Untuk penanaman bibit dilakukan secara bertahap, yakni mengacu pada peta lahan yang dibuat. Berikut penjelasan dari Bapak Djamaludin selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Bambu Boon Pring:

“Kita tidak dapat sewaktu-waktu dapat menanam bibit bambu, untuk saat ini kelompok tani boon pring ini masih *vakum* karena belum ada kegiatan atau penerimaan bantuan bibit bambu, kita hanya mengandalkan bantuan dari pihak luar, untuk pembibitan bambu sendiri disini kurang bisa budidaya pembibitan bambu, ada 3 cara pembibitan bambu, pertama dari biji dan yang kedua dari *camplang* atau sistem stek, dan ketiga menggunakan sistem kultur jaringan tapi prosesnya mahal.”⁷⁴

Bapak Djamaludin menuturkan bahwa dalam penanaman bibit bambu tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, sehingga dalam pelaksanaan penanaman bibit bambu menunggu adanya bantuan bibit bambu dari BPDAS Brantas atau dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dikatakan Kelompok Tani Bambu Boon Pring bersifat insidentil atau hanya pada bantuan bibit bambu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani Bambu Boon Pring hanya mengandalkan bantuan bibit dari pihak luar.

Gambar 5.1

Penanaman Bibit Bambu oleh Kelompok Tani Bambu Boon Pring



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Sanankerto, 2017

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Djamaludin selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Boon Pring Desa Sanankerto, pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 13.40 WIB

Kelompok Tani Bambu Boon Pring merupakan kelompok swadaya dan beranggotakan gabungan tokoh masyarakat, karang taruna, BPD dan perangkat Desa Sanankerto. Anggota Kelompok Tani Bambu Boon Pring terdiri dari 23 anggota yang terdapat ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Berikut nama-nama anggota yang tergabung dalam Kelompok Tani Bambu Boon Pring:

Tabel 5.2
Susunan Pengurus Kelompok Tani Boon Pring

Ketua	Ahmadi	
Wakil Ketua	Djamaludin	
Sekretaris	Dafid Andri Al Imron	
Bendahara	Mansur	
Anggota	1. Aris Wibowo 2. Mahrodi 3. Khafid Muzadi 4. Bejo Kariono 5. Sutrisno 6. Rahmad Al Dian 7. Waseh 8. Sutopo 9. Trio Andi Cahyono 10. Budi Satriono	11. Luqman Al Hakim 12. M. Sulkan 13. Susiadi 14. Subakri 15. Sugiono 16. Ari Wahyudi 17. Sumanto 18. Tuki 19. Suprianto

Sumber: *Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani Boon Pring*

Dari sisi anggaran, Pemerintah Desa Sanankerto memberi dukungan anggaran dan memasukkan kegiatan kelompok tani untuk konservasi bambu ini kedalam APBDes tahun 2016 yakni sebesar Rp. 8.851.000, tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000, dan tahun 2018 tidak ada anggaran untuk kelompok tani. Alasan Pemerintah Desa Sanankerto tidak memasukkan anggaran terhadap kelompok tani karena beralih lebih fokus pada penyertaan modal pada BUMDes, selain itu Pemerintah Desa Sanankerto juga beralasan pada tahun 2018 ini tidak ada bantuan

atau pelatihan dari BPDAS Brantas atau dari Dinas Kehutanan sehingga dapat dikatakan Kelompok Tani Bambu Boon Pring ini kurang berjalan atau bersifat *vakum*.

Dalam menjalankan suatu kelompok atau organisasi pasti memiliki hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut juga dialami oleh Kelompok Tani Bambu Boon Pring yaitu kurang berjalannya Kelompok Tani Bambu Boon Pring. Dilihat dari sisi keberlanjutan kelompok hanya berjalan pada saat terdapat bantuan bibit bambu. Apabila tidak ada bantuan bibit bambu maka kelompok tani tidak berjalan.⁷⁵ Selain itu tidak ada agenda rutin pertemuan kelompok setiap bulannya jadi dapat dikatakan kelompok tani tersebut mati suri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok tani hanya berfokus pada penanaman bambu saja, sedangkan untuk perawatan dan pemanfaatan bambu masih belum ada.

5.1.2 Kerjasama Penyelamatan Lingkungan (*Network to Protect Eco-systems*)

Kerjasama dalam penyelamatan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya kongkret dalam memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Dalam program penyelamatan lingkungan dibutuhkan peran dan kerjasama antar beberapa pihak atau stakeholder. Tidak hanya pemangku kepentingan saja yang berperan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Oleh karenanya, kerjasama dalam pengelolaan dan penyelamatan lingkungan sangat membutuhkan pihak-pihak yang terlibat langsung.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Hilda selaku Analis Kehutanan dan Lahan – Rehabilitasi Hutan dan Lahan, UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 13.20 WIB

a. Kerjasama Konservasi Hutan Bambu dengan BPDAS Brantas

Upaya kerjasama dalam penyelamatan lingkungan juga dilakukan di kawasan ekowisata Desa Sanankerto yakni melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak pemerintah yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang saat ini berubah menjadi UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas atau biasa disingkat BPDAS Brantas. Upaya yang dilakukan masyarakat dan BPDAS Brantas yakni melakukan konservasi vegetatif yakni dengan membuat Rencana Model Hutan Bambu di kawasan hutan bambu Boon Pring dan sebagai areal bambu berbasis konservasi dan ekowisata.⁷⁶

Awal mula Pemerintah Desa Sanankerto menjalin hubungan kerjasama dengan BPDAS Brantas yakni pada tahun 2015 pada saat melakukan peresmian Desa Wisata Boon Pring Andeman. Peresmian tersebut mengundang Bupati Malang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Gayung bersambut, kemudian Dinas Kehutanan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BPDAS Brantas guna menjadi penghubung kerjasama antara BPDAS Brantas dengan Pemerintah Desa Sanankerto. Pihak desa mulai bekerjasama dengan BPDAS Brantas pada tahun 2015 yakni kerjasama reboisasi bambu dan perbaikan lingkungan khususnya di wilayah hutan bambu dan embung andeman. Kerjasama tersebut belum berbentuk MoU atau lembar kerjasama secara legal.

Kawasan hutan bambu Boon Pring di Desa Sanankerto kemudian didapuk menjadi pusat pengembangan *arboretum* bambu sekaligus dapat dikembangkan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Imam Sulistianto selaku Staf Pengendali Ekosistem Hutan BPDASHL Brantas Sampean, Buduran-Sidoarjo, pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 10.05 WIB

sebagai daerah tujuan ekowisata yang menghasilkan produksi wisata dan sebagai sumber aneka bibit bambu yang khusus dan langka untuk dikembangkan oleh kelompok tani atau kelompok konservasi.⁷⁷

Gambar 5.2

BPDAS Brantas Memberi Bantuan Bibit Bambu Pada Saat *Launching* Desa Ekowisata Sanankerto



Sumber: Arsip Pemerintah Desa Sanankerto, 2015

Kerjasama penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh BPDAS Brantas sangat mendukung program pengembangan desa wisata di Sanankerto yakni desa wisata yang berwawasan lingkungan atau ekowisata. Tahun 2015 dimulai sebagai tahun pertama BPDAS Brantas mulai memberikan bantuan bibit bambu. Berikut secara rinci tabel 5.2 mengenai bantuan BPDAS Brantas pada tahun 2015.

Tabel 5.3

Bantuan BPDAS Brantas Sumber Dana APBN Tahun 2015

⁷⁷ BPDAS Brantas. 2014. *Rencana Pembentukan Sentra Bambu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Kabupaten Malang Jawa Timur Tahun 2014*. Malang: Tim Penyusun RPS Bambu BPDAS Brantas. Hlm 28

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Tahun 2015,
Hlm 47

No	Lokasi (kec./desa)	Sumber Dana	Vol. (Ha)	Tanaman (btg)	Kel. Tani Pelaksana
1.	Bantur – Rejosari	APBN	20	Sengon 3300 Nangka 3300 Sirsat 2200 Porang 1500 Jahe 200	Mulyosari
2.	Karangploso – Ngenep	APBN	20	Sengon 3300 Alpukat 5500 Jahe 10	Mulia
3.	Jabung – Argosari	APBN	20	Sengon 3300 Alpukat 3300 Sirsat 2200 Jahe 500	Usaha Maju II
4.	Wonosari – Sumbertempur	APBN	20	Sengon 3300 Cengkeh 5500 Jahe 100	Sido Makmur
5.	Wonosari – Sumberdem	APBN	20	Sengon 3300 Cengkeh 5500 Jahe 100	Ngudi Makmur I
6.	Wagir - Dalisodo	APBN	10	Bambu Petung 4000	Andini
7.	Turen – Sanankerto	APBN	10	Bambu Petung 4000	Boon Pring

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Malang pada tahun 2015, Desa Sanankerto memperoleh bantuan pelestarian lingkungan pertama kali oleh Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Brantas (BPDAS Brantas). Bantuan pelestarian lingkungan tersebut meliputi bibit bambu petung berjumlah 4000 batang. Untuk anggaran bantuan bibit tersebut berasal dari APBN tahun 2015. Mekanisme penyaluran bantuan bibit tersebut yakni BPDAS Brantas menyalurkan bantuan tersebut melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan kemudian disalurkan langsung kepada Desa Sanankerto melalui Kelompok Tani Bambu Boon Pring atau menggunakan sistem *dropping*.

Tahun 2016 sebagai tahun kedua yaitu pemeliharaan bambu tahun pertama. Pemeliharaan tahun pertama yakni meliputi pemeliharaan seperti pendangiran dan pemangkasan. Tahun 2017 sebagai tahun ketiga yakni pemberian bibit sulaman. Bibit sulaman yakni bibit yang pada saat penanaman mati atau tidak tumbuh sehingga diganti dengan bibit yang baru. Pada tahun tersebut BPDAS Brantas membantu bibit sulaman kepada Desa Sanankerto sebanyak 2000 bibit bambu⁷⁸, secara terinci disajikan dalam tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.4
Penyediaan Bibit dan Lokasi Percontohan Penyuluhan Kehutanan
Pengkayaan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan Tahun 2017

No	Lokasi		Jenis Bibit	Jumlah Bibit (btg)	Kelompok Penerima Bibit	Nama PK pendamping
	Kab/Kota Kecamatan	Desa				
Kab. Malang				76.500		
1	Kasembon	Pait	Sengon Bambu	9.060 2.000	Pokmas Sumber Sari	Johan Anwar
2		Wonoagung	Sengon	9.070	Pokmas Sejahtera	Johan Anwar
3		Pondokagung	Sengon	9.070	Pokmas Agung Lestari I	Johan Anwar
4	Donomulyo	Sumberoto	Sengon	9.060	KPHR Sumber Wana Abadi	Sukirno
5	Ampelgading	Wirotaman	Sengon	9.060	KTH Sumarah	Teguh Santoso
6	Dampit	Baturetno	Sengon	9.060	KTH Sari Tani	Lindriyawati
7	Karangploso	Donowarih	Sengon	9.060	KTH Sumber Rejeki VI	Supratiknyo
8	Gedangan	Sindurejo	Sengon	9.060	KTH Tri Tunggal	Supar

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Imam Sulistianto. *Op.Cit.*

9	Turen	Sanankerto	Bambu	2.000	KTH Wana Boon Pring	Supar
---	-------	------------	-------	-------	---------------------------	-------

Sumber: *Laporan Akhir Tahun Seksi Konservasi, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V Provinsi Jawa Timur, Tahun 2017, Hlm. 4*

Pada tahun 2017, BPDAS Brantas memberikan bantuan bibit bambu kepada Desa Sanankerto sebanyak 2000 batang bibit bambu jenis bambu jawa. Selain memberikan bantuan bibit bambu, BPDAS Brantas juga memberi pelatihan dan fasilitasi mengenai edukasi mengenai penanaman, manajemen rumpun bambu, serta pemanfaatan bambu.

“Bukan hanya memberi bantuan bibit terus nanam sudah terus ditinggal, tidak seperti itu, kita ada bimbingan teknis seperti pengolahan bambu, penanaman bambu, serta perawatan bambu, tetapi itu selama pada kegiatan berjalan nah setelah itu tidak ada lagi. Bimbingan teknis pada waktu pelaksanaan dilakukan 2 kali, biasanya dilakukan di awal dan pertengahan, nanti kalau di akhir masuk orang evaluasi.”⁷⁹

Pelatihan tersebut berupa bimbingan teknis dalam pelaksanaannya dilakukan 2 kali, dilakukan di awal dan pertengahan. Bimtek tersebut dilaksanakan di Hotel Permai Batu pada tahun 2016 dan diikuti sebanyak 30 orang dari anggota kelompok tani bambu Boon Pring.

5.2 Dimensi Ekonomi

Menurut Spangenberg, dalam dimensi ekonomi yang berkelanjutan wajib menjaga sumber daya kapital yakni terutama SDA. Oleh karena itu diperlukan langkah yakni melalui efisiensi sumber daya alam atau disebut Ekoefisiensi baik sumber daya alam mudah diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Korelasi tersebut

⁷⁹ *Ibid.*

meningkat pada hubungan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi pendapatan dan terciptanya lapangan pekerjaan.⁸⁰

5.2.1 Efisiensi Kapital Sumber Daya Alam (*Capital Efficiency*)

Awalnya manusia memiliki pandangan bahwa sumber daya alam tidak akan habis dan akan selalu tersedia di alam. Paradigma tersebut harus diubah menjadi sumber daya alam yang dimanfaatkan merupakan suatu titipan untuk anak cucu kita selanjutnya dan harus dijaga guna masa yang akan datang. Sebagai modal dasar dalam pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus memperhatikan beberapa aspek terpenting yaitu tidak melampaui daya dukung lingkungan atau ekosistem dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyelaraskan kebutuhan manusia serta bijak dalam mengolah ketersediaan sumber daya alam.

a. Lunturnya Adat *Brubuh*

Ekoefisiensi merupakan suatu konsep efisiensi berguna untuk meminimalkan penggunaan bahan baku, air, serta energi yang berguna untuk mengurangi dampak lingkungan per unit produk.⁸¹ Pemanfaatan hutan bambu oleh masyarakat di Desa Sanankerto khususnya pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengerajin bambu merupakan hal yang penting dan tidak terlepas dalam penggunaannya.

Konsep ekoefisiensi sudah diterapkan sejak lama oleh nenek moyang di Desa Sanankerto. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya adat istiadat turun temurun

⁸⁰ Joachim H Spangenberg. 2004. *Op.Cit.* Hlm 13-14

⁸¹ Amos Neolaka. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 39-40

yakni *Brubuh*. Adat *brubuh* adalah sistem atau tata cara penebangan bambu secara tradisional. Dalam adat *brubuh*, penebangan bambu menggunakan perhitungan kalender pertanian jawa yang biasa disebut *Pranata Mangsa*. Sistem *brubuh* menerapkan konsep menebang bambu dengan memperhatikan musim-musim tertentu, sehingga tidak dilakukan sembarangan waktu. Dalam kalender musim *pranata mangsa* terdiri dari 12 musim, dan musim yang paling cocok untuk dilakukan sistem *brubuh* yakni biasanya dilakukan pada musim ke 9, 10, 11, dan biasanya jatuh pada bulan Maret hingga pertengahan Mei.⁸²

Pada musim ke 9 atau *kesongo* masuk pada tanggal 1 Maret hingga 25 Maret dengan ditandai tanaman padi mulai berbunga serta sering terdengar suara jangkrik dan kumbang. Untuk musim ke 10 atau *kesepuluh* terjadi pada tanggal 26 Maret sampai 18 April dan ditandai dengan padi sudah mulai menguning. Selanjutnya pada musim ke 11 atau *kesewelas* jatuh sekitar pada tanggal 19 April sampai 11 Mei serta ditandai dengan buah randu yang bermekaran.⁸³ Apabila dilakukan penebangan bambu saat musim ke 9 sampai ke 11, maka bambu yang dihasilkan memiliki kandungan lignin yang terendah sehingga memiliki kelenturan yang tinggi dan tidak mudah dimakan serangga. Sistem *brubuh* apabila dilaksanakan dengan betul-betul maka akan mampu menjaga kelestarian hutan bambu yang ada di hutan Boon Pring.

Namun nyatanya, kendala saat ini yang dihadapi yakni lunturnya sistem adat *brubuh* dalam kehidupan masyarakat di Desa Sanankerto. Masyarakat mulai meninggalkan sistem *brubuh* ataupun tidak mengetahui dan memahami sistem

⁸² Hasil Wawancara dengan Kliman. *Op.Cit.*

⁸³ *Ibid.*

brubuh. Mereka beranggapan bahwa sistem *brubuh* menghambat pasokan bahan baku bambu. Faktor utama penyebab lunturnya adat *brubuh* yaitu faktor ekonomi, yakni adanya peningkatan permintaan akan produksi pengerajin tusuk sate, tusuk sempol, dan tangkai duparatus. Permintaan tersebut mencapai 10 kilogram tusuk sate perharinya. Bahan baku bambu yang digunakan yakni mencapai 3-5 bambu perharinya dengan ukuran panjang bambu 4-5 meter.⁸⁴

*“Ten mriki wes gak onok mas brubuh niku, biyen niku onok mas adat brubuh, sakniki wes gak usum, soal e kenopo, brubuh iku kan ngetok deling utowo kayu pas mangsa ketigo, biasane niku pas april mas, nek nuruti brubuh aku gak iso produksi sunduk sate mas.”*⁸⁵

“Disini sudah tidak berlaku adat *brubuh*, dahulu memang ada adat *brubuh*, saat ini tidak digunakan lagi, soalnya kenapa, *brubuh* itu kan menebang bambu atau kayu ketika pada musim kemarau, biasanya pada bulan April mas, kalau masih memakai adat *brubuh* saya tidak bisa produksi tusuk sate mas.”

Pernyataan Bapak Sulaiman selaku pengerajin tusuk sate yakni sistem *brubuh* justru menghambat pekerjaannya sebagai pengrajin tusuk sate, sebab adat *brubuh* mewajibkan memotong bambu hanya pada saat musim tertentu yakni pada musim kemarau khususnya pada bulan maret sampai mei. Hal tersebut menyebabkan pasokan bambu tidak dapat sewaktu-waktu dan dibutuhkan setiap saat sebagai penunjang produksi kegiatan pengerajin tusuk sate, tusuk sempol, tangkai duparatus, dan lain-lain.

Apabila dilakukan estimasi, setiap hari pengerajin membutuhkan paling tidak minimal 3 batang bambu untuk bahan baku kerajinan, sedangkan di Dusun Kampung Anyar terdapat 70 pengerajin. Sehingga tiap hari para pengerajin

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku Pengerajin Bambu, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 15.20 WIB

⁸⁵ *Ibid.*

membutuhkan 210 batang bambu yang digunakan untuk bahan baku produksi. Keberadaan tersebut juga sangat mengancam keberadaan hutan bambu. Pihak Pemerintah Desa Sanankerto menyadari akan hal tersebut bahwa mayoritas warga Dusun Kampung Anyar rata-rata bermata pencaharian sebagai pengerajin bambu.

Guna melindungi alam dan keberlangsungan masyarakat dalam kegiatan ekonominya, maka Pemerintah Desa Sanankerto menerbitkan perdes mengenai penetapan kawasan hutan bambu yakni membatasi penebangan bambu sebesar 30% untuk pengolahan bambu produksi digunakan hasil industri seperti kerajinan, tusuk sate dan anyaman. Dalam pemanenan atau menebang bambu di kawasan hutan tidak dilakukan secara asal, namun penebangan harus jauh dari sumber mata air, waduk, dan sungai, yaitu paling tidak 50-200 meter dari bibir sungai atau sumber mata air.⁸⁶ Dalam perdes tersebut juga tidak mengatur secara jelas sanksi bagi para pencuri bambu atau rebung bambu.⁸⁷ Dengan demikian dikhawatirkan para pelaku pencurian bambu tidak mendapatkan efek jera atau sanksi terkait perbuatannya.

b. Zonasi Pembangunan di Kawasan Ekowisata

Dalam prakteknya, pengelolaan ekowisata di Desa Sanankerto berencana melakukan zonasi kawasan pengembangan dan kawasan konservasi hutan bambu dan mata air. Zonasi kawasan pengembangan wisata terbagi menjadi 6 zonasi yakni meliputi, zona agrowisata, zona ekowisata Boon Pring, zona ekowisata hutan bambu, zona *homestay* atau penginapan, zona industri telur asin asap, dan zona

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sugiono selaku Sekretaris Desa Sanankerto, pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 13.11 WIB

⁸⁷ Peraturan Desa Sanankerto Nomor: Tahun 2015 tentang Pengelola'an Sentra Bambu (Boon Pring) Desa Sanankerto Bab IV Pasal 9

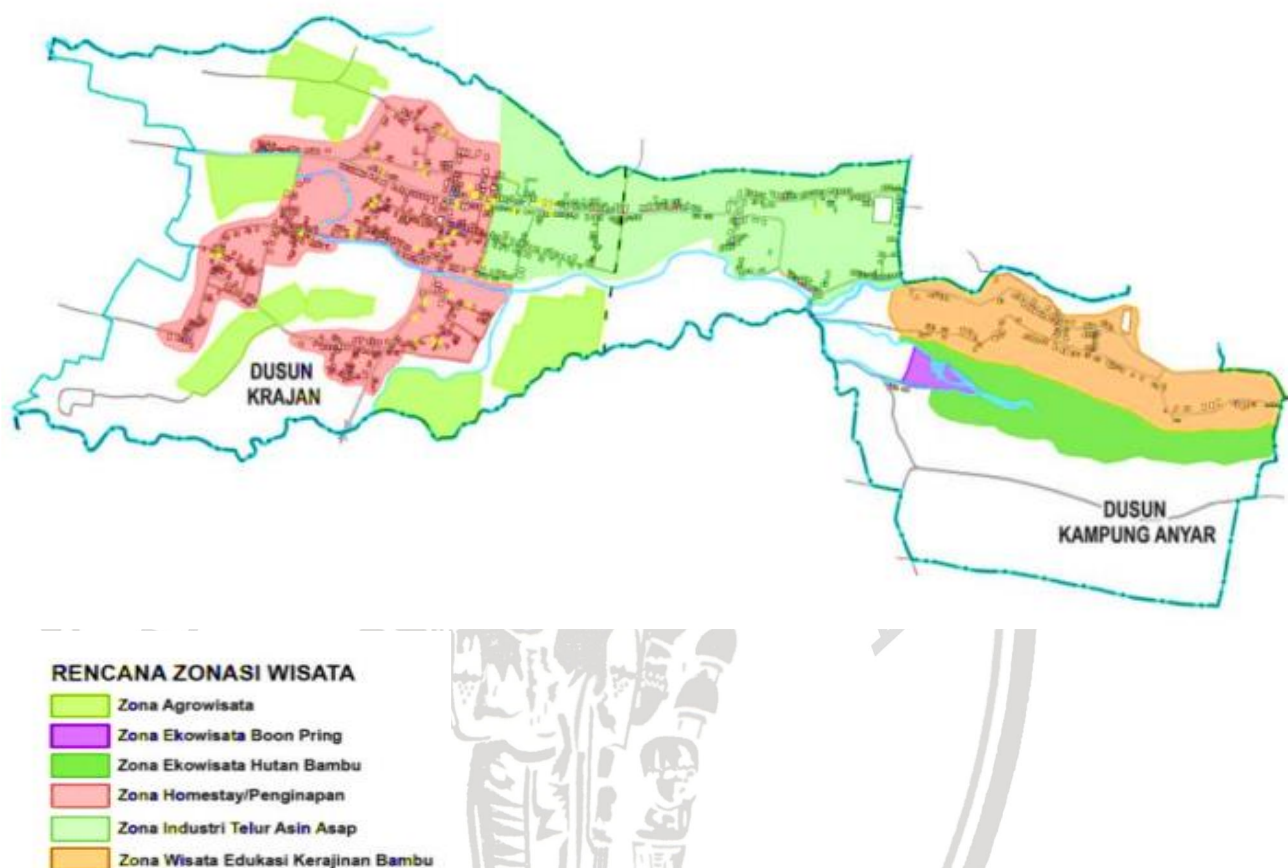
wisata edukasi kerajinan bambu. Berikut penuturan Bapak Subur mengenai rencana pengembangan kawasan ekowisata di Desa Sanankerto:

“Di wisata Boon Pring Andeman, dari sekian wilayah itu sudah di peta yang sebelah barat wisata modern yang di sebelah timur dan tengah itu untuk ekowisata artinya wisata yang benar-benar masih mempertahankan alam sehingga kita berusaha tidak memasukkan besi dan semen kedalam situ. Terus yang paling timur itu benar-benar tidak boleh disentuh oleh apapun, artinya silahkan untuk dibuat wisata tapi tidak boleh merubah sekecilpun alam disitu, itu sudah jadi kesepakatan”⁸⁸

Menurut penuturan Bapak Subur selaku Kepala Desa Sanankerto, dalam pengembangan dan pembangunan kawasan di sekitar ekowisata Boon Pring Andeman dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan wisata modern berada di sebelah timur, meliputi kolam renang anak, warung-warung penjual makanan, parkir, toilet, dan prasarana lainnya. Untuk daerah yang berlokasi di timur yakni meliputi hutan bambu dibiarkan alami, tidak memasukkan unsur besi dan semen dalam pengembangan di wilayah hutan bambu.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Subur. *Op.Cit.*

Gambar 5.3
Peta Rencana Zonasi Ekowisata Boon Pring Andeman Desa
Sanankerto



Sumber: *Arsip BUMDes Kerto Raharjo, 2018*

Hal tersebut berbeda dengan penuturan Bapak Imam Sulistianto selaku Staf Pengendali Ekosistem Hutan yang menyatakan bahwa pengembangan di areal ekowisata sudah menyalahi konsep ekowisata.

“Disana juga katanya mau dibuat wisata air *water boom*, ya iya disana gak bakal kekurangan air karena debitnya luar biasa, tapi kalau saya lho gak setuju, apabila dibuat wisata air modern seperti *water boom*, kan sudah menyalahi konsep pembangunan desa wisata berbasis ekowisata, malah kedalamnya di paving kok, *mosok* (masak) ekowisata dipaving, kan konsep ekowisata tidak mengubah atau menambah kawasan dengan elemen seperti semen, besi, tapi

paving kan juga dari semen, itu kan dari Kemendes, jadi ya seneng-seneng aja dibantu.”⁸⁹

Menurut penuturan Bapak Imam Sulistianto bahwa dirinya tidak setuju apabila pembangunan fisik yang dilakukan BUMDes yakni membangun wahana wisata air *water boom* di kawasan ekowisata. Selain pembangunan wahana wisata air *water boom*, juga sudah dibangun paving di wilayah masuk kedalam kawasan hutan, hal tersebut sudah menyalahi konsep pariwisata berbasis ekowisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sanakerto, yakni tidak memasukkan elemen semen atau besi ke dalam area hutan bambu.

Menanggapi dua argumen di atas, bahwa pembangunan kolam *water boom* di areal ekowisata Boon Pring Andeman telah melanggar pengelolaan wisata berbasis ekowisata. Pada prinsipnya, ekowisata merupakan bentuk wisata yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan serta bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberikan manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan kebudayaan masyarakat setempat.⁹⁰ Walaupun pembangunan kolam *water boom* dapat menambah daya tarik dan minat wisatawan untuk berkunjung, tetapi konsep ekowisata yang menjadi *embel-embel* sangat tidak sesuai dengan adanya wisata buatan. Selain itu jarak pembuatan kolam *water boom* dengan hutan bambu juga sangat dekat sehingga memungkinkan dilakukan penebangan disekitar hutan bambu apabila dilakukan perluasan pembangunan kolam *water boom*.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Imam Sulistianto. *Op.Cit.*

⁹⁰ Chafid Fandeli. 2000. *Pengertian Dan Konsep Dasar Ekowisata: Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hlm 2

5.2.2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto merupakan salah satu wujud nyata pembangunan ekowisata yang fokus pada aspek ekonomi khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Adanya potensi alam ekowisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa Sanankerto bersama masyarakat bergotong royong memerangi kemiskinan yang terdapat di desa tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dibuktikan dengan adanya lapangan kerja baru yang disebabkan adanya desa wisata. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Bukan hanya yang dirasakan oleh masyarakat yang memang bekerja di bidang desa wisata seperti pegawai ataupun karyawan BUMDes saja, tetapi juga berdampak positif bagi sebagian masyarakat lokal. Peningkatan perekonomian tersebut ditandai dengan adanya perluasan tenaga kerja yakni sebagai berikut:

Tabel 5.5

Lapangan Pekerjaan Pembangunan Ekowisata Desa Sanankerto

Lapangan pekerjaan yang muncul setelah adanya pembangunan desa ekowisata	Jumlah (orang)
Pengurus pokok BUMDes Kerto Raharjo	9
Karyawan BUMDes	46
Pengerajin kerajinan bambu	70
Pemilik <i>Homestay</i>	9
Total	134

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 5.5 mengenai lapangan pekerjaan yang muncul akibat adanya pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto yakni terdapat 6 jenis lapangan kerja yakni pengurus pokok BUMDes berjumlah 9 orang, karyawan BUMDes berjumlah 46 orang, pengerajin bambu berjumlah 70 orang, pemilik *homestay*

berjumlah 9 orang, dan pedagang warung dan pedagang kaki lima di kawasan ekowisata berjumlah 50 orang. Penjelasan selengkapnya dipaparkan sebagai berikut:

a. Pegawai dan Karyawan BUMDes

Keberadaan BUMDes Kerto Raharjo telah membuka lapangan kerja serta akses ekonomi untuk masyarakat Desa Sanankerto. BUMDes Kerto Raharjo dapat memberdayakan masyarakat sekitar, tetapi tidak secara semua masyarakat tercover oleh manfaat adanya BUMDes. Karyawan BUMDes merupakan yang dulunya anggota kelompok Pokdarwis yang dahulu mengelola wisata kawasan Boon Pring Andeman. BUMDes Kerto Raharjo memiliki 9 orang pengurus pokok dan 46 orang sebagai karyawan BUMDes. Setelah adanya BUMDes Kerto Raharjo, pengelolaan wisata dilakukan BUMDes dan anggota Pokdarwis sebagai karyawan lapangan BUMDes. Gaji untuk karyawan BUMDes harian sekitar Rp. 70.000/perhari dan uang makan untuk satu kali sebesar Rp. 10.000. Karyawan BUMDes Kerto Raharjo menggunakan sistem kerja rotasi untuk tiap harinya.⁹¹

b. Pengerajin Bambu

Selain peningkatan kesempatan kerja, pembangunan desa wisata di Desa Sanankerto juga telah melahirkan beberapa jenis usaha baru baik di sektor pariwisata, maupun bentuk usaha pendukung yakni salah satunya yaitu para pengerajin bambu. Jumlah paling banyak lapangan pekerjaan yang muncul setelah adanya pembangunan desa ekowisata tersebut berjumlah 70 orang. Sebelumnya

⁹¹ Hasil wawancara dengan Miseno selaku Anggota Seksi Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis Boon Pring, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 13.30 WIB

yakni pada tahun 2016, jumlah pengerajin berjumlah 48 orang, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengerajin sebesar 22 orang. Para pengerajin bambu tersebut banyak terdapat di Dusun Kampung Anyar dan dijuluki sebagai Kampung Wisata Edukasi Kerajinan Bambu. Terdapat 2 kelompok galeri pengerajin yakni Armatur Art (Dusun Krajan) dan Kerto Mulyo (Dusun Kampung Anyar). Galeri tersebut berfungsi sebagai wadah bagi pengerajin untuk tempat menjual serta memamerkan hasil kerajinannya. Berikut secara rinci dan harga jual dari kerajinan bambu:

Tabel 5.6
Harga Jual Kerajinan Bambu

No.	Jenis Kerajinan	Harga Jual
1.	Replika kapal pinisi	Rp. 200.000,-
2.	<i>Tempeh/ tompo</i>	Rp. 35.000,-
3.	Asbak limbah bambu	Rp. 10.000,-
4.	Lampu petromak bambu	Rp. 40.000 - 120.000,-
5.	Tas anyaman bambu	Rp. 80.000,-
6.	Patung ukiran dari akar bambu	Rp. 50.000 - 400.000,-
7.	Hiasan miniatur pohon bambu	Rp. 30.000,-
8.	Tusuk sate/ tusuk sempol	Rp. 5.800,-/Kg
9.	Tangkai duparatus	Rp. 4.500,-/Kg
10.	Sangkar burung	Rp. 150.000,-

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Sebelum adanya pembangunan desa ekowisata masyarakat di Dusun Kampung Anyar bermata pencaharian sebagai pengerajin tusuk sate dan tangkai duparatus. Setelah adanya desa ekowisata, para pengerajin bambu berinovasi menggunakan limbah produksi tusuk sate dan duparatus menjadi kerajinan lokal yang bernilai ekonomis. Pengerajin memanfaatkan bagian bambu seperti *bongol* atau akar bambu, ruas bambu, serta juga ranting bambu atau masyarakat lokal menyebutnya *carang*. Limbah bambu tersebut dikreasikan menjadi kerajinan

seperti asbak bambu, replika kapal pinisi, hiasan miniatur pohon bambu dan lain-lain.

Gambar 5.4

Gubug Ruang Pamer Hasil Kerajinan Bambu di Dusun Kampung Anyar



Sumber: *Dokumentasi Peneliti, 2018*

Pengerajin bambu melalui kelompok galeri pengerajin mendapat bantuan alat-alat ukir yang berasal dari BPDAS Brantas dan alat pahat, kompresor, dan alat bor dari Kementerian Pariwisata.⁹² Bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan pengerajin guna mendukung perekonomian masyarakat khususnya pengerajin serta dapat memanfaatkan potensi dari adanya desa ekowisata.

“Ya gak mesti mas, biasanya ya sekitar Rp. 1,5 itu kalau sepi, kalau rame bisa sampai 4 juta mas itu sudah bersih, itu sudah dikurangi sama beli bambunya.”⁹³

Dari penjelasan Mas Totok selaku pengerajin bambu memaparkan bahwa laba bersih dari penjualan dari kerajinan bambu tersebut dalam sebulan mencapai sekitar Rp. 1,5 juta, apabila sedang ramai pemesanan bisa mencapai Rp. 4 juta perbulannya. Terdapat atraksi dalam pembuatan kerajinan bambu yang terdapat di

⁹² Hasil wawancara dengan Totok selaku Pengerajin Bambu Galeri Armatur Art, pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 14.30 WIB

⁹³ *Ibid.*

RT 19 dan 23 yakni di Dusun Kampung Anyar. Para pengerajin bambu di kedua RT tersebut memanfaatkan limbah bambu menjadi produk kerajinan. Limbah bambu tersebut hasil dari mata pencaharian utamanya yakni sebagai pembuat tusuk sate, tusuk sempol, dan tangkai duparatus. Produk kerajinan dari limbah bambu dibuat menjadi asbak, lampion berbentuk petromak, replika kapal pinisi, replika pohon bambu dan gantungan kunci. Wisatawan dapat mengunjungi para pengerajin untuk melihat ataupun belajar mengetahui proses cara membuatnya. Melalui Pokdarwis juga memperlihatkan aktivitas pembuatan topeng dari limbah akar bambu. Para wisatawan dapat belajar cara pembuatannya serta juga dapat langsung membeli guna dijadikan buah tangan.

Tabel 5.7
Data Penghasilan Pengerajin Bambu Desa Sanankerto

No.	Pengerajin Bambu	Pendapatan Perbulan
1.	Tusuk sate	Rp. 1.500.000
2.	Tangkai duparatus	Rp. 1.500.000
3.	Peralatan Masak berbahan baku bambu (Tampo, Tempeh)	Rp. 1.000.000
4.	Sangkar burung	Rp. 1.800.000
5.	Pengerajin topeng dan patung berbahan baku akar bambu	Rp. 1.500.000 – Rp. 4.000.000
6.	Pengerajin asbak, hiasan replika pohon bambu, gantungan kunci berbahan baku bambu, lampu petromak, tas anyaman bambu, kapal pinisi, dan hiasan lainnya.	Rp. 900.000

Sumber: *Diolah Peneliti, 2018*

Dari tabel 5.7 terkait data penghasilan pengerajin bambu di Desa Sanankerto dapat diamati bahwa rata-rata penghasilan para pengerajin bambu perbulan berkisar Rp. 1.300.000. Besaran penghasilan tersebut sudah bersifat bersih dan sudah dikurangi oleh beban produksi pembelian bahan baku bambu. Para pengerajin

bambu menjual hasil kerajinannya kepada tengkulak atau pengepul. Selain itu ada yang langsung dijual di rumah-rumah penduduk langsung.

c. Pemilik *Homestay*

Pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto juga memperhatikan sarana serta prasarana pendukung guna kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Dukungan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekowisata tidak berlebihan, yakni memanfaatkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atau *social culture*. Jadi dalam pengembangan *homestay* di Desa Sanankerto memanfaatkan rumah-rumah warga yang layak dan mau untuk dijadikan *homestay*. Selain itu rumah warga yang dijadikan *homestay* menggunakan bahan baku bambu. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pedesaan dan kearifan lokal warga sekitar dalam pemanfaatan bambu. Pendataan dan pembentukan *homestay* difasilitasi oleh Pokdarwis. Berikut jumlah *homestay* yang terdapat di Desa Sanankerto:

Tabel 5.8
Data Jumlah *Homestay* di Desa Sanankerto

No.	Nama <i>homestay</i>	Dusun
1.	Homestay Tutul Boonpring	Kampung Anyar
2.	Rudi Homestay, Boonpring Turen	Kampung Anyar
3.	Homestay Bambu Jawa, Oelang Cahyono	Krajan
4.	Homestay ORI, Jakfar	Kampung Anyar
5.	Homestay Ampel, Minanti	Krajan
6.	Homestay Petung, Sukadi	Krajan

Sumber: *Arsip Pemetaan Homestay, Pokdarwis Boon Pring, 2017*

Terdapat 6 *homestay* yang tersebar di 2 dusun dapat dikatakan penyebaran *homestay* sudah merata. Tarif yang dikenakan sekali menginap yakni sebesar Rp.

1.000.000,- maksimal 6 orang dan mendapat fasilitas kamar tidur serta makanan sehari 3 kali.

“Untuk *homestay* sementara ini masih naik turun, pengunjung yang menginap masih minim. Mungkin 1 bulan hanya ada 1 sampai 2 orang saja. Kalau ada studi banding BUMDes atau kunjungan dari luar, biasanya ya lumayan, bisa membawa satu bis rombongan, kalau dari wisatawan lokal jarang yang menginap.”⁹⁴

Dari penjelasan Mas Oelang Cahyono selaku pemilik *homestay* Bambu Jawa menuturkan bahwa wisatawan yang menginap di *homestay*-nya jarang sekali, biasanya *homestay* laris apabila terdapat kunjungan dari luar daerah yang studi banding mengenai BUMDes yang membawa satu rombongan bis. Penyebab *homestay* kurang ada peminatnya yaitu rata-rata wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan domestik sekitar area Malang Raya, sehingga tidak ada pemakai jasa *homestay*.

5.3 Dimensi Sosial

Pembangunan berkelanjutan menurut Spangenberg yakni memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dalam dimensi sosial, terdapat dua indikator dalam aspek sosial yaitu pemerataan dan keadilan (*Equity*) dan pelibatan masyarakat secara langsung melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap evaluasi. Berikut detail penjelasan dari aspek dimensi sosial:

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Oelang Cahyono selaku Pemilik *Homestay* Bambu Jawa, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 14.10 WIB

5.3.1 Pemerataan dan Keadilan Sosial (*Equity*)

Manusia menjadi objek serta subjek dalam proses pembangunan, sebab tujuan dan sasaran hasil pembangunan secara jelas untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu aspek kesejahteraan yang adil dan merata wajib diupayakan.⁹⁵ Pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial yang dilandasi meratanya distribusi ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Dalam aspek pemerataan dan keadilan sosial yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berikut penuturan dari Bapak Samsul Arifin selaku Ketua BUMDes Kerto Raharjo:

“Belum merata, tetapi kami setiap tahun komitmen dengan membantu bantuan keuangan kepada setiap RT, harapan kami seluruh masyarakat dapat merasakan dampak baik sehingga di lingkungan masing-masing silahkan dibuat kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat. Makannya kami tiap tahun kami sudah proyeksikan nanti tiap tahun ada kenaikan, kalau kemarin Rp. 500 Ribu per RT dan terdapat total 23 RT, Tahun 2018 ini kami sudah hitung dari hasil laba bersih nanti setiap RT akan mendapat bantuan keuangan dari BUMDes sekitar Rp. 2 Juta.”⁹⁶

Menurut Bapak Samsul, beliau mengutarakan bahwa pemerataan dan keadilan yang dirasakan sepenuhnya belum merata, hanya pihak-pihak yang tergabung dalam pengelolaan pariwisata yang mengalami dampak secara langsung. Namun dalam memenuhi aspek pemerataan, BUMDes Kerto Raharjo memiliki Dana Sosial yaitu dana yang digunakan untuk bantuan sosial kepada masing-masing RT. Bantuan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 500.000 masuk ke dalam kas masing-masing RT. Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk membeli bendera atau

⁹⁵ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Op.Cit.* Hlm 23

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Samsul Arifin. *Op.Cit.*

umbul-umbul, tong sampah, tanaman hias, atau untuk bantuan perlengkapan kematian. Terdapat juga bantuan insentif yang diberikan kepada masing-masing ketua RT dan ketua RW yakni sebesar Rp. 200.000.

Dari aspek pengembangan wisata, tidak hanya terfokus di kawasan Boon Pring Andeman, wisata baru juga diciptakan oleh masyarakat RT 23 yakni Kampung Jadoel. Kampung tersebut mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pengerajin bambu. Wisatawan dapat ikut atau melihat cara pembuatan kerajinan berbahan baku bambu seperti cara pembuatan tusuk sate secara tradisional dan menggunakan mesin, pembuatan anyaman, ataupun pembuatan patung ukiran dari limbah akar bambu. Dari hasil kerajinan bambu tersebut dapat dibeli dan dibawa pulang wisatawan untuk oleh-oleh.

Selain dari pelaku wisata yang berkontribusi langsung dalam pengembangan ekowisata, dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak berkontribusi langsung dapat juga dirasakan khususnya para petani. Petani Desa Sanankerto merasakan langsung dampaknya yaitu debit air irigasi yang sangat lancar. Irigasi pertanian di Desa Sanankerto bergantung pada debit air Embung Andeman. Petani tidak susah dalam memasok air untuk irigasi pertanian, malah debit air meningkat. Hal tersebut dirasakan salah satu petani di Desa Sanankerto yaitu Bapak Tarip. Beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya pada tahun 2012an debit air yang berasal dari Embung Andeman cenderung berkurang. Tetapi setelah adanya upaya pengerukkan sedimentasi di embung oleh Dinas Pengairan serta program desa yaitu konservasi penanaman bambu, maka berdampak positif bagi keberlangsungan debit

air Embung Andeman.⁹⁷ Saat ini irigasi pertanian bukan hanya pada areal pertanian di Desa Sanankerto, tetapi juga sudah mengalir arela pertanian di dua desa tetangga yakni Desa Sananrejo dan Desa Pagedangan seluas 260 hektar.

5.3.2 Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi termasuk prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang tanpa melibatkan masyarakat akan lebih cenderung memarginalkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Ada kaitannya juga dengan pembangunan desa ekowisata yang membutuhkan partisipasi masyarakat yang bersifat holistik. Tahapan partisipasi pada hakekatnya yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam keseluruhan tahapan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa wisata. Secara runtut akan dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat Desa Sanankerto dalam pembangunan desa wisata berbasis ekowisata secara berurutan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Meskipun tidak secara keseluruhan melibatkan masyarakat, tetapi program pengelolaan desa wisata sudah memnuhi aspek partisipatori yaitu adanya keterlibatan dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan mensosialisasikan mengenai pengajuan desa wisata kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, pemerintah desa melibatkan ketua RT, ketua RW, Kamituwo atau kepala dusun, LPMD, Karang

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Tarip selaku Petani di Desa Sanankerto, pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 12.20 WIB

Taruna, serta tokoh masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan agar mereka mengetahui serta dapat memberikan masukan ide dan dapat terlibat dalam pembangunan desa wisata.

Setelah sepakat menjadikan Desa Sanankerto menjadi desa wisata berbasis ekowisata, maka langkah selanjutnya yaitu membentuk organisasi internal dalam pengelolaan wisata yaitu Pokdarwis. Pokdarwis tersebut merupakan organisasi yang membantu dalam menyiapkan strategi dalam pengembangan desa wisata di Desa Sanankerto. Pokdarwis merupakan konsep serta syarat penting dalam pembangunan desa wisata yang menitikberatkan pelibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari Pokdarwis yaitu dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pelaku pengembangan pariwisata dan menumbuhkan masyarakat dalam melakukan promosi, pelestarian, dan pemanfaatan potensi daya tarik desa wisata.

Tahun 2014 tepat pada bulan September dibentuklah Pokdarwis Boon Pring. Dalam pembentukan tersebut diawali dengan mengundang masyarakat dalam pembentukan kepengurusan Pokdarwis yang dilakukan di Balai Desa Sanankerto yaitu pada tanggal 2 September 2014. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan seksi Pokdarwis yang bertujuan untuk dapat mengetahui pembagian *job desk* masing-masing.

Dalam perencanaan pengelolaan desa wisata Desa Sanankerto terdapat dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan rutin dan perencanaan momentum. Pertama perencanaan rutin adalah perencanaan yang diadakan setiap bulan, contohnya seperti perencanaan sosialisasi sapta pesona terhadap masyarakat desa, rencana

pengembangan kawasan wisata seperti penambahan fasilitas perahu bebek, pembenahan MCK. Ataupun pembangunan gazebo. Sedangkan untuk perencanaan momentum yaitu ketika ada suatu event tahunan, seperti Grebeg 1001 Tumpeng Sesucen dan Festival Egrang yang menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, ataupun rencana kerja studi banding terkait pengelolaan desa wisata ke lain desa.

b. Pelaksanaan

Tahapan kedua dalam pembangunan Desa Ekowisata Desa Sanankerto yakni pada tahap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Sanankerto dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa ekowisata yakni pada saat event Grebeg 1001 Tumpeng Seseucen. Grebeg Seseucen dan Sedekah bumi adalah acara yang diungkapkan oleh seluruh masyarakat Desa Sanankerto sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, event tersebut menjadi agenda wisata untuk menarik wisatawan berkunjung. Acara Grebeg Seseucen tersebut sudah ada sejak tahun 2013 dan digelar tiap menjelang bulan Syuro. Rangkaian acara grebeg tumpeng tersebut menjadi agenda wisata tahunan kabupaten malang yakni sejak tahun 2017.

Gambar 5.5

Acara Grebeg Sesucen 1001 Tumpeng di Desa Sanankerto



Sumber: Dokumentasi Pokdarwis Boon Pring, 2015

Dalam rangkaian acara grebeg tumpeng, diawali dengan pemotongan tumpeng bersama-sama masyarakat Desa Sanankertoyang dilakukan di Balai Desa Sanankerto. Setelah dilakukan pemotongan, setelah itu menuju makam Mbah Singorejo untuk dilakukan pemanjatan doa. Setelah memanjatkan doa di makam leluhur pendiri Desa Sanankerto Mbah Singorejo, selanjutnya menuju ke kawasan Andaman dengan dikirap tiap-tiap wilayah RT masing-masing. Masyarakat Desa Sanankerto juga memakai baju adat Jawa. Terdapat 2 jenis tumpeng yakni Tumpeng Dewa dan Tumpeng Dewi. Partispasi masyarakat Desa Sanankerto sangat tinggi yakni diikuti oleh berbagai macam kalangan masyarakat baik anak-anak, pemuda hingga orang tua.

“Mulai meningkat mas, dibuktikan adanya kegiatan Grebeg Tumpeng, atau dahulu itu awal mulanya dari *Slametan Ngurit*, jadi petani mau nabur bibit padi disemaikan. Sehingga dapat dikemas menjadi tuntunan dan tontonan jadi bersifat sakral. Disini kita ya partisipasinya ya ikut Grebeg Tumpeng mas, itu agenda tahunan desa wisata Sanankerto. Itu tiap RT wajib bawa tumpeng, tiap

RT *urunan* (patungan) uang buat beli bahan-bahan untuk tumpeng, terus yang masak bagiannya ibu-ibu.”⁹⁸

Penuturan Bapak Rianto selaku masyarakat lokal Desa Sanankerto yakni beliau berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata salah satunya mengikuti agenda rutin tahunan yaitu Grebeg Tumpeng. Awal mula Grebeg Tumpeng berasal dari tradisi masyarakat desa yakni *Slametan Ngurit* atau ungkapan rasa syukur petani kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu apabila sawah yang telah dikerjakan maka benih segera ditebar (*ngurit*). Tradisi tersebut mempunyai makna dan tujuan yaitu ungkapan rasa syukur dan harapan agar panen selanjutnya dapat lebih baik dan melimpah. Setelah adanya pembangunan desa wisata, tradisi tersebut dikemas agar tidak hanya menjadi tuntunan, tetapi juga tontonan bagi para wisatawan.

Dalam acara Grebeg Tumpeng, masyarakat seluruh desa dihimbau dan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kirab tumpeng tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias, yakni mulai dari ibu-ibu menyiapkan tumpeng, bapak-bapak dan remaja desa mempersiapkan umbul-umbul dan merangkai tumpeng untuk diarak serta tak mau ketinggalan, anak-anak juga turut serta dalam mengikuti pawai dengan menggunakan baju adat Jawa.

Selain dalam acara Grebeg Tumpeng, masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi implementasi Sapta Pesona. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh Pokdarwis kepada masyarakat Desa Sanankerto yang bertempat di Balai Desa Sanankerto. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, Pokdarwis mengundang dari pihak perangkat Desa Sanankerto, masyarakat *home industry*,

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Rianto. *Op.Cit.*

masyarakat pengerajin, dan masyarakat pemilik *homestay*. Tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu agar masyarakat Desa Sanankerto, khususnya pelaku wisata memahami mengenai sapta pesona serta terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pokdarwis sebelumnya telah memperoleh berbagai macam pelatihan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

“Kita sering dapat pelatihan pengembangan SDM dari Dinas Pariwisata, kita mulai itu dari tahun 2014 saat Pokdarwis Boon Pring terbentuk, sudah banyak kita dapat bimtek seperti implementasi sapta pesona, pengembangan daya tarik wisata, dan pelatihan pembuatan jejaring paket wisata. Jadi kita ikut tidak sia-sia ilmu yang kita dapatkan ikut pelatihan itu, terus kita kembangkan sama masyarakat. *Alhamdulillah* masyarakat sini dapat ikut serta dengan baik, hanya ada satu kendalanya itu, SDM di desa tentang pemahaman desa wisata masih rendah.”⁹⁹

Menurut Bapak Rahmad Aldian selaku Ketua Pokdarwis Boon Pring menjelaskan bahwa Pokdarwis aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembangan desa wisata yang didapatkannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Respon masyarakat juga positif dalam tingkat kehadiran sosialisasi yang diadakan oleh Pokdarwis. Namun masih ada kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal partisipasi yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait desa wisata. Kualitas SDM masyarakat juga masih tergolong rendah. Terkadang mereka bingung atau tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika seperti rumahnya ditunjuk untuk dijadikan *homestay*.

c. Evaluasi

Tahapan evaluasi ditandai dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi serta monitoring dalam pelaksanaan pembangunan desa

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Rahmad Aldian S selaku Ketua Pokdarwis Boon Pring Desa Sanankerto, pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.10 WIB

ekowisata. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan ekowisata yaitu dalam bentuk partisipasi buah pikiran, yakni masyarakat berperan dalam memberikan saran serta pendapat dalam dalam evaluasi pengelolaan ekowisata. Partisipasi masyarakat Desa Sanankerto dalam tahap evaluasi yaitu dengan mengadakan rapat Pokdarwis terkait koordinasi dan evaluasi kegiatan Pokdarwis. Rapat evaluasi yang sudah dilakukan Pokdarwis Boon Pring mengenai kegiatan Pokdarwis yang perlu ditingkatkan baik segi kualitas pengurus dan kuantitas kehadiran, upaya pengembangan destinasi wisata baru agar anggota tidak hanya fokus di Andaman saja, serta perlu adanya penanganan sampah yang bersifat terpadu.¹⁰⁰

Pengurus Pokdarwis bersama anggota berpartisipasi dalam melakukan diskusi masalah terkait kegiatan wisata yakni melalui rapat tahunan Pokdarwis. Bentuk partisipasi yang dilakukan antara lain mendiskusikan terkait perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dirasa kurang optimal seperti terkait pendanaan, masalah internal keanggotaan yang masih belum solid, ataupun masalah terkait sosialisasi yang dilakukan di masyarakat. Penggurus Pokdarwis bersama perangkat Pemerintah Desa Sanankerto juga melakukan pertemuan membahas serta mencari solusi upaya yang dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat.

5.4 Dimensi Kelembagaan

Menurut prisma keberlanjutan yang dikemukakan oleh Spangenberg, bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya pembangunan yang menuju tujuan rekonsiliasi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga terdapat proses

¹⁰⁰ Notulen Rapat Kelompok Sadar Wisata Boon Pring Tahun 2014-2016

yang menuntut lembaga baru dan pola baru aspek tata kelola kelembagaan, jaringan antar aktor, serta pola kerjasama dan bahkan membentuk pola dan prosedur kelembagaan baru.¹⁰¹ Berikut analisis pembangunan ekowisata berdasar pada potensi alam Desa Sanankerto menggunakan dimensi kelembagaan:

5.4.1 Tata Kelola Kelembagaan (*Manage*)

Pengelolaan kelembagaan berdasarkan prisma pembangunan berkelanjutan, mendorong untuk institusi atau lembaga menerapkan prinsip institusi yang mengedepankan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Dalam pengelolaan desa ekowisata Boon Pring Andeman Desa Sanankerto aktor pengelola utamanya ialah BUMDes Kerto Raharjo. Dalam pengelolaan manajemen desa ekowisata BUMDes dibutuhkan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes, sehingga target dan sasaran dapat tercapai dengan maksimal. Berikut tata kelola BUMDes sebagai pengelola utama pemabangunan desa ekowisata Sanankerto:

a. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan BUMDes yang bersifat partisipatif yaitu ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan desa yakni yang tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pada intinya menitikberatkan desa sebagai subjek dan objek dalam proses pembangunan. Maksud dari hal tersebut yaitu desa bukan hanya menjadi penonton, namun harus menjadi pemain dalam proses penentuan kebijakan pembangunannya. Konsep pembangunan desa juga termuat lebih rinci yakni tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan

¹⁰¹ Nan Cha. 2009. *Op.Cit.* Hlm 93

masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰²

Melalui konsep tersebut melahirkan penyelenggaraan pembangunan yang bersifat partisipatif, yaitu masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya dalam memberikan ide serta gagasan yang terkait kebijakan pembangunan desa. Dalam pengelolaan BUMDes wajib memberikan ruang partisipasi masyarakat desa baik dalam pembentukan, pelaksanaan serta dalam hal pengawasan.

Dalam pembentukan awal BUMDes Kerto Raharjo di Desa Sanankerto, masih belum ada penyelenggaraan partisipasi secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan pada saat pembentukan BUMDes merupakan inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang guna menyikapi lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur. Alasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memilih Desa Sanankerto sebagai wakil dari Kabupaten Malang yaitu Desa Sanankerto memiliki potensi pengembangan unit ekonomi berbasis desa wisata yang memanfaatkan embung dan hutan desa. Berikut penjelasan wawancara dengan Bapak Oni:

“Dulu memang waktu itu tahun 2016-an akhir itu ada lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur, dari Dinas PMD mengikutkan Desa Sanankerto sebagai wakil dari Kabupaten Malang, alasan memilih Desa Sanankerto karena memiliki potensi pariwisata yang memanfaatkan embung desa dan hutan desa. Kemudian salah satu item yang harus dipenuhi dari lomba desa syaratnya harus ada BUMDes untuk wadah pemberdayaan ekonomi. Maka dari situ dibentuklah BUMDes. Waktu itu memang unitnya belum secara faktual ada, karena apa? tanah yang di Andeman itu masih sengketa pengadilan. Waktu itu keberanian Kepala Desa Sanankerto walaupun masih

¹⁰² UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ayat 1

sengketa kemudian dibentuk unit pengembangan pariwisata BUMDes memanfaatkan embung desa dan hutan bambu.”¹⁰³

Hal di atas senada oleh pernyataan Ibu Sulis yakni pembentukan BUMDes Kerto Raharjo merupakan inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang guna menyikapi lomba desa, berikut penjelasan dari Ibu Sulis:

“Waktu itu tunjukkan, ya langsung ditunjuk, waktu itu kita nggak tahu sebenarnya, jadi waktu itu ada lomba desa, kan gini salah satu syaratnya untuk ikut lomba desa itu harus ada BUMDes, sehingga waktu itu ditunjuk langsung untuk pengurus BUMDes.”¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas, kepengurusan BUMDes dilakukan penunjukan Ketua BUMDes serta pengurus BUMDes oleh Kepala Desa Sanankerto tanpa melalui adanya musyawarah. Idealnya dalam pembentukan BUMDes wajib melalui tahapan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat, pembentukan Pokja atau Kelompok Kerja yang bertugas memilih anggota pengurus BUMDes, pemetaan potensi usaha ekonomi yang tidak melalui tahapan tersebut. Intinya, dalam pembentukan BUMDes Kerto Raharjo terkesan tergesa-gesa atau dipaksakan hanya untuk mengikuti lomba desa. Sedangkan pada tahap musyawarah desa atau Musdes pembahasan AD/ART dan Perdes BUMDes, masyarakat baru dilibatkan dengan mengundang BPD, Karang Taruna, Pokdawis, dan tokoh masyarakat. *Draft* AD/ART disusun oleh BUMDes kemudian di-*floor*-kan pada Musyawarah Desa.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Oni Eko Cahyono selaku Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 11.10 WIB

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sulistyoning Ari selaku Sekretaris BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 14.30 WIB

b. Akuntabel

Secara umum, dalam pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. BUMDes melakukan pembukuan secara sistematis dari transaksi setiap harinya. Pencatatan transaksi tersebut umumnya menggunakan sistem akuntansi. Tujuan adanya pencatatan transaksi keuangan yaitu untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu, omzet, laba atau rugi ataupun terkait permodalan. Selain itu juga berguna untuk mengetahui sumber dan pengalokasian dana BUMDes, sehingga dapat mengevaluasi terkait kinerja keuangan.

BUMDes Kerto Raharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik yaitu dengan melaporkan program kerja dan hasil usaha secara tertib setiap tahunnya. Para pengurus BUMDes juga telah memahami kapasitas manajerial, terutama dalam bidang keuangan terkait nilai aset, omzet serta akuntabilitas. Dalam hal pencatatan administrasi atau inventaris dan keuangan sudah menggunakan standar akuntansi. Dalam Lembar Pertanggungjawaban atau LPJ, BUMDes Kerto Raharjo sudah menggunakan sistem akuntansi internal maupun eksternal. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, dan untuk pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, masyarakat yang menyertakan modal, perbankan, dan petugas pajak.

c. Transparansi

Dalam setiap pengambilan keputusan, BUMDes Kerto Raharjo selalu melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Pokdarwis dan tokoh masyarakat. Meskipun menggunakan

mekanisme musyawarah, BUMDes termasuk lembaga independen, sehingga terkait hal-hal tertentu juga dapat mengambil keputusan secara mandiri. Ditinjau dari sisi pengelolaannya, BUMDes Kerto Raharjo telah menerapkan prinsip transparansi dalam hal melaporkan keadaan keuangan serta kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo yaitu dengan mengadakan rapat setiap triwulan kepada dewan komisaris. Salah satunya yakni pada tanggal 19 Maret 2018 terdapat agenda rapat koordinasi BUMDes dengan dewan komisaris. Hasil rapat tersebut antara lain:

Pertama, BUMDes akan menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Malang dan Universitas Merdeka Malang mengenai *masterplan* pembangunan wisata. *Kedua*, pembangunan kolam dimulai dengan mencari konsultan, dan pengawasannya berasal dari perangkat desa atau orang yang ditunjuk oleh perangkat desa. *Ketiga*, BUMDes memiliki brankas sebagai tempat mengontrol uang, sehingga siapapun dapat mengecek antara uang yang ada dipembukuan dan uang yang ada di brankas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 3 bulan sekali BUMDes secara transparan mengadakan rapat koordinasi dengan dewan komisaris mengenai pembangunan program yang telah berjalan ataupun program yang direncanakan.

5.4.2 Regulasi atau Aturan (*Regulation*)

BUMDes Kerto Raharjo berpegang teguh dalam menjalankan tugasnya yaitu sesuai dengan berdasarkan Perdes Nomor 5 tahun 2016 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Kerto Raharjo. Pada tahun 2018 terjadi revisi terhadap AD/ART khususnya pada presentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembahasan revisi pada AD/ART BUMDes Kerto Raharjo dilaksanakan melalui

musyawarah desa. Berikut rincian perubahan pembagian SHU berdasarkan masing-masing proporsi:

Tabel 5.9
Pembagian SHU Tahun 2017 dan 2018 Berdasarkan Proporsi

Proporsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Perubahan
Dana Penyertaan PADes	20%	25%	+5%
Dana Pengembangan Usaha	25%	25%	-
Dana Sosial	5%	5%	-
Dana RT/RW	5%	5%	-
Dana Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan	5%	5%	-
Dana Karyawan	7,50%	7,50%	-
Dana Komisaris	11%	9%	-2%
Dana Pengurus dan Pengawas	11,50%	8,50%	-3%
Dana Jaminan hari tua/ imbalan jasa purnabakti (Pengurus dan Dewan Komisaris)	5%	5%	-
Dana Cadangan	5%	5%	-

Sumber: *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Kerto Raharjo, 2018*

Menurut data tabel 5.8 terjadi perubahan SHU pada tahun 2017 dan 2018. Proporsi perubahan terjadi pada dana penyertaan PADes yang mengalami kenaikan 5%. Alasan terjadi kenaikan 5% karena pemerintah desa tahun 2018 mengelontorkan dana untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 300 juta, sehingga diharapkan PADes yang diterima juga ikut meningkat. Untuk dana komisaris dan pengurus serta pengawas mengalami penurunan masing-masing 2% dan 3%. Apabila tetap sebelum ada revisi presentase, maka dikhawatirkan dana yang diperoleh dewan komisaris dan pengurus akan besar sehingga ada penyesuaian dalam presentase pembagian SHU.

5.4.3 Aktor

Pembangunan berkelanjutan dalam dimensi kelembagaan tidak dapat dicapai jika dipaksakan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder. Para pemangku kepentingan harus terlibat dalam seluruh proses demi tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu perlu kajian tersendiri tentang peran penting stakeholder¹⁰⁵ dalam kaitannya terhadap perkembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Tabel 5.10

Aktor dan Peran dalam Pembangunan Desa Ekowisata Sanankerto

Aktor	Peran
Pemerintah Desa Sanankerto	Berperan sebagai <i>entrepreneur</i> , fasilitator, koordinator, dalam pembangunan desa ekowisata.
BUMDes Kerto Raharjo	Pengelola dan pengembangan usaha ekonomi melalui pemanfaatan desa wisata berdasarkan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparansi.
Pokdarwis Boon Pring	Melakukan promosi dan koordinator dengan masyarakat dalam mengimplementasikan sapta pesona.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	Fasilitasi pemberdayaan Pokdarwis seperti sosialisasi, penguatan Pokdarwis, dan penguatan desa wisata
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang	Fasilitasi dalam pembentukan BUMDes, Fasilitasi pengajuan modal kepada Kemendes.

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

a. Peran Pemerintah Desa Sanankerto

Bukan hanya masyarakat saja yang melaksanakan proses pembangunan, tetapi juga terdapat peran pemerintah desa yakni sebagai aktor dalam mendorong keberhasilan proses pembangunan yang terdapat di desa, khususnya dalam hal ini

¹⁰⁵ Joachim H Spangenberg. 2002. *Op.Cit.* Hlm 103

yakni pembangunan desa berbasis ekowisata. Peran pemerintah desa menurut fungsinya terbagi menjadi 3 yaitu *Entrepreneur*, Fasilitator dan Koordinator.¹⁰⁶

➤ ***Entrepreneur***

Peran pemerintah desa sebagai *entrepreneur* yakni bertanggungjawab dalam menjalankan bisnis usahanya. Pemerintah desa memiliki tanggungjawab dalam melakukan usaha mengelola sumber daya aset ekonomi yang berpotensi dikembangkan sehingga mampu memberi keuntungan serta manfaat untuk masyarakat.¹⁰⁷ Salah satu bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sanankerto untuk meningkatkan pembangunan ekonominya yaitu dengan mendirikan BUMDes Kerto Raharjo sebagai pengelola unit usaha pariwisata yang memanfaatkan berupa potensi alam Hutan Bambu Boon Pring dan Embung Andeman. Wirausaha ini dilakukan oleh pemerintah desa, karena obyek wisata Boon Pring Andeman dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa yang ditunjukkan dengan adanya alokasi Pendapatan Asli Desa atau PADes. Berikut rincian PADes yang diperoleh dari obyek wisata Boon Pring Andeman:

Tabel 5.11
Pendapatan Asli Desa Sanankerto Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017	Tahun 2018
Rp. 80.000.000	Rp. 200.000.000 (target)

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanankerto Tahun 2018

PADes tahun 2017 digunakan untuk pembangunan TPJ makam, pembangunan jambanisasi, pemberian THR untuk lembaga desa, dan bantuan

¹⁰⁶ Lincoln Arsyad. 1990. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE. Hlm 312

¹⁰⁷ *Ibid.* Lincoln Arsyad. Hlm 312-313

prestasi anak SD. Sedangkan pada tahun 2018, BUMDes Kerto Raharjo sudah menargetkan untuk alokasi PADes yakni sebesar Rp. 200.000.000. BUMDes Kerto Raharjo optimis dapat tercapai karena omzet yang didapat per-tanggal 12 Juni 2018 sudah mencapai Rp. 1.390.900.000 yakni sudah melampaui omzet pada tahun 2017 sebesar Rp. 994.349.500. Selain itu besaran presentase dalam pembagian AD/ART tahun 2018 untuk penyertaan PADes juga naik menjadi 25% dan sebelumnya 20%. Sehingga sangat mungkin sekali target penerimaan PADes tahun 2018 dapat tercapai.

Tabel 5.12
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2017 dan 2018

No.	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Januari	3.596	13.163
2.	Februari	2.864	8.652
3.	Maret	3.389	8.331
4.	April	4.065	9.274
5.	Mei	4.299	6.141
6.	Juni	4.525	18.600
7.	Juli	13.932	-
8.	Agustus	3.942	-
9.	September	5.329	-
10.	Oktober	6.303	-
11.	November	5.212	-
12.	Desember	18.613	-
Total		76.042	64.161
Omzet		Rp. 994.349.500 Per 31 Des 2017	Rp. 1.390.900.000 Per 12 Juni 2018

Per 12 Juni 2018

Sumber: BUMDes Kerto Raharjo, 2018

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung pada tahun 2017 mencapai 76.042 orang dan omzet yang diperoleh per 31 Desember 2017 mencapai Rp. 994.349.500. Pada tahun 2018 per tanggal 12 Juni, jumlah pengunjung sudah mencapai 64.161 orang dan omzet sementara yang sudah diperoleh sebesar Rp.

1.390.900.000. Sedangkan target omzet pada tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp. 1.5 Milyar dan BUMDes optimis dapat terealisasi.¹⁰⁸

➤ **Fasilitator**

Pemerintah Desa telah melakukan fasilitator dalam mempercepat pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan ekowisata. Pemerintah Desa Sanankerto sudah melaksanakan peran fasilitator yakni dengan memfasilitasi berupa kantor bersama antara BUMDes dan Pokdarwis dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Kantor tersebut bernama Kantor Sekretariat Bersama BUMDes Kerto Raharjo dan Pokdarwis Boon Pring. Kantor tersebut merupakan tanah dan bangunan milik desa dan tidak jauh dari Kantor Pemerintah Desa Sanankerto. Selain fasilitasi dalam penyediaan kantor, Pemerintah Desa Sanankerto juga memfasilitasi bagi Pokdarwis melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyediakan tempat pertemuan di Balai Desa Sanankerto.

➤ **Koordinator**

Peran pemerintah desa sebagai koordinator yakni dengan menetapkan kebijakan pembangunan desa yang dapat merangkul semua komponen masyarakat sehingga dapat menjadi aktor dalam proses pembangunan. Secara garis besar, Pemerintah Desa Sanankerto sudah memiliki kebijakan dan strategis khusus dalam mengembangkan potensi pembangunan ekowisata. Dalam perencanaan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2018, pihak BPD Desa Sanankerto mengusulkan besaran penyertaan modal kepada BUMDes Kerto Raharjo sebesar Rp.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Abdullah Faqih selaku Ketua BPD Desa Sanankerto dan Bendahara BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.10 WIB

300.000.000. Berikut penjelasan dari Ketua BPD Desa Sanankerto dan merangkap sebagai Bendahara BUMDes.

“Terkait pengembangan wisata, BPD mengusulkan dana desa sebagai tanam modal ke BUMDes, yang tahun kemarin Rp. 170 juta terealisasi, tahun ini Rp. 300 juta juga terealisasi, disana ada nota kesepakatan antara BUMDes dan Pemerintah Desa yang notabene diketahui oleh BPD.”¹⁰⁹

Tabel 5.13
Penyertaan Modal BUMDes

Tahun 2017	Tahun 2018
Rp. 170.000.000	Rp. 300.000.000

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanankerto Tahun 2017 dan 2018*

Selain dari Dana Desa dalam penyertaan modal BUMDes, terdapat juga dana dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang pada tahun 2018 untuk pengembangan desa wisata sebesar Rp. 14.000.000 melalui pintu masuk BUMDes. Penyertaan modal BUMDes tersebut melalui hasil kesepakatan musyawarah desa pada awal tahun 2018 yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, BUMDes, badan pengawas, pokdarwis, dan tokoh masyarakat.

b. Peran Pokdarwis Boon Pring Andeman

Dalam pembangunan ekowisata, Pemerintah Desa Sanankerto melakukan upaya kerjasama dengan kelompok lokal masyarakat. Kelompok lokal masyarakat yang dimaksud adalah bentuk kelompok masyarakat yang berperan dalam pembangunan desa wisata berbasis ekowisata yaitu Pokdarwis. Pokdarwis merupakan bentukkan dari Pemerintah Kabupaten Malang, dimana kelompok ini ada di setiap desa di Kabupaten Malang. Pokdarwis dibentuk di masing-masing

¹⁰⁹ *Ibid.*

desa wisata yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Posisi kelembagaan Pokdarwis disini bersifat ganda yakni sebagai unit pengelola wisata BUMDes dan sebagai kelompok sadar wisata dibawah bimbingan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dikatakan sebagai unit pelaksana BUMDes yaitu Pokdarwis sebagai pekerja atau karyawan BUMDes yang berfokus pada kegiatan wisata di kawasan ekowisata. Peran pokdarwis dibawah naungan Disparbud Kabupaten Malang yakni sebagai pengelola lingkungan sebagai daya tarik wisata dan mengimplementasikan sapta pesona. Posisi pokdarwis yang bersifat ganda ini justru lebih meningkatkan daya tarik wisata, yaitu dengan membuat paket wisata, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dan berpartisipasi dalam pengembangan daya tarik wisata.

Dilihat dari sisi kemampuan SDM, anggota Pokdarwis sudah mendapatkan pelatihan kependudukan yang rutin diadakan dalam 2 tahun sekali untuk memperoleh sertifikat *local guide* dan *guide* nasional. Pelatihan kependudukan tersebut difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Selain pelatihan kependudukan, pelatihan yang pernah diikuti oleh Pokdarwis yakni antara lain pelatihan pengembangan potensi, kesadaran pariwisata, Sapta Pesona, *homestay* dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut tidak semua anggota Pokdarwis diikutsertakan, namun hanya berjumlah 1-4 orang saja yang mengikuti pelatihan tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Rahmad Aldian. *Op.Cit.*

c. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah turut andil dalam pembangunan desa wisata berbasis ekowisata di Desa Sanankerto, peran ini diantaranya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Fasilitasi yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Malang yaitu dalam inisiasi pembentukan BUMDes sebagai pengelola unit usaha wisata Boon Pring Andeman. DPMD Kabupaten Malang pada tahun 2016 melakukan pendampingan dalam pendirian BUMDes Kerto Raharjo di Desa Sanankerto guna mengikuti lomba desa. Setelah BUMDes berdiri dan berkembang, DPMD Kabupaten Malang tidak lagi mengawasi atau melakukan monitoring secara langsung karena terbentur dengan kewenangan desa terkait otonomi desa. Namun DPMD Kabupaten Malang masih memberikan fasilitasi dalam hal pengajuan proposal bantuan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui DPMD Kabupaten Malang. Selain itu DPMD Kabupaten Malang juga telah memberikan bantuan alat penunjang dalam hal wisata yaitu memberikan bantuan ATV sebanyak 2 buah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga berkontribusi dalam hal pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto. Dimulai dari pemberian bantuan penunjang wisata seperti bantuan sepeda air sebanyak 2 buah dan senilai Rp. 20 Juta, bantuan alat-alat kebersihan seperti sapu lidi, serokan, dan pembangunan gazebo. Selain pemberian bantuan fisik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga memberikan pemberdayaan kepada Pokdarwis Boon Pring melalui bimbingan teknis terkait penguatan Pokdarwis dan desa wisata. Berhubung

Desa Sanankerto sudah bersifat mandiri, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sudah tidak memberikan fasilitasi pelatihan secara rutin kepada Pokdarwis, namun hanya mengikuti pelatihan kependudukan yang dilakukan 2 tahun sekali, dan pemantauan jumlah kunjungan wisatawan serta upaya promosi wisata baik melalui agenda wisata tahunan Kabupaten Malang ataupun melalui aplikasi berbasis android berupa *Smart Village*.¹¹¹

5.4.4 Kerjasama

Sebagai pengelola pengembangan ekowisata, BUMDes Kerto Raharjo belum menjalin kerjasama dengan pihak swasta. BUMDes memiliki alasan yaitu mereka lebih memprioritaskan terlebih dahulu masyarakat Desa Sanankerto dalam melakukan kerjasama. BUMDes mempersilahkan masyarakat Desa Sanankerto yang ingin berinvestasi dalam bentuk obligasi ataupun dalam bentuk barang. Investasi yang berbentuk obligasi yaitu dilakukan oleh Kelompok PKK Desa Sanankerto yang menamakan obligasi dalam bentuk uang sebesar Rp. 25.000.000 dan mendapatkan bagi hasil pertahunnya sebesar 7,5%. Untuk perseorangan, masyarakat Desa Sanankerto melakukan investasi dalam bentuk barang seperti Viar, ATV, perahu *boat*, perahu angsa, dan *handboat* serta mendapatkan bagi hasil sebesar 40% untuk BUMDes dan 60% untuk pemilik barang. Berikut penjelasan dari Bapak Samsul Arifin sebagai Ketua BUMDes Kerto Raharjo:

“Pihak ketiga yang kita maksud yakni masyarakat desa sendiri, kalau orang luar desa takutnya kita nanti jadi penonton. Masyarakat yang punya modal bisa menanamkan modal disini bisa berupa barang bisa berupa uang, kalau uang bisa semacam obligasi, yang menanamkan itu PKK, kemudian pihak ketiga masyarakat seperti kita punya ATV itu pihak ketiga lho itu, dengan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Nobi selaku Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 13.20 WIB

bentuk prosentase karena yang menjalankan BUMDes, yang punya barang mendapat 40%, BUMDes 60%, seperti mainan bola itu pihak ketiga juga sepanjang tetap masyarakat sini, kuda juga pihak ketiga tapi yang menjalankan mereka BUMDes mendapatkan 40%, mereka 60%.”¹¹²

5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukannya faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini uraian dari kedua faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa ekowisata berbasis potensi alam di Desa Sanankerto:

5.5.1 Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto, yakni meliputi adanya promosi wisata, bantuan pembangunan fisik ataupun non fisik yang berasal dari pemerintah pusat ayau daerah, penyertaan modal kepada BUMDes, serta terdapat dukungan dana terhadap upaya konservasi. Berikut penjelasannya secara lengkap.

a. Promosi dan Masuk Kalender Agenda Wisata Tahunan

Pemerintah Kabupaten Malang melalui SKPDnya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan kegiatan promosi desa wisata yakni masuk dalam agenda rutin wisata tahunan di Kabupaten Malang. Salah satunya yaitu acara Grebeg 1001 Tumpeng Sesucen masuk dalam agenda wisata tahunan tersebut. Berikut alasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memasukkan promosi acara Grebeg 1001 Tumpeng kedalam kalender wisata Kabupaten Malang:

¹¹² Hasil Wawancara dengan Samsul Arifin. *Op.Cit.*

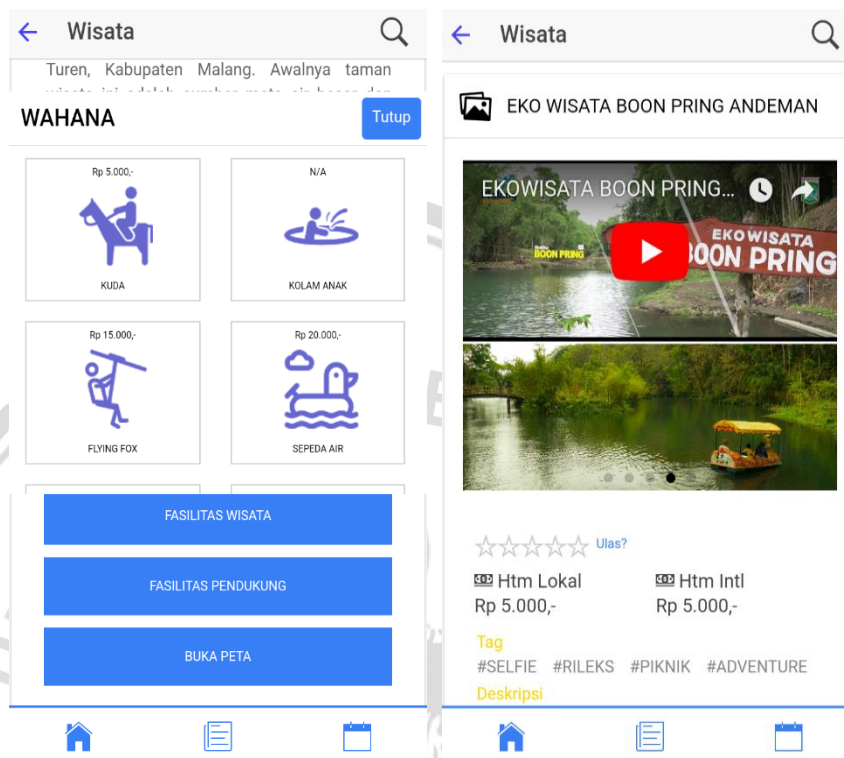
“Untuk yang masuk kedalam agenda wisata tahunan di Kabupaten Malang, melalui Dispar Kabupaten Malang, ada 3 desa wisata yang kami promosikan melalui agenda wisata, yakni antara lain Desa Pujon Kidul, Desa Gubugklakah, dan Desa Sanankerto. Itu kami gencar promosi karena termasuk desa wisata yang sudah mandiri, mandiri bukan artian kami lepas tangan, disini mandiri dalam artian masih memberikan promosi, untuk fasilitasi sudah tidak ada.”¹¹³

Menurut penuturan Ibu Nobi selaku Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat yakni di Kabupaten Malang terdapat tiga desa wisata yang gencar dipromosikan yakni Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Wisata Gubugklakah, dan Desa Wisata Sanankerto. Alasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan gencar-gencar promosi yaitu ketiga desa wisata tersebut sudah bersifat mandiri. Selain itu terdapat beberapa aspek SDM pengelola yang sudah partisipatif secara baik dan manajemen pengelola keuangan sudah memiliki pemasukan yang relatif besar Oleh karena itu Disparbud Kabupaten Malang mendorong upaya promosi dapat mendatangkan wisatawan yang tinggi sehingga berdampak positif terhadap pemasukan keuangan.

Selain itu, upaya promosi wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yakni melalui Aplikasi berbasis online yakni bernama *Smart Village* Pariwisata Kabupaten Malang yaitu aplikasi *android* yang berisi informasi potensi desa wisata yang terdapat di Kabupaten Malang melalui *smartphone* yang terkoneksi dengan internet. Dalam aplikasi tersebut termuat seluruh informasi terkait sarana prasarana, info, harga tiket, informasi akomodasi, dan peta navigasi. Salah satu obyek wisata yang masuk kedalam jaringan informasi tersebut yaitu Ekowisata Boon Pring Andeman di Desa Sanankerto.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Nobi. *Op.Cit.*

Gambar 5.6

Aplikasi *Smart Village* Pariwisata Kabupaten Malang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam pembangunan ekowisata berbasis potensi alam di Desa Sanankerto membutuhkan stakeholder lainnya untuk bekerjasama. Stakeholder yang dimaksud yaitu instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah. Beberapa stakeholder memberikan bantuan baik bersifat fisik ataupun non-fisik pembangunan infrastruktur. Selama tahun 2016 sampai tahun 2017, Pemerintah Desa Sanankerto memperoleh bantuan dari beberapa instansi meliputi BPDAS Brantas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Berikut secara rinci bantuan yang telah diperoleh Desa Sanankerto dalam pembangunan ekowisata:

Tabel 5.14

Bantuan Pembangunan Ekowisata Desa Sanankerto Fisik dan Non-Fisik

No.	Bantuan	Tahun	Instansi
1.	Pembangunan DAM Penahan, Gali Plak, dan Bantuan Bronjong (penahan sedimen yang terbuat dari batu yang diberi kawat dan berbentuk tangga)	2016	BPDAS Brantas
2.	- Pembangunan jalan paving seluas 1200m ² di areal wisata - MCK - Bantuan uang berjumlah Rp. 50 Juta untuk penyertaan modal BUMDes	2017	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.	- Tossa 2 unit - Kostum sanggar tari - Seragam linmas 25 potong - Alat pahat, kompresor, alat bor	2017	Kementerian Pariwisata
4.	Pembangunan DAM Parit	2017	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang
5.	Alat ukir untuk pengerajin	2017	BPDAS Brantas
6.	- Sepeda air 2 buah, senilai Rp. 20 Juta, - Bantuan alat-alat kebersihan seperti sapu lidi, serokan, dll. - Pembangunan gazebo.	2017	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
7.	ATV 2 buah	2017	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

c. Bantuan Modal Kepada BUMDes

Penyertaan yang dimaksud yaitu pemerintah desa melakukan investasi jangka panjang yakni dengan menyertakan sejumlah uang atau aset lainnya untuk

membentuk atau menambah modal kepada BUMDes. Pemerintah Desa Sanankerto menyertakan modal kepada BUMDes yaitu berasal dari Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 170.000.000. Selain itu, terdapat penyertaan modal hibah yang berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 50.000.000. Dalam mendapatkan modal hibah dari Kemendes, BUMDes membuat proposal pengajuan kepada Kemendes, kemudian melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang mengirim proposal tersebut kepada Kemendes. Selanjutnya dari pihak Kemendes melakukan *cross check* terhadap proposal tersebut dan memberi bantuan modal hibah kepada BUMDes Kerto Raharjo untuk digunakan belanja modal.

d. Bantuan Keuangan Terhadap Konservasi Hutan Bambu

Pemerintah Desa Sanankerto memberi bantuan keuangan terkait upaya konservasi bambu terhadap Kelompok Tani Bambu Boon Pring yang dialokasikan didalam APBDes tahun 2016 dan 2017. Alokasi anggarannya pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.851.000 dan tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000. Pengalokasian anggaran tersebut digunakan oleh Kelompok Tani Boon Pring untuk biaya operasioanl kelompok, biaya saat mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai konservasi bambu dan penambahan jumlah varietas jenis bambu. Walaupun dalam jumlah kecil, namun Pemerintah Desa telah telah berupaya menganggarkan dalam hal pelestarian hutan bambu Boon Pring. Sedangkan pada tahun 2018, Pemerintah Desa Sanankerto tidak mengalokasikan anggran terhadap Kelompok Tani Boon Pring karena desa lebih fokus pada anggaran penyertaan modal kepada BUMDes.

5.5.2 Faktor Penghambat

Selain terdapat aktor pendukung, juga terdapat faktor yang menghambat pembangunan desa ekowisata di Desa Sanankerto. Faktor penghambat tersebut antara lain yaitu:

a. Konflik Kepemilikan Tanah Hutan Bambu dengan Perhutani

Sejarah awal hutan bambu Boon Pring pada zaman penjajahan Belanda sudah dikelola oleh zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Ulayatnya dahulu tersebut bukan merupakan hutan bambu, tetapi perkebunan dan tempat pembibitan kopi milik Belanda. Penduduk sekitar Kampung Anyar menyebutnya sebagai Tanah Magersari, termasuk juga dikawasan ekowisata.¹¹⁴ Tanah Magersari masih bersifat HGU atau Hak Guna Usaha jadi hanya sebagai pemakai saja dan berjangka waktu 25 tahun.

Status lahan hutan di daerah ekowisata Boon Pring Andaman memang belum jelas alias belum ada sertifikat tanah resmi yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Desa Sanankerto. Sertifikat resmi merupakan bukti legal yang sah kepemilikan suatu luasan tanah. Pihak Desa Sanankerto mengklaim bahwa tanah yang berada di hutan Bambu Boon Pring seluas 36,8 hektar merupakan tanah milik desa yang dikelola oleh desa mulai tahun 1910.

“Tanah ini masih sedikit sengketa dengan perhutani, sebetulnya dari kabupaten BPN itu nggak ada masalah tinggal kelegalannya dari perhutani ini masih mengklaim bahwa tanah ini milik perhutani, tapi perhutani nggak berani masuk, kami juga siap untuk argumentasi dan *coro kasar e* (cara kasanya) kita siap perang untuk memperjuangkan tanah ini bahwa tanah aset

¹¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia: **Magersari** *n* 1 orang yang rumahnya menumpang di pekarangan orang lain; orang yang tinggal di tanah milik negara dan sekaligus mengerjakan tanah itu; 2 pembantu orang yang bertransmigrasi

desa, karena disitu tadi pada tahun 1910 kita sudah kuasai dan kelola oleh desa.”¹¹⁵

Namun saat peneliti bertanya perihal kepemilikan sertifikat tanah di wilayah hutan Bambu Boon Pring, pihak Pemerintah Desa Sanankerto menjawab tidak memilikinya. Pemerintah Desa Sanankerto berdalih sudah membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahunan, namun SPPT bukan merupakan bukan bukti sah kepemilikan tanah.

“Memang tahun 1960 atau 1961 itu berdirinya Perhutani, memang disini ada undang-undang bahwa tanah peninggalan belanda ataupun jepang itu wajib didata. Oleh Perhutani memang didata tapi kita nggak tahu, lha akhirnya desa punya peta seperti ini, kita juga punya sejarah, sama Perhutani dibuka ada memang data itu di Perhutani. Lha sekarang ada namanya P2 juga udah tinggal sertifikat, ini mau disertifikatkan tapi masih digandoli oleh Perhutani.”¹¹⁶

Pemerintah Desa Sanankerto beranggapan bahwa pada tahun 1961 merupakan tahun berdirinya Perhutani. Dalam undang-undang Perhutani menyatakan bahwa tanah peninggalan belanda ataupun jepang wajib didata. Pihak Perhutani kemudian mendata tanah tersebut dan kemudian memasang patok-patok didalam kawasan hutan bambu Boon Pring.

Menurut data yang peneliti peroleh dari pihak Perhutani, bahwa Perhutani mengklaim bahwa tanah yang berada di kawasan ekowisata Boon Pring merupakan milik Perhutani. Perhutani mengklaim hutan bambu Boon Pring seluas 94 hektar. Pihak Perhutani juga memiliki data-data pendukung seperti peta luasan hutans yang terdapat pada RPH Malang BKPH Dampit Bambang Selatan. Berikut penjelasan

¹¹⁵ Wawancara dengan Sugiono selaku Sekretaris Desa Sanankerto, bertempat di Rumah Bapak Sugiono, pada tanggal 7 Juni 2018, pukul 13.11 WIB

¹¹⁶ *Ibid.*

dari Bapak Tekat selaku Polisi Hutan atau Asisten Perhutani BKPH Dampit, Wilayah Bambang Selatan, Malang.

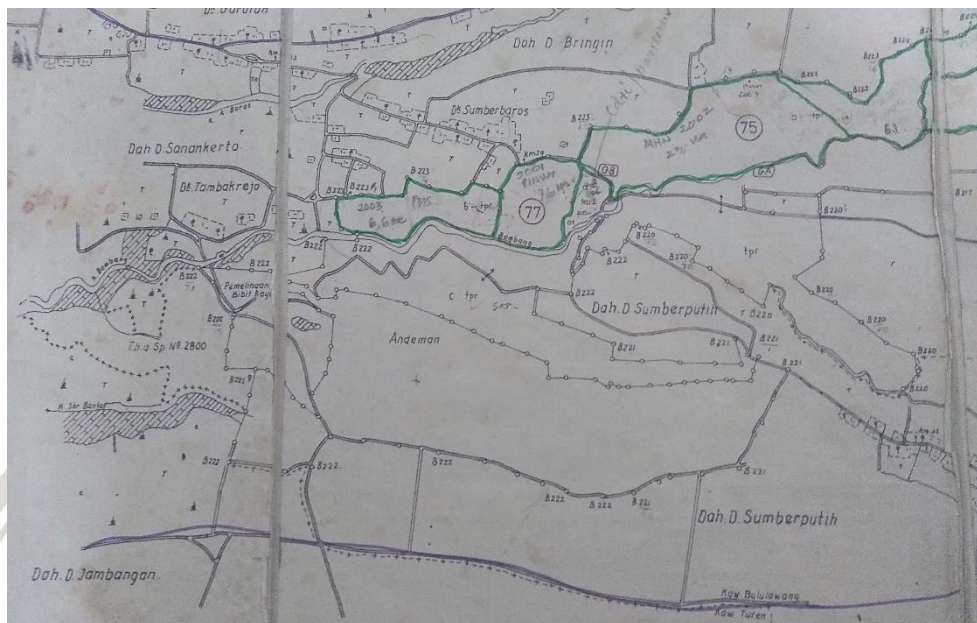
“Itu data-data tapal batasnya ada, itu yang menyengeketakan bukan dari pihak Perhutani, Disana kan hutannya dikelola oleh masyarakat desa Sanankerto dijadikan desa wisata, kami juga tidak melarang dibangun desa wisata, tapi seharusnya ada surat PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama) dengan pihak Perhutani. Sebetulnya telusur pendataan-pendataan, lokasi itu tidak tercatat di luasan desa sebetulnya. Saya yakin Desa Sanankerto tidak memiliki peta hutan yang jelas, adanya mungkin hanya peta desanya saja.”¹¹⁷

Berdasarkan data Perhutani, dijelaskan bahwa Perhutani memasang patok tapal batas di daerah hutan Bambu Boon Pring. Pihak Perhutani tidak menyengeketakan terkait permasalahan kepemilikan tanah, namun pihak Pemerintah Desa Sanankerto lah yang mempermasalahkan terkait status tanah. Perhutani juga tidak melarang terkait aktifitas wisata yang dilakukan oleh Desa Sanankerto, namun Perhutani menawarkan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan wisata Boon Pring Andaman dengan mekanisme pembagian sebesar 10% untuk Perhutani. Perjanjian kerjasama yang ditawarkan Perhutani berupa kerjasama dengan sertifikat kemitraan. Perhutani sudah mencoba masuk dan bertemu Pemerintah Desa Sanankerto, tetapi pihak Pemerintah Desa Sanankerto menolak dan tidak mau melakukan komunikasi penyelesaian sengketa tanah dengan Perhutani.

¹¹⁷ Wawancara dengan Tekat selaku Polisi Hutan atau Asisten Perhutani BKPH Dampit, Wilayah Bambang Selatan, Malang, bertempat di Kantor Perhutani BKPH Dampit Malang, pada tanggal 2 April, pukul 13.15 WIB

Gambar 5.7

Peta Perhutani BKPH Dampit Malang Bambang Selatan



Sumber: Perhutani BKPH Dampit Malang

“...Ada undang-undang dari Perhutani kalau memang dikelola desa, Perhutani hanya disetori mungkin 10% nya, tapi kita nggak mau karena kita menganggap bahwa ini tanah kita, tanahnya kas desa. Apabila kita ikut undang-undang Perhutani, Perhutani kita setori dari hasil itu, itu masih tanahnya Perhutani, tetep kita ego, bahwa ini tanah adat, tanahnya desa ya kita kelola, akhirnya seperti ada perdes pariwisata, perdes BUMDes, kita legalkan disana, semua perdes kita lengkapi dan kita kelola. Sekarang kita sudah porporasi untuk tiket, ini sudah sedikit resmi.”¹¹⁸

Menurut penjelasan dari Bapak Sugiono diatas, bahwa Desa Sanankerto tetap *keukeuh* atau berpendirian bahwa tanah tersebut merupakan tanah kas desa. Pemerintah Desa Sanankerto juga menolak kerjasama kemittraan dengan Perhutani yakni memberi setoran sebesar 10% hasil dari pengelolaan ekowisata. Pihak Pemerintah Desa Sanankerto juga sudah melengkapi Perdes wisata, Perdes

¹¹⁸ Wawancara dengan Sugiono. *Op.Cit.*

BUMDes serta sudah melakukan porporasi terkait tiket dan sudah melakukan penyeteroran kepada DPPKA Kabupaten Malang.

“Apabila mau mensertifikatkan ya harus ada usulan dulu dari pihak yang mau mensertifikatkan yakni pemerintah desa, jadi Pemerintah Desa Sanankerto melakukan usulan atau melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian LH dan Kehutanan yang berperan dalam melepas kawasan hutan menjadi sertifikat hak milik. Kalo *ujug-ujug* mau sertifikatkan ya gak bisa. Dari BPN pasti juga tidak berani. Apabila desa sudah mengakui tanah hutan tersebut mulai tahun 1910, sampai sekarang *kok* tidak bisa mengeluarkan sertifikat, kan tanda tanya. Perhutani hanya ingin ada legalitas dengan kerjasama, sebelum adanya pelepasan dari Kementerian KLH. Apabila sudah dilepas oleh pusat, ya otomatis Perhutani mundur tidak masuk dalam pengelolaan lagi.”¹¹⁹

Dari penuturan diatas bahwa, apabila Pemerintah Desa Sanankerto ingin memiliki sertifikat kepemilikan tanah hutan bambu Boon Pring, maka pihak Perhutani tidak merasa keberatan apabila tanah tersebut dimiliki oleh pihak Pemerintah Desa Sanankerto, tapi harus dengan ketentuan yang berlaku terkait pelepasan ijin menjadi hak milik. Dalam melakukan pelepasan kawasan hutan menjadi hak milik merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bukan dari Perhutani. Oleh karena itu, apabila Pemerintah Desa Sanankerto ingin mendapatkan sertifikat hak milik, maka pihak desa harus melayangkan usulan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Apabila diijinkan maka akan dilakukan pelepasan ijin kawasan hutan menjadi milik Pemerintah Desa Sanankerto.

Namun selama ini belum ada komunikasi yang dijalin antara Perhutani dan Desa Sanankerto terkait penyelesaian sengketa tanah tersebut. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Sanankerto yaitu melakukan pengajuan kepada

¹¹⁹ Wawancara dengan Tekat. *Op.Cit.*

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dilepaskan menjadi hak milik, tetapi masih belum tahu proses kelanjutannya karena masih dalam tahap kajian oleh pemerintah pusat. Sebaliknya dari pihak Perhutani mengutarakan tidak ambil pusing terkait permasalahan tanah tersebut. Perhutani secara administrasi merasa dirugikan, selain itu akses pengelolaan hutan tersebut juga terbatas, namun untuk kerugian dana tidak dirasakan oleh Perhutani. Hal tersebut dikarenakan wilayah ekowisata Boon Pring bukan menjadi prioritas andalan pemasukan untuk Perhutani.

b. Bantuan CSR Sulit Masuk

Bantuan CSR atau *Corporate Social Responsibility* dari pihak swasta masih belum ada yang diterima oleh Desa Sanankerto. BUMDes Kerto Raharjo sudah mengajukan proposal kepada pihak swasta salah satunya Bank BNI. BUMDes mengajukan proposal bantuan untuk pengembangan usaha mikro dan revitalisasi warung-warung di kawasan ekowisata Boon Pring. Akan tetapi pihak dari Bank BNI tidak mau memberikan bantuan CSR karena status kepemilikan tanah di kawasan ekowisata yang masih belum jelas.

“...Sebenarnya kita (BUMDEs) sudah komunikasi dengan perusahaan untuk mencari CSR, tapi kita kendalanya justru setiap CSR yang mau masuk harus tahu status tanah yang ada disini, status tanah disini masih belum jelas artinya tidak ada sertifikat dari BPN, sebenarnya terkendala disitu.”¹²⁰

Kendala sulitnya masuk bantuan CSR ke Desa Sanankerto dalam pembangunan ekowisata yaitu disebabkan karena status kepemilikan tanah yang tidak jelas yakni yang artinya sertifikat tanah yang diklaim milik Pemerintah Desa

¹²⁰ Wawancara dengan Samsul Arifin. *Op.Cit.*

Sanankerto tidak ada bukti kepemilikan tanah yang jelas yaitu sertifikat hak milik. Oleh karena itu perusahaan yang akan memberi bantuan CSR harus mengetahui status tanah yang jelas.

c. Masih Terdapat Penebangan Bambu Secara Liar

Penebangan bambu masih marak terjadi di kawasan hutan bambu Boon Pring, namun tiap tahun mengalami penurunan jumlah kasus penebangan liar. Penebangan bambu sangat mengancam keberadaan bambu sebagai vegetasi dominan dan homogen di kawasan hutan tersebut. Selain itu juga mengancam keberadaan keberlanjutan ekowisata yang memanfaatkan potensi alam berupa hutan bambu. Apabila keberadaan hutan bambu mengalami penurunan kualitas atau penebangan secara terus menerus, bukan hanya mengancam kawasan pemanfaatan wisata, namun juga berdampak pada penurunan jumlah debit sumber mata air. Hal tersebut berkorelasi juga terdapat pasokan air yang berada di Embung Andeman yang menjadi sumber irigasi pertanian dan air bersih masyarakat Desa Sanankerto.

d. Rangkap Jabatan Struktural BUMDes dan BPD

Apabila merujuk pada kewajiban dan larangan anggota BPD, tidak ada aturan yang bersifat eksplisit yakni melarang anggota BPD merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDes. Namun perlu diketahui yaitu BUMDes merupakan salah satu bagian dalam pembangunan kawasan pedesaan dan anggota BPD dilarang dalam pelaksana proyek pembangunan desa. Apabila pembangunan kawasan pedesaan tersebut diterjemahkan sebagai bentuk proyek pembangunan desa maka dengan jelas BPD dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus BUMDes.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 64 bagian G dijelaskan bahwa anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek desa, sehingga sudah sangat jelas dengan ketentuan seperti itu yaitu melarang BPD menjadi pengurus BUMDes. Di dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa juga memuat bahwa BPD bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yakni disampaikan pada Musyawarah Desa.¹²¹

Namun hal itu terjadi dalam kepengurusan BUMDes Kerto Raharjo, yaitu bendahara BUMDes dijabat oleh Ketua BPD Desa Sanankerto yaitu dengan nama Bapak Abdullah Faqih. Menurut beliau, Ketua BPD tidak seharusnya merangkap jabatan yang notabene beliau adalah Ketua BPD Desa Sanankerto. Terdapat beberapa alasan yang diutarakan oleh Bapak Abdullah Faqih mengenai mengapa BPD merangkap sebagai Bendahara BUMDes Kerto Raharjo. Alasan tersebut yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memadai sehingga terpaksa merangkap pekerjaan sebagai Bendahara BUMDes. Beliau juga beralasan bahwa dalam pembentukan kepengurusan BUMDes pada awal pembentukan dipilih oleh Kepala Desa Sanankerto. Selain itu beliau juga berspekulasi bahwa jabatan sebagai Ketua BPD sebentar lagi akan berakhir pada tahun 2019.¹²² Hal tersebut disebabkan pada proses pemilihan dalam pembentukan pengurus BUMDes yang dilakukan hanya oleh Kepala Desa Sanankerto tanpa melalui tahapan musyawarah dalam

¹²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, BAB XIII BUM DESA, Bagian Kedelapan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Pasal 249 Ayat 3 dan 4, Hlm 132

¹²² Hasil wawancara dengan Abdullah Faqih. *Op.Cit.*

pembentukan BUMDes, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan terhadap pembentukan awal BUMDes.

e. Ketidapahaman Khususnya Sekretaris Desa terhadap Manajemen BUMDes

Terdapat beberapa benturan antara BUMDes dengan perangkat Pemerintah Desa Sanankerto. Benturan pertama yaitu Sekretaris Desa Sanankerto tidak paham mengenai sistem keuangan akuntansi yang dibuat oleh BUMDes sehingga muncul kecurigaan dari pihak Sekretaris Desa Sanankerto. Selain itu Sekretaris Desa juga ingin PADes tahun 2018 naik menjadi 50%.

“...kalau memang puas, masih belum puas, Disana omzetnya sudah 1 miliar, tapi ke desa hanya 72 juta, itu hitungannya seperti apa, sedangkan andaman kan milik desa, yang bangun milik desa, BUMDes itu gak modal sama sekali, sebetulnya AD/ART itu tergantung pemerintah bukan BUMDes, BUMDes itu kan pembentukan dari desa, BUMDes itu hanya menjalankan saja, sehingga aturan harus ikut kepada desa.”¹²³

Selain itu, Sekretaris Desa Sanankerto menghendaki presentase pembagian AD/ART BUMDes dibuat oleh perangkat desa dan diputuskan juga oleh perangkat desa. Hal tersebut sangat bertentangan dalam mekanisme pembahasan AD/ART BUMDes. Mekanisme kesepakatan dalam pembuatan AD/ART harus melalui musyawarah desa. Namun nyatanya dalam musyawarah desa perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa juga diundang dan hadir. Menurut penuturan dari Ketua BPD, dan Ketua BUMDes, menjelaskan bahwa pada musyawarah pembahasan AD/ART tidak ada kontra mengenai pembahasan AD/ART terutama pada proporsi

¹²³ Hasil wawancara dengan Sugiono, *Op.Cit.*

persentase SHU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan SDM, khususnya Sekretaris Desa masih minim terkait pengelolaan BUMDes.

f. Sarana dan Prasarana Masih Kurang Memadai

Meski telah di kategorikan sebagai salah satu desa wisata mandiri, prasarana penunjang di Desa Sanankerto masih belum sepenuhnya memadai. Masalah sarana prasarana yang perlu diperbaiki yaitu perlu penataan kawasan khususnya pedagang kaki lima yang masih kumuh. Pedagang kaki lima tersebut sebetulnya sudah diberi batas areal berjualan, hal tersebut dikarenakan jumlah pedagang kaki lima yang banyak berjumlah sekitar 50 orang. Akibat dari banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan, secara tidak langsung berhubungan dengan jumlah sampah yang dihasilkan juga banyak. Jumlah sampah juga tidak diimbangi dengan jumlah tempat sampah yang masih sedikit dan penyebarannya tidak merata sehingga masih banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh wisatawan yang berkunjung.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dimensi lingkungan, dari aspek penyelamatan dan perlindungan ekosistem, pembangunan desa wisata berbasis ekowisata di Desa Sanankerto, pemerintah dan masyarakat desa sudah memiliki upaya penyelamatan dan perlindungan ekosistem secara berkelanjutan yaitu dengan adanya kearifan lokal yaitu Waker. Selain itu Pemerintah Desa Sanankerto juga menjalin kerjasama penyelamatan lingkungan melibatkan masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Bambu Boon Pring sebagai pelaku utama konservasi. Kerjasama juga melibatkan pemerintah salahsatunya dari BPDAS Brantas yang melakukan konservasi penanaman bambu pada tahun 2015 sampai 2017 yakni dengan pemberian bibit bambu secara berkala dan pelatihan bimbingan teknis kepada Kelompok Tani Bambu Boon Pring. Melalui upaya konservasi tersebut Hutan Bambu Boon Pring dan Embung Andeman menjelma sebagai kawasan ekowisata *arboretum* bambu di Kabupaten Malang.

Dimensi ekonomi, berdasar pada efisiensi kapital dalam pembangunan desa wisata berbasis ekowisata, belum ada prinsip keefisiensi dalam pembangunan ekowisata. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebutuhan ekonomi terhadap permintaan bahan baku bambu yang sangat tinggi, sehingga mengorbankan sumber daya alam guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya pengerajin bambu. Selain itu, pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto juga tidak menerapkan prinsip keefisiensi yaitu dengan adanya pembangunan kolam

waterboom yang menyalahi prinsip wisata berbasis ekowisata. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sanankerto terdapat lapangan pekerjaan baru serta terjadi peningkatan pendapatan dari masyarakat.

Dimensi sosial, masih belum ada pemerataan adanya pembangunan desa ekowisata terhadap aspek sosial bagi masyarakat Desa Sanankerto. Pemerintah Desa Sanankerto berupaya dalam pemanfaatan hasil usaha dapat dinikmati secara merata yaitu dengan upaya pemanfaatan PADes untuk pembangunan TPJ makam, pembangunan jambanisasi, pemberian THR untuk lembaga desa, dan bantuan prestasi anak SD. Selain itu terdapat dana sosial dari BUMDes yang dibagikan kepada tiap-tiap RT sebesar Rp. 500.000 dan RW sebesar 200.000. Untuk tingkat partisipasi masyarakat Desa Sanankerto juga terbilang tinggi, dibuktikan saat perencanaan pembentukan Pokdarwis, pelaksanaan dalam acara Grebeg Tumpeng, dan saat evaluasi yakni dengan mengikuti rapat evaluasi.

Dimensi Kelembagaan, dalam tata kelola kelembagaan, BUMDes selaku pengelola unit usaha pariwisata belum melaksanakan prinsip partisipatif, hal tersebut dibuktikan dengan keputusan secara sepihak dalam pemilihan pengurus BUMDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Sanankerto, sehingga memunculkan rangkap jabatan antara Bendahara BUMDes dan Ketua BPD. Secara prinsip akuntabel, BUMDes sudah menerapkan pembukuan keuangan baik secara internal maupun eksternal yang bertujuan dalam memudahkan pembacaan neraca keuangan. Prinsip transparansi juga sudah dilakukan oleh BUMDes yakni dengan melaporkan keadaan keuangan dengan mengadakan rapat setiap triwulan kepada dewan komisaris.

Peran Pemerintah Desa Sanankerto juga sudah mendukung pembangunan desa ekowisata yaitu dengan peran *Entrepreneur*, Koordinator, dan Fasilitator dalam pembangunan desa ekowisata. Dari sisi kerjasama pengelolaan unit usaha wisata, BUMDes belum melakukan kerjasama dengan pihak swasta karena masih terkendala status lahan yang belum jelas atau konflik tanah dengan Perhutani di kawasan Hutan Bambu Boon Pring.

Dalam pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto juga memiliki faktor pendukung yakni antara lain: *Pertama*, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan promosi serta memasukkan acara Grebeg 1001 Tuumpeng Sesucen Sedekah Bumi di kalender agenda wisata tahunan. *Kedua*, banyaknya bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan fisik ataupun non-fisik yang bermanfaat guna penunjang keberlanjutan ekowisata. *Ketiga*, terdapat bantuan modal kepada BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa Sanankerto tahun 2017 dan 2018 berturut-turut sebesar Rp. 170.000.000 dan Rp. 300.000.000. Selain itu juga terdapat bantuan hibah yang berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 50.000.000. *Keempat*, terdapat bantuan keuangan terhadap upaya konservasi hutan bambu guna keberlanjutan lingkungan khususnya keberadaan hutan bambu sebagai penunjang ekowisata.

Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto yaitu antara lain: *Pertama*, terdapat konflik kepemilikan tanah hutan bambu dengan pihak Perhutani BKPH Dampit Malang Selatan. *Kedua*, akibat

adanya status tanah yang belum jelas menyebabkan bantuan CSR sulit untuk masuk. *Ketiga*, masih dijumpai penebangan bambu secara liar, sehingga apabila dibiarkan dapat mengancam ekowisata selain itu juga dapat mengancam keberadaan sumber mata air disekitarnya. *Keempat*, dari struktur kelembagaan, terjadi rankap jabatan struktural BUMDes dan BPD. *Kelima*, ketidakpahaman khususnya Sekretaris Desa Sanankerto terhadap manajemen BUMDes. *Keenam*, sarana serta prasarana penunjang wisata masih tergolong kurang memadai khususnya untuk tempat sampah serta areal pedangang kaki lima yang masih kumuh.

6.2 Saran

1. Dibangun galeri pengerajin bambu disekitar kawasan wisata sehingga terdapat sentral penjualan produk asli Desa Sanankerto, yang saat ini hanya berada di Dusun Kampung Anyar saja.
2. Perlu ditindak lanjuti terkait status tanah di kawasan ekowisata Boon Pring Andeman dan perlu menjalin komunikasi dengan pihak Perhutani Malang.
3. Menjalni kerjasama dengan swasta sehingga dapat lebih memajukan pembangunan sektor wisata, tetapi tetap dengan menjaga dan meperhatikan aspek ekosistem.
4. Membuat peraturan dan sanksi mengikat dan jelas kepada para pencuri atau pengerusak hutan bambu.
5. Melestarikan kembali adat Brubuh karena tradisi tersebut sangat menunjang keberlangsungan ekosistem hutan bambu dan penunjang keberadaan sumber air.

6. Mengadakan pertemuan rutin dan perawatan bambu secara berkala bagi Kelompok Tani Bambu Boon Pring, sehingga kelembagaan tersebut tetap berkelanjutan terhadap upaya konservasi air dan bambu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rumlan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cha, Nan. 2009. *Sustainability Performance Evaluation System in Government, A Balanced Scorecard Approach Towards Sustainable Development*. London: Springer.
- Clayton, Barry Dalal dan Barry Sadler. 2014. *Sustainability Appraisal: A Sourcebook and Reference Guide to International Experience*. New York: Routledge.
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- GIZ. Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM. 2015. *Buku Panduan Pengembangan Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Keiner, Marco. 2003. *Re-Emphasizing Sustainable Development – The Concept of ‘Evolutionability’ on Living Chances, Equity, and Good Heritage*. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology, Institute for Territory Development and Landscape, Irl-Institute, Sustainability Research Group, Eth H^onggerberg.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017. *Dokumen Pembelajaran Program Inovasi Desa: Konservasi Bambu untuk Menjaga Sumber Mata Air dan Debit Air Embung dalam Mendukung Pertanian dan Ekowisata*. Jakarta: Tim Program Inovasi Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama.
- Moeloeng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rustiadi, Erman, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Spangenberg, Joachim H. 2002. *Institutional Sustainability Indicators: An Analysis of The Institutions in Agenda 21 and a Draft Set of Indicators for Monitoring Their Effectivity*. Sustainable Europe Research Institute. Germany. Published online in Wiley InterScience: www.interscience.wiley.com
- Spangenberg, Joachim H. 2004. *Sustainability Beyond Environmentalism: The Missing Dimensions*. Berlin, Germany.
- Spangenberg, Joachim H dan Bonniot O. 1998. *Sustainability Indicators: A Compass on The Road Towards Sustainability*. Wuppertal Paper No. 81. Februari 1998, ISSN No. 0949-5266.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Ulum, M. Chaezinul dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.

Jurnal

- Dewi, Made Heny Urmila, dkk. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali". *Jurnal Kawisatara*. Vol.3, No.2, Agustus 2013.
- Jayanti, Anggraini Dwi. 2017. "Pengelolaan Kampung Wisata dalam Prespektif Community Based Tourism di Kampung Jodipan Kota Malang". Malang: *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya*.
- Muttaqin, Tatag. 2013. "Kajian Pengembangan Dusun Konservasi Dan Wisata di Wana Wisata Coban Rondo Kabupaten Malang. Malang": *Jurnal Fakultas Pertanian dan Peternakan, Jurusan Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Oktavianus, Alex. 2014. "Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan dengan Modal Sosial di Indonesia". Bogor: *Jurnal Institut Pertanian Bogor*.
- Purmada, Dimas Kurnia, dkk. 2016. "Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)". Malang: *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Singgih, Mohamad Nur dan Nirwana. 2016. "Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Model Partisipatory Rural Appraisal (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)". Malang: *Jurnal Universitas Merdeka Malang*.
- Ridlwani, Muhammad Ama, dkk. 2017. "Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal". Malang: *Jurnal Universitas Islam Malang*.

Ulfah, Irma Fitriana, dkk. 2017. "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur". Semarang: *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021

Perjanjian Kerjasama Antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Nomor: PK.87/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017 dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 009/DPPMD/PKS/IV/2017

Profil BUMDes Kerto Raharjo Ekowisata Boon Pring Andeman Desa Sanankerto
Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani (Poktan) "Wana Boon Pring"

Surat Keputusan Kepala Desa Sanankerto Nomor: 470/ /35.07.009.2013/2017
Tentang Pengangkatan Penjaga Kebun Bambu (Waker) Desa Sanankerto

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawancara

Wawancara dengan Abdullah Faqih selaku Ketua BPD Desa Sanankerto dan Bendahara BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 16.10 WIB, bertempat di Rumah Bapak Abdullah Faqih, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Bismillatif selaku Kamituwo Dusun Kampung Anyar, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 15.00 WIB, bertempat di Rumah Bapak Bismillatif, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Imam Sulistianto selaku Staf Pengendali Ekosistem Hutan, pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 10.05 WIB, bertempat di kantor BPDASHL Brantas Sampean, Buduran-Sidoarjo.

Wawancara dengan Djamaludin selaku Wakil Ketua Poktan Bambu Boon Pring, pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan Wisata Embung Boon Pring, Turen.

Wawancara dengan Djamaludin selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Boon Pring Desa Sanankerto, pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 13.40 WIB. Bertempat di Rumah Bapak Djamaludin, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Kliman selaku Penjaga Hutan Bambu (Waker), pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 12.30 WIB bertempat di kawasan Wisata Embung Boon Pring, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Kliman selaku Penjaga Hutan Bambu (Waker), pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 13.20 WIB, bertempat di Rumah Bapak Kliman, Sanankerto, Turen.

- Wawancara dengan Miseno selaku Anggota Seksi Humas dan Pengembangan SDM Pokdarwis Boon Pring, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kawasan Ekowisata Boon Pring Andeman, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Oni Eko Cahyono selaku Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 11.10 WIB, bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
- Wawancara dengan Rahmad Aldian S selaku Ketua Pokdarwis Boon Pring Desa Sanankerto, pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 09.10 WIB, bertempat di Sekertariat bersama BUMDes dan Pokdarwis, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Rianto selaku Masyarakat Dusun Kampung Anyar, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 15.20 WIB, bertempat di Rumah Bapak Rianto, Dusun Kampung Anyar, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Samsul Arifin selaku Ketua BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 13.05 WIB bertempat di Kantor BUMDes Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku Ketua BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 11.00 WIB, bertempat di Gazebo Pusat Informasi di Kawasan Ekowisata Boon Pring Andeman, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Subur selaku Kepala Desa Sanankerto, pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 10.25 WIB, bertempat di Kantor Desa Sanankerto, Turen
- Wawancara dengan Sugiono selaku Sekertaris Desa Sanankerto, pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 10.05 WIB, bertempat di Kantor Desa Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Sugiono selaku Sekretaris Desa Sanankerto, pada tanggal 7 Juni 2018, pukul 13.11 WIB, bertempat di Rumah Bapak Sugiono, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Sulaiman selaku Pengerajin Bambu, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 15.20 WIB, bertempat di Gubug Ruang Pamer Hasil Kerajinan Bambu, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Tarip selaku Petani di Desa Sanankerto, pada tanggal 21 Juli 2018, pukul 12.20 WIB, bertempat di Areal persawahan Desa Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Tekat selaku Polisi Hutan atau Asisten Perhutani BKPH Dampit, Wilayah Bambang Selatan, Malang, pada tanggal 2 April, pukul 13.15 WIB, bertempat di Kantor Perhutani BKPH Dampit, Malang.
- Wawancara dengan Hilda selaku Analis Kehutanan dan Lahan – Rehabilitasi Hutan dan Lahan, UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Juni 2018, pukul 13.20 WIB, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Malang.
- Wawancara dengan Jumani selaku Pedagang Warung, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 10.20 WIB, bertempat di Warung Ekowisata Boon Pring Andeman, Sanankerto, Turen.
- Wawancara dengan Nobi selaku Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 13.20 WIB, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Sulistyoning Ari selaku Sekretaris BUMDes Kerto Raharjo, pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 14.30 WIB, bertempat di Sekertariat bersama BUMDes dan Pokdarwis, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Titik selaku pedagang kaki lima di kawasan ekowisata Boon Pring Andeman, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 11.05 WIB, bertempat di Ekowisata Boon Pring Andeman, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Oelang Cahyono selaku Pemilik *Homestay* Bambu Jawa, pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 14.10 WIB, bertempat di Rumah Mas Oelang Cahyono, Sanankerto, Turen.

Wawancara dengan Totok selaku Pengerajin Bambu, pada tanggal 21 Mei 2018, pukul 14.30 WIB, bertempat di Galeri Seni Armatur Art Desa Sanankerto, Turen.

